BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KABUPATEN TAKALAR





BUPATI TAKALAR

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja telah kami laksanakan sebagai wujud pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas perjanjian kinerja dan pencapaian sasarannya serta keterkaitannya dengan penggunaan anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju ke pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada tahap berikutnya.

Saya mengucapkan terimas kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kinerja ini. Kritik, saran dan rekomendasi yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak dalam mewujudkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Takalar, Maret 2026

BUPATI TAKALAR

Ir. H. Muhammad Firdaus Daeng Manye, M.M.

IKHTISIAR EKSEKUTIF

Laporan ini disusun selaras dan sinergis dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang berorientasi pada hasil dan menjawab isu-isu strategis. Melalui laporan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran yang transparan mengenai perkembangan pembangunan, pencapaian target, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan sasaran yang dikur mencakup 4 (empat) indikator tujuan dan 10 (sepuluh) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan capaian kinerja, 2 (dua) indikator tujuan memenuhi target yang ditetapkan yaitu indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan indikator Indeks Gini sementara indikator PDRB per Kapita dan Indeks Reformasi Birokrasi belum memenuhi target yang ditetapkan. Sementara itu untuk indikator sasaran, terdapat 6 (enam) indikator yang tidak memenuhi target yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka kemiskinan (%), dan Nilai Sakip Daerah dan 4 (empat) indikator yang memenuhi target yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), Indeks Kepatuhan Terhadap SPM, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Angka Kriminalitas.

Adapun masing masing realisasi dan capaian kinerja masing masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 "**Daya Saing Daerah**" telah memenuhi target dengan realisasi kinerja indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,49 dari target Perjanjian Kinerja sebesar 2,50 (capaian kinerja sebesar 139,60% atau termasuk kategori **memenuhi target**). Realisasi kinerja tujuan 1 juga telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yaitu sebesar 2,51.
   Rincian realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran yang mendukung tujuan 1 adalah sebagai berikut :
   a. Sasaran 1 "**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia**" yang diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia memperoleh realisasi kinerja sebesar 72,79 (capaian kinerja 99,10% atau termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target**) atau lebih rendah dari target Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 73,45.
   b. Sasaran 2 "**Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah**" yang diukur menggunakan indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah memperoleh nilai realisasi sebesar 3,73 (capaian kinerja sebesar 12,78% atau termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target**) atau jauh lebih rendah dari target Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 29,18.
2. Tujuan 2 "**Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan**" diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu **PDRB per Kapita** dan **Indeks Gini**. Realisasi kinerja indikator PDRB per Kapita memperoleh nilai sebesar 44,81 juta dari target sebesar 51,24 juta (capaian kinerja sebesar 87,45% atau termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target**). Sementara realisasi kinerja indikator

Indeks Gini memperoleh nilai 0,34 dari target sebesar 0,385 (capaian kinerja 110,53% atau termasuk kategori **memenuhi target**).

Rincian realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran yang mendukung tujuan 2 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 3 "**Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah**" diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator Pertumbuhan Ekonomi memperoleh nilai realisasi kinerja sebesar 4,71% dari target sebesar 6,10% – 7,14% (capaian kinerja sebesar 77,21% atau termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target**). Sementara itu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memperoleh nilai realisasi kinerja sebesar 3,76 dari target sebesar 2,20 (capaian kinerja sebesar 29,09% atau termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target**).
b. Sasaran 4 "**Berkurangnya Penduduk Miskin**" yang diukur dengan menggunakan indikator Angka Kemiskinan, memperoleh nilai realisasi kinerja sebesar 7,27% dari target sebesar 6,69% (capaian kinerja sebesar 91,33% atau termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target**).
c. Sasaran 5 "**Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**" yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)" memperoleh nilai realisasi sebesar 72,39 dari target sebesar 59,10 (capaian kinerja sebesar 122,49% atau termasuk kategori **memenuhi target**).

3. Tujuan 3 "**Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**" yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, memperoleh predikat "**B**" dengan nilai realisasi sebesar 60,40 dari target predikat "**BB**" dengan nilai antara 71 – 80 (capaian kinerja sebesar 85,07% atau termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target**).

   Rincian realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran yang mendukung tujuan 3 adalah sebagai berikut :

   a. Sasaran 6 "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan**", diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP Daerah dan Indeks Kepatuhan Terhadap SPM". Indikator Nilai SAKIP Daerah memperoleh realisasi kinerja predikat "B" dengan nilai realisasi kinerja sebesar 64,59 dari target predikat "**BB**" dengan nilai antara 71 – 80 (capaian kinerja sebesar 90,97% atau termasuk dalam kategori **tidak memenuhi target**). Sementara untuk indikator Indeks Kepatuhan Terhadap SPM memperoleh nilai kinerja sebesar 94,40% dari target rentang nilai antara 80% – 90% (capaian kinerja sebesar 118,00% atau termasuk dalam kategori **memenuhi target**).
   b. Sasaran 7 "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**" yang dikur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh predikat kinerja "Baik" dengan nilai kinerja sebesar 87,99 dari target predikat "Baik" dengan rentang nilai antara 76,61 – 88,30 (capaian kinerja sebesar 114,85% atau termasuk dalam kategori **memenuhi target**).
   c. Sasaran 8 "**Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban**" yang diukur dengan menggunakan indikator Angka Kriminalitas memperoleh realisasi kinerja sebesar 22,63 per 100.000 penduduk dari target 86,91 per 100.000 penduduk 30 (capaian kinerja sebesar 173,96% atau termasuk dalam kategori **memenuhi target**).

Berdasarkan data realisasi anggaran, masih terdapat 8,13% anggaran belanja yang tidak terealisiasi hingga akhir Desember 2025 atau sekitar **Rp 96.395.811.455,27** (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah koma Dua Puluh Tujuh Sen). Hal ini disebabkan karena terdapat sumber pembiayaan yang baru direalisasikan di akhir bulan Desember 2025 dan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISIAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR GRAFIK xi

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Gambaran Umum Organisasi I-3

1.4.1 Sumber Daya Perangkat Daerah I-3

1.4.2 Aspek Strategis I-4

1.4.3 Isu Strategis I-9

1.5 Sistematika penyusunan LkjIP Tahun 2025 ..... I-10

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-11

2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar 2023-2026 ..... II-11

2.1.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Takalar 2023-2026 ..... II-11

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Takalar Tahap 4 ..... II-12

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025 ..... II-15

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 ..... II-15

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... II-17

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025 ..... II-25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-38

3.1 Capaian Kinerja III-38

3.1.2 Tujuan 1 Memperkuat Daya Saing Daerah III-42

3.1.3 Tujuan 2 Mewujudkan Perekonomian Yang Inklusif dan Ramah Lingkungan III-44

3.1.4 Tujuan 3 Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan III-46

3.2 Analisis Capaian Kinerja III-48

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode 2023 - 2025 ..... III-48

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Tahun Akhir Perubahan RPD 2023-2026 ..... III-57
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi Sulsel dan Nasional III-62
3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan III-64
3.3.1 Tujuan 1 Memperkuat Daya Saing Daerah III-64
3.3.2 Tujuan 2 Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan III-74
3.3.3 Tujuan 3 Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan III-84
3.4 Analisis Efiseiensi Sumber Daya (Anggaran) III-90
3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja III-93
3.6 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya III-127
BAB IV PENUTUP IV-146

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis Kelamin Tahun 2025 ..... I-3

Tabel I-2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2025 ..... I-3

Tabel I-3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan I-4

Tabel I-4 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... I-5

Tabel I-5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... I-5

Tabel I-6 Urusan dan Perangkat Daerah di Kabupaten Takalar I-6

Tabel I-7 Isu Strategis Kabupaten Takalar I-9

Tabel II-1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Takalar Periode 2023 -2026 ..... II-13

Tabel II-2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 ..... II-15

Tabel II-3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... II-17

Tabel II-4 Program dan Jumlah Anggaran Tahun 2025 ..... II-19

Tabel II-5 Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Berdasarkan Tujuan, Sasaran pada masing masing Urusan II-25

Tabel III-1 Kategori Rentang Capaian III-39

Tabel III-2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-40

Tabel III-3 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 1 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-42

Tabel III-4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-43

Tabel III-5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-43

Tabel III-6 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 2 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-44

Tabel III-7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-44

Tabel III-8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-45

Tabel III-9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-45

Tabel III-10 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 3 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-46

Tabel III-11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-47

Tabel III-12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-47
Tabel III-13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... III-48
Tabel III-14 Trend Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-55
Tabel III-15 Trend Capaian Indikator Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-55
Tabel III-16 Trend Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-56
Tabel III-17 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 1 dengan Target Kinerja Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-57
Tabel III-18 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Target Kinerja Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-58
Tabel III-19 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Infrastruktur dengan Target Kinerja Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-58
Tabel III-20 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 2 dengan Target Kinerja Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-59
Tabel III-21 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-60
Tabel III-22 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-60
Tabel III-23 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-60
Tabel III-24 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-61
Tabel III-25 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6 dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-61
Tabel III-26 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 7 dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-62
Tabel III-27 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 8 dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 ..... III-62
Tabel III-28 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Provinsi dan Nasioanal Tahun 2025 ..... III-63
Tabel III-29 Perbandingan Capaian Nilai IDSD Berdasarkan Komponen dan Pilar Tahun 2024 – 2025 ..... III-64
Tabel III-30 Faktor Kunci Realisasi Indikator Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-65
Tabel III-31 Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam rangka meningkatkan realisasi kinerja Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-68

Tabel III-32 Faktor Kegagalan Reaiisasi Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar 2025 ..... III-74
Tabel III-33 Faktor Keberhasilan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Gini Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-75
Tabel III-34 Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-77
Tabel III-35 Faktor Kegagalan Realisasi Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-80
Tabel III-36 Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Takalar 2025 ..... III-81
Tabel III-37 Faktor Kegagalan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar 2025 ..... III-84
Tabel III-38 Faktor Kegagalan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Takalar 2025 ..... III-85
Tabel III-39 Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Takalar 2025 ..... III-87
Tabel III-40 Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Takalar 2025 ..... III-88
Tabel III-41 Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Kriminalitas Kabupaten Takalar 2025 ..... III-89
Tabel III-42 Urusan Pemerintahan dengan Nilai Serapan Anggaran Tertinggi Tahun 2025 ..... III-91
Tabel III-43 Urusan Pemerintahan dengan Nilai Serapan Anggaran Terendah Tahun 2025 ..... III-92
Tabel III-44 Perangkat Daerah dengan Nilai Serapan Tertinggi Tahun 2025 ..... III-92
Tabel III-45 Perangkat Daerah dengan Nilai Serapan Tertinggi Tahun 2025 ..... III-92
Tabel III-46 Program Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja di Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-93
Tabel III-47 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2025 ..... III-129

DAFTAR GAMBAR

Gambar III-1 Upaya Pencapaian Realisasi Indikator Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-68

Gambar III-2 Bukti Dukung Kegiatan Upaya Peningkatan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-72

Gambar III-3 Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Gini Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-76

Gambar III-4 Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-78

Gambar III-5 Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-79

Gambar III-6 Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-83

Gambar III-7 Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-87

Gambar III-8 Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-88

Gambar III-9 Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Angka Kriminalitas Kabupaten Takalar Tahun 2025 ..... III-90

DAFTAR GRAFIK

Grafik III-1 Trend Capaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-49

Grafik III-2 Trend Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-50

Grafik III-3 Trend Capaian Indikator Indeks Daya Saing Infrasutruktur Daerah Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-50

Grafik III-4 Trend Capaian Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-51

Grafik III-5 Trend Capaian Indikator Indeks Gini Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-52

Grafik III-6 Trend Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-52

Grafik III-7 Trend Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-53

Grafik III-8 Trend Capaian Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-53

Grafik III-9 Trend Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-54

Grafik III-10 Trend Capaian Indikator Indeks Kepatuhan Terhadap SPM Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-55

Grafik III-11 Trend Capaian Indikator Angka Kriminalitas Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025 ..... III-56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkanmelalui alat pertanggung jawaban secara berkala.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabiltas kinerja yang utuh yang dibuat dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja merupakan rangkuman penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu satu tahun berupa bentuk pertanggung jawaban atas keseluruhan proses kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini dilandaskan suatu niat yang tulus untuk mewujudkan Good Governance, yakni suatu tatanan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. Good Governance sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh tingkat akuntabiltas pelaporan pada semua tingkatan organisasi. Terdapat beberapa masalah sering muncul dalam upaya mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah delegasi wewenang yang tidak jelas, indikator kinerja yang tidak terukur atau tidak sesuai dengan rencana strategis, terlalu banyaknya tujuan organisasi uang akan dicapai dan kadangkala tidak konsisten, perundang undangan yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan tujuan organisasi, serta tidak adanya pemisah yang jelas antara kesuksesan dan kegagalan.

Proses penyusunan LKJ Kabupaten Takalar dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator, serta rencana dan realisasi kegiatan. Selanjutnya menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan realisasi dan target. Langkah akhir dari proses penysunan LKJ adalah melakukan analisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing – masing capaian indikator kinerja yang telah diukur.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) memiliki dua fungsi utama yaitu: Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2025 dan kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Takalar adalah sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan pertangung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar selain sebagai upaya perbaikan berkesinambungan baik instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, LKj diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Takalar untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat diseluruh KabupatenTakalar;
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Takalar yang akuntabel, sehingga berperan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang lebih baik kepada masyarakat;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Takalar.

Proses penyusunan LKj Kabupaten Takalar dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan. Selanjutnya, menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan realisasi dan target. Langkah akhir dari proses penyusunan LKj adalah melakukananalisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing-masing capaian indikator kinerja yang diukur.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 7069). Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Takalar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.4.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 8.172 orang yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.890 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Full Time sebanyak 356 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebanyak 3.926 orang

Sebaran ASN di Kabupaten Takalar berdasarkan jenis kelamin, kepangkatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1
Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Pegawai Negeri Sipil	1.448	2.442	3.890
2	PPPK Full Time	71	285	356
3	PPPK Paruh Waktu	1.468	2.458	3.926
Jumlah Total		**2.987**	**5.185**	**8.172**

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

Tabel I-2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang
Tahun 2025

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	0
2	Pembina Utama Madya	IV/d	4
3	Pembina Utama Muda	IV/c	292
4	Pembina Tingkat I	IV/b	536
5	Pembina	IV/a	528
6	Penata Tk. I	III/d	1.018
7	Penata	III/c	480
8	Penata Muda Tk. I	III/b	477
9	Penata	III/a	330
10	Pengatur Tk. I	II/d	76
11	Pengatur	II/c	98
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	30
13	Pengatur Muda	II/a	15
14	Juru Tk. I	I/d	3
15	Juru	I/c	3
16	Juru Muda Tk. I	I/b	0

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
17	Juru Muda	I/a	0
Jumlah Total			**3.890**

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

Tabel I-3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3/Doktor/Ph.D	4
2	S2/Pasca Sarjana	568
3	S1/Sarjana	2.616
4	Diploma IV/Akta IV	129
5	Diploma III/Akta III	225
6	Diploma II/Akta II	42
7	Diploma I/Akta I	1
8	SLTA atau Sederajat	286
9	SLTP atau Sederajat	16
10	SD	3
Jumlah Total		**3.890**

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

1.4.2 Aspek Strategis

Kabupaten Takalar merupakan daerah otonom yang terbentuk pada tanggal 10 Februari Tahun 1960 berdasarkan Undang Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 7069). Pusat Pemerintahan Kabupaten Takalar terletak di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 21 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang.

Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara 5°30’ – 5°38’ Lintang Selatan dan 119°22’ – 119°39’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Takalar memiliki batas – batas: di sebelah timur, berbatasan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.

Kabupaten Takalar terdiri dari 110 desa/kelurahan yang terletak di 12 Kecamatan. Menurut letak geografinya, sebanyak 39 desa/ kelurahan berada pada kawasan tepi laut sedangkan 71 desa/kelurahan merupakan wilayah bukan tepi laut. Menurut letak topografinya sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar adalah dataran, namun terdapat 4 desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah lereng/puncak yaitu 2 desa di Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara. Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km^2. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

Tabel I-4
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km²)	(%)
		Desa	Kelurahan		
1	Mangarabombang	5	1	33,28	5,87
2	Mappakasunggu	3	1	15,12	2,67
3	Sanrobone	6	0	29,36	5,18
4	Polongbangkeng Selatan	5	6	88,07	15,55
5	Pattallassang	0	9	25,31	4,47
6	Polongbangkeng Utara	4	6	56,51	9,98
7	Galesong Selatan	12	0	24,71	4,36
8	Galesong	17	0	25,93	4,58
9	Galesong Utara	13	1	15,11	2,67
10	Kepulauan Tanakeke	6	0	30,15	5,32
11	Polongbangkeng Timur	9	0	155,74	27,49
12	Laikang	6	0	67,21	11,86
Jumlah Total		**86**	**24**	**566,50**	**100,00**

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

Jumlah penduduk Kabupaten Takalar tahun 2025 sebanyak 338.901 jiwa yang terdiri atas 164.338 Jiwa penduduk laki laki dan 171.508 jiwa penduduk Perempuan. Sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Takalar pada tahun 2025 dapat dilhat pada tabel tabel berikut :

Tabel I-5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Orang)	% Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km²)
1	Mangarabombang	33,28	24.566	7,25	738,16
2	Mappakasunggu	15,12	10.667	3,15	705,49
3	Sanrobone	29,36	17.701	5,22	602,90
4	Polongbangkeng Selatan	88,07	31.885	9,41	362,04
5	Pattallassang	25,31	43.276	12,77	1.709,84
6	Polongbangkeng Utara	56,51	34.718	10,24	614,37
7	Galesong Selatan	24,71	30.997	9,15	1.254,43
8	Galesong	25,93	46.776	13,80	1.803,93
9	Galesong Utara	15,11	46.756	13,80	3.094,37
10	Kepulauan Tanakeke	30,15	8.288	2,45	274,89
11	Polongbangkeng Timur	155,74	21.128	6,23	135,66
12	Laikang	67,21	22.143	6,53	329,46

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Orang)	% Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km^2)
Jumlah		566,50	338.901	100,00	598,24

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

Sebagai daerah otonom, kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi.

Rincian urusan Pemerintahan Kabupaten Takalar diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) urusan. Secara rinci pelaksanaan urusan oleh perangkat daerah diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel I-6
Urusan dan Perangkat Daerah di Kabupaten Takalar

No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	7	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		8	Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencna,

No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			Perlindungan Anak	Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencna, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10	Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		11	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		13	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		14	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		15	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		16	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		20	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		21	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		22	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		23	Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikulutura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	24	Perikanan	Dinas Perikanan
		25	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikulutura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		26	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		27	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	28	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		29	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		30	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		31	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		32	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Badan Pendapatan Daerah
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	33	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		34	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	35	Pengawasan	Inspektorat Daerah
7	Unsur Kewilayahan	36	Kecamatan	Mangarabombang
				Mappakasunggu
				Sanrobone
				Polongbangkeng Selatan
				Pattallassang
				Polongbangkeng Utara
				Galesong Selatan
				Galesong Utara
				Kepulauan Tanakeke

No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
				Polonbangkeng Timur
				Laikang
8	Unsur Pemerintahan Umum	37	Kesatuan Bangsa dan Poltik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.4.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Takalar tahun 2025 yang berkaitan dengan permasalahan Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I-7
Isu Strategis Kabupaten Takalar

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
1. Masih rendahnya peningkatan kapasitas daya saing daerah secara berkelanjutan	1. Rendahnya akses Masyarakat terhadap kebutuhan dasar 2. Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berdauya saing dan bermartabat 3. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pedesaan 4. Belum optimalnya Upaya pencegahan lingkungan dan sumber daya alam
2. Pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan belum optimal	1. Pertumbuhan ekonomi yang belum focus pada sektor unggulan 2. Pengetasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan ekonomi inklusif 3. Belum kuatnya bargaining position UKM dan sumber daya wirausahawan
3. Tata Kelola Pemerintahan masih rendah	1. Belum berjalannya pelayanan publkik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi (IT) 2. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.5 Sistematika penyusunan LkjIP Tahun 2025

Sebagaimana tolah diatur dalam PERMEPAN Nomor 53 Tahun 2014, penyajian LkjIP Kabupaten Takalar Tahun 2025 disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja
   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.
B. Analisis Capaian Kinerja
   Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
C. Realisasi Anggaran
   Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
2. Surat Pernyataan Telah Diriviu
3. Data dukung

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kabupaten Takalar membahas rencana-rencana strategis yang akan dicapai pada rencana kinerja yang menjadi target Pemerintah Kabupaten Takalar dalam perencanaan pembangunan tahun 2025.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 3, bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun, namun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan perkada.

Berdasarkan arahan Inmendagri No. 70 Tahun 2021, perumusan tujuan dan sasaran RPD didasarkan pada visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat serta isu aktual. Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diubah melalui RPD ini. Tujuan dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam rangka tercapainya tujuan. Sasaran juga dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Indikator tujuan dan sasaran akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) bagi kepala daerah yang akan dilaporkan pencapaiannya setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah.

2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

2.1.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Takalar 2023-2026

Berdasarkan penjelasan yang telah disampakan diatas, Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 didasarkan pada visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat serta isu aktual. Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi RPJPD Kabupaten Takalar 2005 -2025

Masyarakat Mandiri, Demokratis, Berkeadilan Sosial dan

Sejahtera Lahir-Bathin

Visi RPJPD Kabupaten Takalar memiliki filosofi bahwa kemajuan yang dicapai melalui pembangunan idealnya mengantar daerah tersebut pada kondisi kemandirian

dalam mengelola sumberdaya tanpa mengabaikan interaksi dengan daerah lain. Dalam rangka ini, daya saing daerah menjadi sangat penting, baik untuk kemandirian maupun untuk interaksi dengan daerah lain. Visi RPJPD Kabupaten Takalar juga menekankan kondisi demokratis dan berkeadilan sosial sebagai satu kesatuan cita-cita ideal yang penekanannya pada pemerataan atas kesejahteraan yang dicapai secara bersama. Kesejahteraan tersebut idelanya mencakup dimensi lahir dan bathin, karena itu ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara menjadi keniscayaan dari pencapaian pembangunan.

Misi RPJPD Kabupaten Takalar tahun 2005-2025 adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah.
2. Peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik dan pemerintahan yang demokratis.
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek.
4. Peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara material.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama serta penghayatan nilainilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bathiniah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Takalar Tahap 4

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator sasaran.

Pada tahun kedua pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026, telah dilakukan penyesuaian target target pada masing masing tujuan dan sasaran yang dengan pertimbangan :

1. Penetapan Target Indikator makro disesuaikan dengan capaian data makro tahun 2022 dan tahun 2023 yang telah melampaui target, sehingga dipandang perlu untuk merevisi target kinerja tahun berikutnya.
2. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah disesuaikan dengan capaian data makro tahun 2022 dan tahun 2023 yang telah melampaui target, sehingga dipandang perlu untuk merevisi target kinerja tahun berikutnya.

Secara rinci tujuan dan sasaran RPD 2023 – 2026 beserta target pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-1
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Takalar Periode 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPD 2023-2026 Sebelum Perubahan				Target RPD 2023-2026 Setelah Perubahan			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	4	5	6	7	5	6	7
T1. Memperkuat Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,450	2,453	2,50	2,51	3,21	3,40	3,60	3,85
	T1. S1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,83	69,70	70,31	70,54	68,83	72,85	73,45	73,86
	T2. S2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	29,174	29,178	29,182	29,186	3,19	3,72	3,85	3,95
T2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan		PDRB Per Kapita (Juta)	34,03	34,07	34,11	34,15	34,03	49,52	51,24	56,51
		Indeks Gini	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,32	0,30
	T2. S1. Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78	4,62-5,98	5,04-6,52	6,10-7,14	6,22-7,78
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00	3,96	3,91	3,86	3,32	2,5	2,2	2,0
	T2. S2. Berkurangnya Penduduk Miskin	Angka kemiskinan (%)	7,09	6,90	6,69	6,60	7,09	6,90	6,69	6,60
	T2. S3. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	59,02	59,06	59,10	59,14	59,02	59,06	59,10	59,14

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RPD 2023-2026 Sebelum Perubahan				Target RPD 2023-2026 Setelah Perubahan			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	4	5	6	7	5	6	7
T3. Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
	T3. S1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Daerah	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	B (60-70)	B (60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)
		Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	60-70	70-80	80-90	90-100	60 - 70	70-80	80-90	90 – 100
	T3. S2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)
	T3. S3. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	91,91	89,41	86,91	84,41	91,91 per 100.000 Penduduk	89,41 per 100.000 Penduduk	86,91 per 100.000 Penduduk	84,41 per 100.000 Penduduk

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Takalar telah menuangkan target kinerja daerah yang ditetapkan pada tahun 2025 beserta indikator ketercapaian, dan targetnya ke dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Dasar penyusunan rencana kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah indikator sasaran yang termuat dalam RPD dan indikator lainnya yang dianggap penting dan relevan. IKU disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai alat ukur keberhasilan selama lima tahun. IKU Pemerintah Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
T1. S1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. Dimensi Kesehatan : $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Dimensi Pendidikan : $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran : $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Badan Pusat Statistik
T2. S2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Daerah merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi	Badan Riset dan Inovasi

Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
		Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. Indeks Daya Saing Daerah diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.	
T2. S1. Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Rumus yang umum digunakan adalah sebagai berikut: $\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDB}_t - \text{PDB}_{t-1}}{\text{PDB}_{t-1}} \times 100\%$ **Keterangan:** • PDB_t: Produk Domestik Bruto pada tahun berjalan (tahun sekarang). • PDB_{t-1}: Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya.	Badan Pusat Statistik
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. $\frac{\sum_{i=1}^{n} Pengangguran}{\sum_{i=1}^{n} AngkatanKerja} X100\%$	Badan Pusat Statistik
T2. S2. Berkurangnya Penduduk Miskin	Angka kemiskinan (%)	Angka kemiskinan menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Angka 10% artinya dalam 100 orang penduduk, terdapat 10 orang yang rata-rata pengeluarannya sebulan di bawah garis kemiskinan $P_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^0$ z : *garis kemiskinan* y_i : *rata – rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan* q : *banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan* n : *jumlah penduduk*	Badan Pusat Statistik
T2. S3. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar
T3. S1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Daerah	Komposit dari nilai indikator perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja yang ada di seluruh instansi.	Kementerian PANRB Republik Indonesia

Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
	Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	Diperoleh dari aplikasi E-SPM Bangda Kemendagri	Bangda Kemendagri
T3. S2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ Dimana: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0{,}071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yai antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversik dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 NILAI PERSEPSI / NILAI INTERVAL IKM / NILAI INTERVAL KONVERSI IKM / MUTU PELAYANAN / KINERJA UNIT PELAYANAN 1 / 1,00 – 1,75 / 25 – 43,75 / D / Tidak baik 2 / 1,76 – 2,50 / 43,76 – 62,50 / C / Kurang baik 3 / 2,51 – 3,25 / 62,51 – 81,25 / B / Baik 4 / 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 / A / Sangat baik	
T3. S3. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	Jumlah tindak kejahatan per 100.000 penduduk di wilayah tertentu	SatpolPP dan Kepolisian Resort Takalar

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah 2023 -2026

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Kabupaten Takalar Tahun 2025 dibuat berdasakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 2023-2026. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 terdiri atas 11 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja serta didukung dengan 143 Program pendanaan dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel II-3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meperkuat Daya Saing Daerah	1 Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,50
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,45

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	3 Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,18
4	Mewujudkan Perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	4 PDRB/Kapita		51,24
		5 Indeks Gini	Rasio	0,34
5	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	6 Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,10 – 7,14
		7 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,20
6	Berkurangnya Penduduk Miskin	8 Angka Kemiskinan	Persen	6,69
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daera	9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	59,10
8	Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	10 Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat/ Angka	BB (71 – 80)
9	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	11 Nilai SAKIP Daerah	Predikat/ Angka	BB (71 – 80)
10	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	12 Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Persen	80 – 90
		13 Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat/ Angka	Baik (76,61 – 88,30)
11	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban	14 Angka Kriminalitas	Angka	86,91 per 100.000 Penduduk

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025

Adapun detail program yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-4
Program dan Jumlah Anggaran Tahun 2025

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	252.196.964.322,40
2	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	86.396.182.469,73
3	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88.234.157.244,32
4	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	195.880.208.569,68
5	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.172.858.260,00
6	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	188.748.580,00
7	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.215.420.722,00
8	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	11.400.156.000,00
9	1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.930.225.400,00
10	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.420.379.300,00
11	1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.622.862.340,00
12	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	89.921.850,00
13	1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	16.330.099.124,00
14	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	16.055.333.946,00
15	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	20.095.860,00
16	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	279.763.000,00
17	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	354.943.500,00
18	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	12.901.530.500,00
19	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2.713.182.100,00
20	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.134.445.826,00
21	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	70.732.410,00
22	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	156.599.070,00
23	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	246.452.740,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
		Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
24	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	2.000.000,00
25	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	102.965.900,00
26	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	301.797.100,00
27	1.06.06	Program Penanganan Bencana	89.980.000,00
28	1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4.000.000,00
29	2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	47.090.700,00
30	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	70.536.070,00
31	2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.796.909.504,00
32	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	3.570.000,00
33	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	251.914.680,00
34	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	5.627.110,00
35	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	149.265.000,00
36	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	95.323.210,00
37	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.499.760,00
38	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.000.170,00
39	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	257.138.420,00
40	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	104.565.650,00
41	2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	165.000,00
42	2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	728.000,00
43	2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.140.450.080,00
44	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	624.000,00
45	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	6.271.300,00
46	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	118.963.720,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
47	2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	936.000,00
48	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	2.152.458.820,00
49	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.787.320.767,00
50	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	705.432.700,00
51	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	20.744.000,00
52	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.291.000,00
53	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14.768.000,00
54	2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.044.638.177,00
55	2.13.02	Program Penataan Desa	2.000.000,00
56	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	314.003.320,00
57	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	857.386.360,00
58	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	345.200.000,00
59	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.310.525.200,00
60	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.712.800.000,00
61	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.357.034.538,00
62	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.566.630.974,00
63	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.311.722.855,00
64	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.983.685.700,00
65	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.572.351.350,00
66	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.433.204.858,00
67	2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.215.600,00
68	2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	108.660.250,00
69	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	109.485.000,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
70	2.17.08	Program Pengembangan Umkm	1.169.779.300,00
71	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.224.122.641,00
72	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	19.254.000,00
73	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	66.649.500,00
74	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	62.352.700,00
75	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	494.953.030,00
76	2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.494.770.870,00
77	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	232.087.600,00
78	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	76.954.700,00
79	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6.844.000,00
80	2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	88.827.300,00
81	2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	114.635.000,00
82	2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.641.476.324,00
83	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.849.588.648,00
84	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	384.016.690,00
85	2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	14.440.000,00
86	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	5.949.000,00
87	2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	6.000.000,00
88	2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	885.500,00
89	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.546.060.606,00
90	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.768.497.390,00
91	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	339.092.960,00
92	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	9.906.700,00
93	3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.380.485.445,00
94	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	49.759.690,00
95	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	600.000.000,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
96	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	200.476.900,00
97	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	194.916.500,00
98	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.661.716.657,00
99	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.107.923.990,00
100	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.034.624.530,00
101	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	134.952.190,00
102	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.529.730,00
103	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	9.880.390,00
104	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	1.591.321.950,00
105	3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.118.601.145,00
106	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.890.000,00
107	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	10.946.750,00
108	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	5.890.000,00
109	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	230.890.000,00
110	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.870.000,00
111	3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	7.463.100,00
112	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.393.848.060,10
113	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.600.943.620,00
114	4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.467.984.470,00
115	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.037.044.296,00
116	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	12.697.896.200,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
117	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.212.300.039,00
118	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.343.081.670,00
119	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	180.445.900,00
120	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.329.992.499,77
121	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	167.825.554.858,00
122	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	962.321.890,00
123	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.469.360.470,00
124	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.779.986.833,00
125	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	519.548.170,00
126	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	666.169.680,00
127	5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.318.100,00
128	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	494.390.580,00
129	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.635.338.515,00
130	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.746.865.400,00
131	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	452.350.000,00
132	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.313.348.880,00
133	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.545.200,00
134	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.074.110.810,00
135	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.922.500,00
136	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.225.000,00
137	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.267.410,00
138	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.958.805.466,00

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
139	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	793.204.880,00
140	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.113.157.000,00
141	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.476.800,00
142	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.740.000,00
143	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	956.107.710,00
TOTAL			**1.185.434.080.310,00**

Sumber : SIPD, 2025

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pencapaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025 dilaksanakan melalui program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan rencana anggaran sebagaimana telah tercantum pada APBD Kabupaten Takalar tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-5
Alokasi Anggaran Perangkat Daerah
Berdasarkan Tujuan, Sasaran pada masing masing Urusan

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	T1. Memperkuat Daya Saing Daerah				367.665.053.717,41
		T1. S1 Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia			295.979.929.823,41
			1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	86.396.182.469,73
			1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	195.880.208.569,68
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.172.858.260,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	188.748.580,00
			2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	3.570.000,00
				Program Perlindungan Perempuan	251.914.680,00
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	5.627.110,00
				Program Perlindungan Khusus Anak	149.265.000,00
			02.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	95.323.210,00
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.499.760,00
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.000.170,00
			2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	345.200.000,00
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.310.525.200,00
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.712.800.000,00
			2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	494.953.030,00
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.494.770.870,00
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	232.087.600,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	88.827.300,00
				Program Pembinaan Sejarah	114.635.000,00
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.641.476.324,00
			2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	384.016.690,00
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	14.440.000,00
		T1. S2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah			71.685.123.894,00
			1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.400.156.000,00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.930.225.400,00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.420.379.300,00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.622.862.340,00
				Program Penataan Bangunan Gedung	89.921.850,00
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	16.330.099.124,00
				Program Penyelenggaraan Jalan	16.055.333.946,00
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	20.095.860,00
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	279.763.000,00
			1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	354.943.500,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	12.901.530.500,00
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2.713.182.100,00
			2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.566.630.974,00
2	T2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan				20.102.223.560,00
		T2. S1 Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah			16.459.377.260,00
			2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	47.090.700,00
				Program Penempatan Tenaga Kerja	70.536.070,00
			2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	32.215.600,00
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	108.660.250,00
				Program Pengembangan UMKM	109.485.000,00
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.169.779.300,00
			2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	19.254.000,00
				Program Pelayanan Penanaman Modal	66.649.500,00
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	62.352.700,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.768.497.390,00
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	339.092.960,00
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	9.906.700,00
			3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.107.923.990,00
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.034.624.530,00
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	134.952.190,00
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.529.730,00
				Program Perizinan Usaha Pertanian	9.880.390,00
				Program Penyuluhan Pertanian	1.591.321.950,00
			3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	49.759.690,00
				Program Pemasaran Pariwisata	600.000.000,00
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	194.916.500,00
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan	200.476.900,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Hak Kekayaan Intelektual	
			3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.890.000,00
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	10.946.750,00
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	5.890.000,00
			3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	230.890.000,00
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.870.000,00
			4.01 Sekretariat Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.467.984.470,00
		T2. S2. Berkurangnya Penduduk Miskin			1.363.592.460,00
			1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	2.000.000,00
				Program Rehabilitasi Sosial	102.965.900,00
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	301.797.100,00
				Program Penanganan Bencana	89.980.000,00
			2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa	2.000.000,00
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	857.386.360,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	7.463.100,00
		T2. S3 Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah			2.279.253.840,00
			2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	624.000,00
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	6.271.300,00
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	118.963.720,00
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	936.000,00
				Program Pengelolaan Persampahan	2.152.458.820,00
3	T3. Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan				797.666.803.032,59
		T3. S1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan			758.452.403.982,59
			01.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	252.196.964.322,40
			01.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88.234.157.244,32
			1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.215.420.722,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.134.445.826,00
			2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.796.909.504,00
			2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	257.138.420,00
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	104.565.650,00
				Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	165.000,00
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	728.000,00
			2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.140.450.080,00
			2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.787.320.767,00
			2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.044.638.177,00
			2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.357.034.538,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.311.722.855,00
			2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.433.204.858,00
			2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.224.122.641,00
			2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.849.588.648,00
			3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.546.060.606,00
			3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.380.485.445,00
			3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.661.716.657,00
			3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.118.601.145,00
			4.01 Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.393.848.060,10
			4.02 Sekretariat Dprd	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.037.044.296,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			5.01 Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.212.300.039,00
			5.02 Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.329.992.499,77
			5.03 Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.779.986.833,00
			5.05 Penelitian Dan Pengembangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.318.100,00
			6.01 Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.635.338.515,00
			7.01 Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.313.348.880,00
			8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.958.805.466,00
			5.01 Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.343.081.670,00
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	180.445.900,00
			5.02 Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	167.825.554.858,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	962.321.890,00
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.469.360.470,00
			6.01 Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.746.865.400,00
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	452.350.000,00
		T3. S2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			36.309.522.750,00
			1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	156.599.070,00
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	70.732.410,00
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	246.452.740,00
			1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4.000.000,00
			2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	705.432.700,00
				Program Pencatatan Sipil	20.744.000,00
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.291.000,00
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14.768.000,00
			2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	314.003.320,00
			2.16 Urusan Pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi Dan	2.983.685.700,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Bidang Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi Publik	
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.572.351.350,00
			2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	76.954.700,00
			2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6.844.000,00
			2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pengelolaan Arsip	5.949.000,00
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	6.000.000,00
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	885.500,00
			4.01 Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.600.943.620,00
			4.02 Sekretariat Dprd	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	12.697.896.200,00
			5.03 Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	519.548.170,00
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	666.169.680,00
			5.05 Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	494.390.580,00
			7.01 Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.545.200,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.074.110.810,00

No	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.225.000,00
		T3. S3. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban			2.904.876.300,00
			7.01 Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.922.500,00
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.267.410,00
			8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	793.204.880,00
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.113.157.000,00
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.476.800,00
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.740.000,00
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	956.107.710,00
JUMLAH					**1.185.434.080.310,00**

Sumber : SIPD, 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam paradigma tata kelola pemerintahan modern, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah komitmen moral dan hukum untuk mewujudkan *Good Governance*. Pada tingkat pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Takalar, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa setiap sumber daya publik, terutama anggaran daerah (APBD), dikelola dengan prinsip Value for Money.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PERMEN PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah, yang menekankan pada integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. Di tingkat Kabupaten, implementasi ini menjadi sangat krusial mengingat posisi pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam setiap laporan kinerja, pemerintah tidak hanya mencatat angka atau hasil yang terukur, tetapi juga menggali lebih jauh faktor-faktor yang mendasari pencapaian atau ketidaksesuaian dengan target yang telah ditentukan. Analisis ini mencakup pemahaman mengenai kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi implementasi program, termasuk tantangan sumber daya, kebijakan yang berubah, ataupun hambatan operasional lainnya. Dengan demikian, setiap laporan kinerja memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang ada, serta faktor-faktor yang perlu diperbaiki atau diperkuat.

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja tujuan/sasaran dengan realisasi pada tahun 2025. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) dan selanjutnya dianalisis tingkat keberhasilan setiap indikator untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai dan rekomendasi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam KEPKA LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar, yaitu sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (*progres positif*), dengan menggunakan rumus:

$$\boldsymbol{Persentase\ tingkat\ capaian\ kinerja} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}}\ x\ \mathbf{100}$$

Contoh penggunaan perhitungan progres positif, yaitu sebagai berikut:

Persentasi tingkat capaian kinerja Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

$$= \frac{2{,}75}{2{,}50}\ x\ 100$$
$$= \mathbf{108}\ \%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (*progres negatif),* dengan menggunakan rumus:

$$\boldsymbol{Persentase\ tingkat\ capaian\ kinerja} = \frac{\boldsymbol{Target} - (\boldsymbol{Realisasi} - \boldsymbol{Target})}{\boldsymbol{Target}}\ x\ \mathbf{100}$$

Contoh penggunaan progres negatif, yaitu sebagai berikut :

Persentasi tingkat capaian kinerja Angka Kemiskinan

$$= \frac{6{,}69 - (7{,}05 - 6{,}69)}{6{,}69}\ x\ 100$$
$$= \mathbf{94{,}61}\ \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan tujuan/sasaran, digunakan skala pengukuran tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel III-1
Kategori Rentang Capaian

No	Capaian	Kategori Capaian
1	≥ 100 %	Memenuhi Target
2	< 100 %	Tidak Memenuhi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar menyajikan setiap sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisis kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target tahun 2025, membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan target jangka menengah berdasarkan skala regional dan nasional. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2025 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

Tabel III-2
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5 x 100)	8
1. Memperkuat Daya Saing Daerah		1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	2,50	3,49	139,60	Memenuhi Target
	1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,45	72,79	99,10	Tidak Memenuhi Target
	2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	3. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,18	3,73	12,78	Tidak Memenuhi Target
2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan		4. PDRB Per Kapita (Juta)	Juta	51,24	44,81	87,45	Tidak Memenuhi Target
		5. Indeks Gini	Rasio	0,385	0,34	110,53	Memenuhi Target
	3. Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,10 – 7,14	4,71	77,21	Tidak Memenuhi Target
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,20	3,76	29,09	Tidak Memenuhi Target
	4. Berkurangnya Penduduk Miskin	8. Angka kemiskinan (%)	Persen	6,69	7,27	91,33	Tidak Memenuhi Target
	5. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	59,10	72,39	122,49	Memenuhi Target

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5 x 100)	8
3. Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan		10. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat/Angka	BB (71 – 80)	60,40	85,07	Tidak Memenuhi Target
	6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	11. Nilai Sakip Daerah	Predikat/Angka	BB (71 – 80)	B (64,59)	90,97	Tidak Memenuhi Target
		12. Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	Persen	80 – 90	94,40	118,00	Memenuhi Target
	7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	13. Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat/Angka	Baik (76,61 – 88,30)	Baik (87,99)	114,85	Memenuhi Target
	8. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	14. Angka Kriminalitas	Angka	86,91 per 100.000 Penduduk	22,63	173,96	Memenuhi Target

Sumber : Hasil Analisis Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja, 2025

Berdasarkan tabel III – 2, jumlah indikator tujuan dan sasaran pada Perjanjian Kinerja adalah sebanyak 14 indikator dengan perincian 4 (empat) indikator tujuan dan 10 (sepuluh) indikator sasaran. Jumlah indikator tujuan dengan kategori capaian memenuhi target sebanyak 2 (dua) atau sebesar 50%, sedangkan jumlah indikator sasasaran dengan kategori memenuhi target adalah sebanyak 3 (tiga) atau sebesar 30%. Secara keseluruhan, jumlah indikator tujuan dan sasaran dengan kategori memenuhi target adalah sebanyak 4 (empat) indikator atau hanya sebesar 28,57%.

3.1.2 Tujuan 1 Memperkuat Daya Saing Daerah

Tujuan 1 "Memperkuat daya saing daerah" diukur dengan menggunakan 1(satu) indikator Tujuan yaitu Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merupakan instrumen pengukur produktivitas dan kemajuan wilayah melalui 4 aspek utama (lingkungan penguat, SDM, pasar, ekosistem inovasi), 12 pilar (termasuk kelembagaan, infrastruktur, teknologi, kesehatan, pendidikan), 23 dimensi, dan sekitar 90-an indikator yang disusun oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan 2 (dua) indikator Sasaran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah (IDSD).

Tabel III-3
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 1
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Tujuan	Capaian 2024	2025			Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,45	2,50	3,49	139,60	Memenuhi Target

Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian indikator tujuan "**Memperkuat Daya Saing Daerah**" yaitu **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)** termasuk dalam kategori **Memenuhi Target** dengan persentase capaian sebesar 139,60 %.

3.1.2.1 Tujuan 1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia

Sasaran 1 Tujuan 1 **Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia** diukur menggunakan indikator **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi/daya beli).

Tabel III-4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Memperkuat Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,45	72,79	99,10	Tidak Memenuhi Target

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 adalah sebesar 72,79 yang berada dibawah target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 73,45 sehingga dikategorikan **Tidak Memenuhi Target**.

3.1.2.2 Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur

Sasaran 2 Tujuan 1 **Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur** diukur dengan menggunakan indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah yang merupakan metrik pengukur kualitas dan ketersediaan sarana fisik seperti aksesibilitas jalan, layanan listrik, transportasi (bandara/pelabuhan), air bersih, dan telekomunikasi, yang digunakan BRIN dalam pilar infrastruktur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) untuk menilai produktivitas ekonomi wilayah.

Tabel III-5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Memperkuat Daya Saing Daerah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,18	3,73	12,78	Tidak Memenuhi Target

Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Tahun 2025 adalah sebesar 3,73 yang berada dibawah target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 29,18 sehingga dikategorikan **Tidak Memenuhi Target**.

3.1.3 Tujuan 2 Mewujudkan Perekonomian Yang Inklusif dan Ramah Lingkungan

Tujuan 2 Mewujudkan Perekenomian Yang Inklusif dan Ramah Lingkungan diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator Tujuan yaitu PDRB per Kapita dan Indeks Gini serta 4 (empat) indikator sasaran yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Penganguran Terbuka, Angka Kemiskinan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD).

Tabel III-6
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 2
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Tujuan	Capaian 2024	2025			Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
PDRB Per Kapita	42,35	51,24	44,81	87,45	Tidak Memenuhi Target
Indeks Gini	0,34	0,385	0,34	110,53	Memenuhi Target

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan, salah satu dari 2 (dua) indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu indikator PDRB Per Kapita dengan persentase capaian untuk sebesar hanya 87,45%. Sementara untuk indikator Indeks Gini persentase capaian yang diperoleh adalah sebesar 110,53% atau termasuk kategori memenuhi target.

3.1.3.1 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah

Sasaran 3 Tujuan 2 Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator *progres negatif* yang menunjukkan semakin rendah realisasi maka semakin baik capaian yang diperoleh.

Tabel III-7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,10 –7,14	4,71	77,21	Tidak Memenuhi Target
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,2	3,76	29,09	Tidak Memenuhi Target

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran "Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah" seluruhnya berada dalam kategori "Tidak Memenuhi Target" yaitu dengan masing masing capaian untuk Pertumbuhan Ekonomi sebesar 77,21% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 29,09%.

3.1.3.2 Tujuan 2 Sasaran 4 Berkurangnya Penduduk Miskin

Sasaran 4 Tujuan 2 "**Berkurangnya Penduduk Miskin**" diukur dengan menggunakan indikator Angka Kemiskinan. Indikator ini adalah indikator *progress negatif* yang menunjukkan semakin rendah realisasi maka semakin baik capaian yang diperoleh.

Tabel III-8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Mewujudkan Perekonomian Yang Inklusif Dan Ramah Lingkungan	Berkurangnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	Persen	6,69	7,27	91,33	Tidak Memenuhi Target

Sumber : Takalar Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilhat bahwa indkator angka kemiskinan (%) yang digunakan untuk mengukur sasaran Berkurangnya Penduduk Miskin termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Target dengan nilai capaian 91,33 %.

3.1.3.3 Tujuan 2 Sasaran 5 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Sasaran 5 "**Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**" diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah adalah nilai komposit yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan, terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH menjadi instrumen evaluasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang mencakup isu hijau dan cokelat.

Tabel III-9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Mewujudkan Perekonomian Yang	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	59,10	72,39	122,49	Memenuhi Target

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Inklusif Dan Ramah Lingkungan	Hidup Daerah	Daerah (IKLHD)					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indkator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) yang digunakan untuk mengukur sasaran Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah adalah sebesar 122,49% atau termasuk dalam kategori Memenuhi Target.

3.1.4 Tujuan 3 Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan 3 "**Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan**" diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator indeks reformasi birokrasi (RB) adalah alat ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas, meliputi 18-20 lebih komponen evaluasi. Indikator utamanya mencakup penyederhanaan struktur digitalisasi (SPBE), survei kepuasan publik, opini BPK, dan reformasi hukum. Indeks RB (sering disingkat IRB) mencerminkan kemajuan perbaikan birokrasi, baik secara general maupun tematik.

Tabel III-10
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 3
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Tujuan	Capaian 2024	2025			Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	68,26	BB (71 - 80)	B (60,40)	85,07	Tidak Memenuhi Target

Sumber : http://portalrb.menpan.go.id, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang ditujukan untuk mengukur tujuan 3 "Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan" adalah sebesar 85,07% atau termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat.

3.1.4.1 Tujuan 3 Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan

Sasaran 6 **Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja dan Keuangan** diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Nilai Sakip Daerah dan indikator Indeks Kepatuhan terhadap SPM. Indikator nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja (hasil/impact). Nilai ini berbentuk predikat (AA hingga D) yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sementara itu indikator Indeks Kepatuhan terhadap SPM merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah (Pemda) telah memenuhi kewajibannya dalam

memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar teknis yang ditetapkan.

Tabel III-11
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Daerah	Predikat/ Angka	BB (71 - 80)	B (64,59)	90,97	Tidak Memenuhi Target
		Indeks Kepatuhan terhadap SPM	Persen	80-90	94,40	118,00	Memenuhi Target

Sumber : http://portalrb.menpan.go.id, 2025 dan Bagian Pembangunan Setda Takalar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator Nilai SAKIP Daerah adalah sebesar 90,97% atau masih termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Target, sementara untuk indikator Indeks Kepatuhan Terhadap SPM memperoleh capaian sebesar 118,00% atau masuk dalam kategori Memenuhi Target.

3.1.4.2 Tujuan 3 Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 7 diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang menilai 9 unsur pelayanan: prosedur, persyaratan, kejelasan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan, dan sarana/prasarana. IKM digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah (skala 25-100) dan mengevaluasi kesesuaian layanan dengan harapan masyarakat.

Tabel III-12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran 7 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat /Angka	Baik (76,61 - 88,30)	Baik (87,99)	114,85	Memenuhi Target

Sumber : Hasil Perhitungan IKM berdasarkan Formulir F03 PEKPPP, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilhat bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran meningkatnya

kualitas pelayanan publik menunjukkan peserntase capaian sebesar 114,85 persen atau termasuk dalam kategori Memenuhi Target.

3.1.4.3 Tujuan 3 Sasaran 8 : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban

Sasaran 8 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban diukur dengan menggunakan indikator Angka Kriminalitas Indikator angka kriminalitas adalah alat ukur statistik yang merepresentasikan tingkat risiko, kerawanan, dan frekuensi tindak kejahatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator utama, atau Crime Rate, dihitung dengan membagi total kejahatan per tahun dengan jumlah penduduk, biasanya per 10.000 atau 100.000.

Tabel III-13
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban	Angka Kriminalitas	Angka	86,91 Per 100.000 penduduk	22,63 Per 100.000 penduduk	173,96	Memenuhi Target

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyelamatan, 2025

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode 2023 - 2025

Setelah melakukan perhitungan dan perbandingan terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja periode tahun 2023 – 2025, diperoleh data bahwa untuk realisasi kinerja, dari 14 (empat) belas indikator tujuan dan sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 9 (sembilan) atau 64,29% indikator yang mengalami peningkatan realisasi, 5 (lima) indikator atau 28,57% yang mengalami penurunan realisasi dan 1 (satu) indikator yang sasaran yang stagnan.

Perlu dijelaskan bahwa dari 14 (empat belas) indikator yang diukur, terdapat 4 (empat) indikator yang termasuk dalam kategori indikator *progres negatif* (Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik). Indikator tersebut adalah Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka kemiskinan dan Angka Kriminalitas.

3.2.1.1 Tujuan 1 : Memperkuat Daya Saing Daerah

Realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tujuan 1 selama periode tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III-1
Trend Capaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

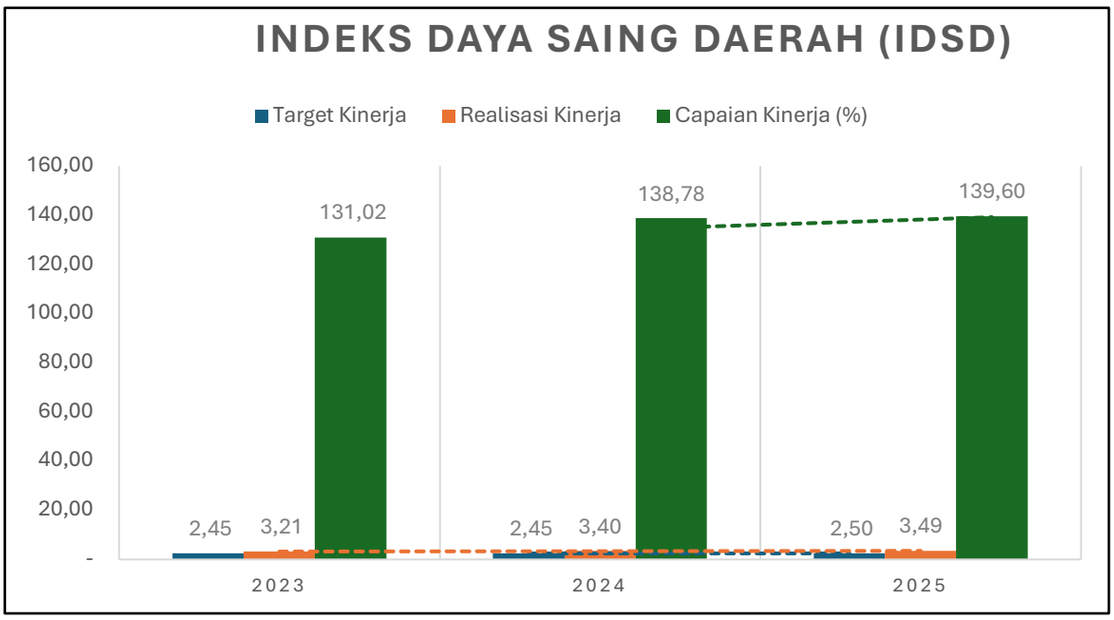

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi kinerja indikator Indeks Daya Saing Daerah yang dicapai Kabupaten Takalar selama periode 2023 – 2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan nilai realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 3,49 atau meningkat sebesar 0,9 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara itu capaian kinerja untuk indikator ini juga mengalami trend kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 138,78% menjadi 139,60% atau mengalami kenaikan sebesar 0,83%.

3.2.1.2 Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia

Pada Grafik III – 2 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk realisasi kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Takalar pada periode 2023 – 2024, diperoleh hasil sebesar 72,79 pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 0,73 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan naik sebesar 1,33 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023. Secara trend, capaian kinerja indikator ini dapat dikatakan naik namun peningkatannya kurang signifikaan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,01%. Sementara itu dari aspek capaian kinerja, pada tahun 2025 Kabupaten Takalar mencatatkan capaian kinerja sebesar 99,10% atau menurun sebesar 4,29% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Grafik III-2
Trend Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

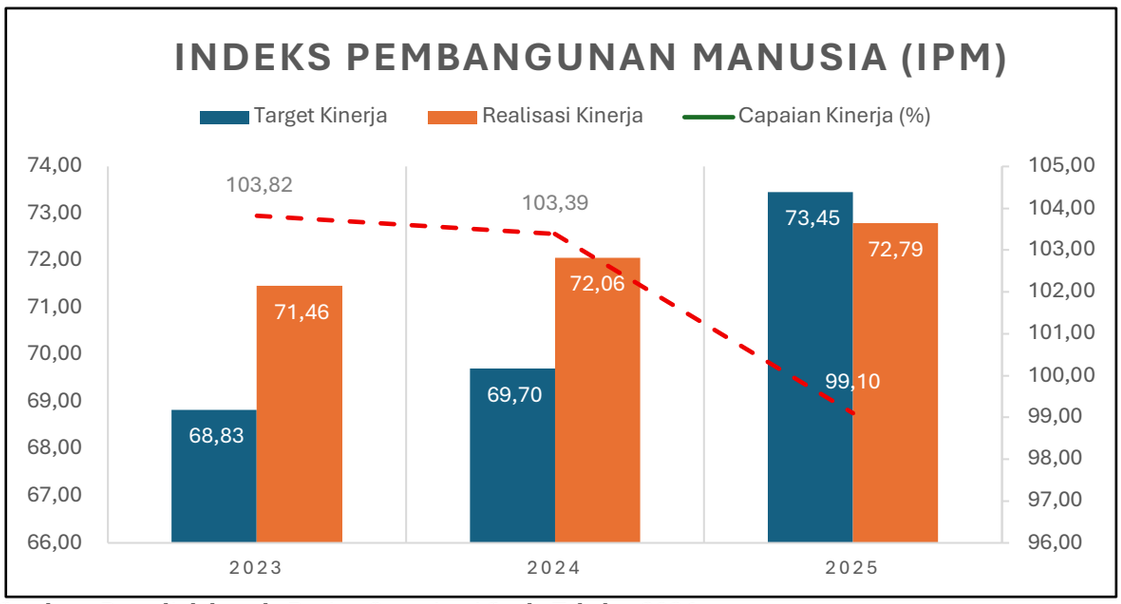

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.1.3 Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Infratstruktur

Pada Grafik III – 3 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah (IDSD). Realisasi kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama periode 2023 – 2025 mengalami peningkatan dengan nilai realisasi sebesar 3,73 pada tahun 2025 atau meningkat 0,01 poin dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah sebesar 12,78% atau mengalami peningkatan sebesar 0,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik III-3
Trend Capaian Indikator Indeks Daya Saing Infrasutruktur Daerah
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

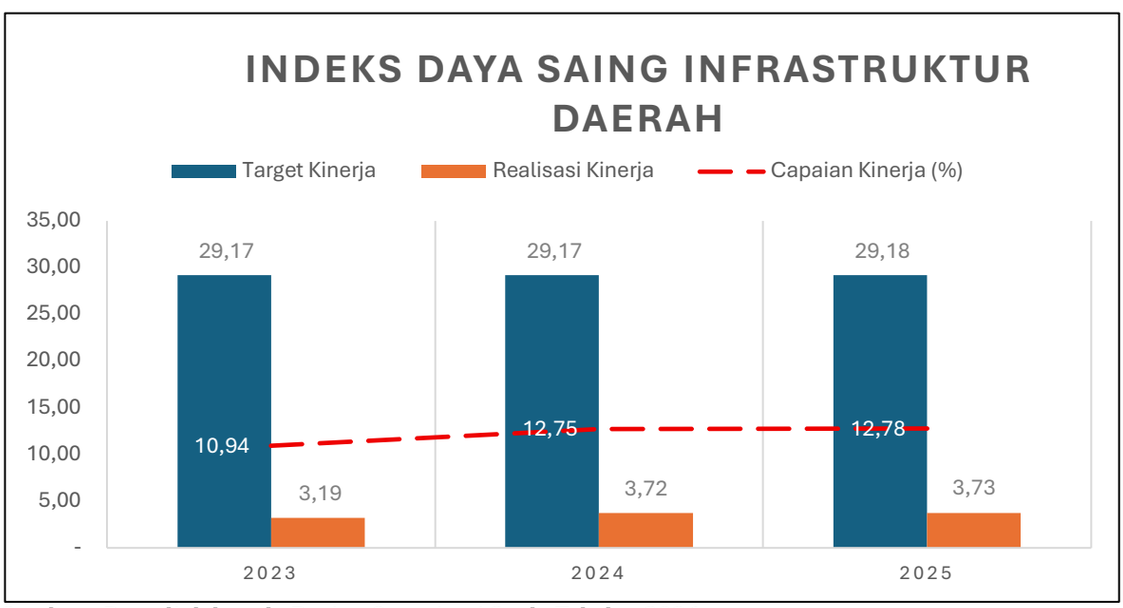

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.1.4 Tujuan 2 Mewujudkan Perekonomian Yang Inklusif dan Ramah Lingkungan

Realisasi dan capaian kinerja indikator – indikator yang berkaitan dengan tujuan 2 yaitu mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan masing masing dapat dilihat pada grafik III-4

Pada grafik III-4 dapat dilihat realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar untuk mewujudkan tujuan 2 yaitu perekenomian yang inklusif dan ramah lingkungan melalui pencapaian indikator PDRB Per Kapita. Pada tahun 2025, realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar pada indikator PDRB per kapita mencapai Rp 44,81 juta, meningkat sebesar Rp 2,45 juta per kapita jika dibandingkan dengan tahun 2025. Sementara itu untuk capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu pada posisi 87,45% atau menurun sebesar 36,88% dari tahun 2024.

Grafik III-4
Trend Capaian Indikator PDRB Per Kapita
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

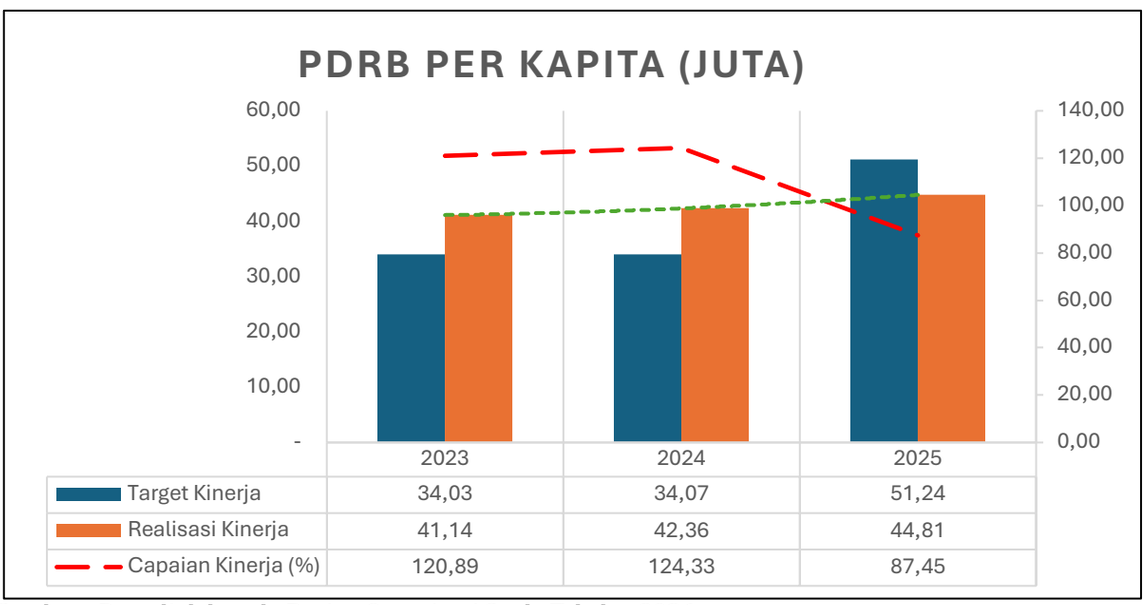

	2023	2024	2025
Target Kinerja	34,03	34,07	51,24
Realisasi Kinerja	41,14	42,36	44,81
Capaian Kinerja (%)	120,89	124,33	87,45

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Selanjutnya untuk realisasi kinerja indikator kedua yang menjadi indikator antara untuk mewujudkan tujuan 2 perekenomian yang inklusif dan ramah lingkungan yaitu indikator Indeks Gini dapat dilihat pada grafik III-5. Realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 0,34 atau mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara itu capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 110,53% atau naik sebesar 10,53% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Grafik III-5
Trend Capaian Indikator Indeks Gini
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

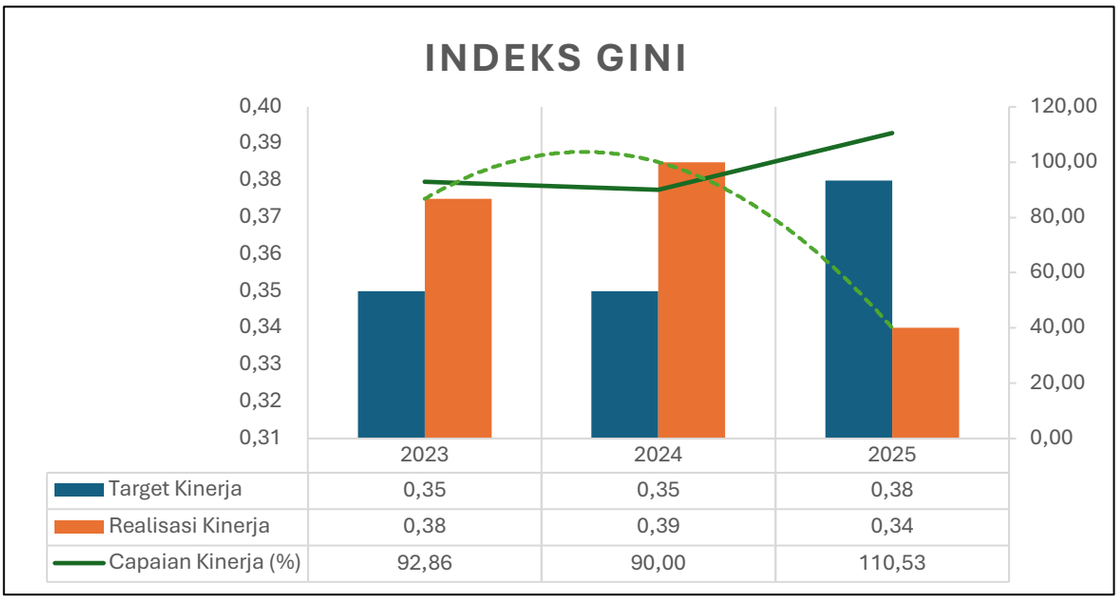

	2023	2024	2025
Target Kinerja	0,35	0,35	0,38
Realisasi Kinerja	0,38	0,39	0,34
Capaian Kinerja (%)	92,86	90,00	110,53

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.1.5 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah

Grafik III-6
Trend Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

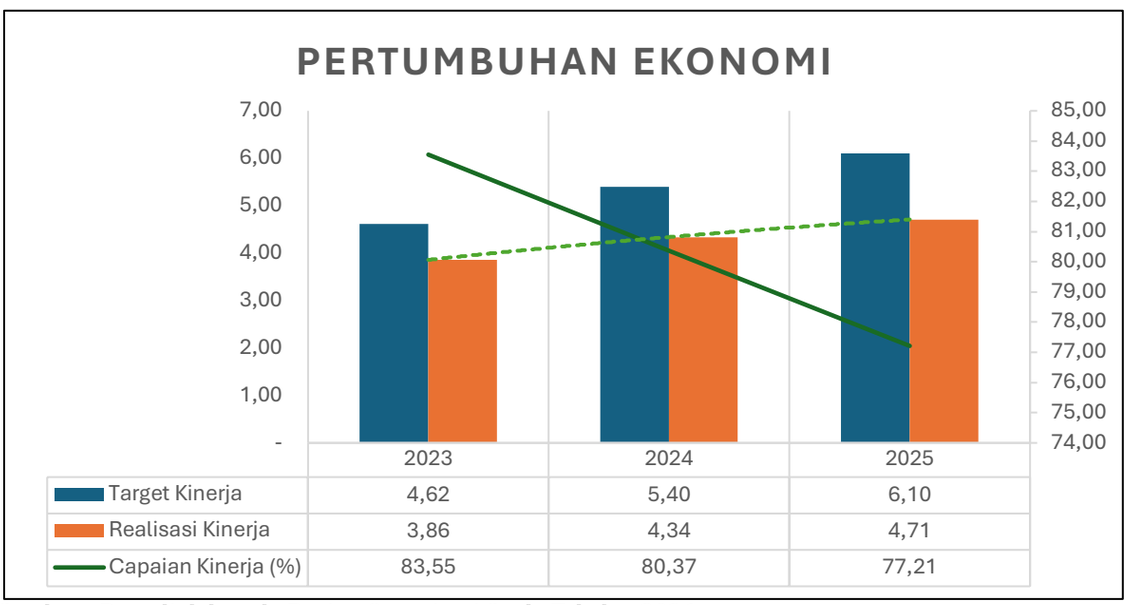

	2023	2024	2025
Target Kinerja	4,62	5,40	6,10
Realisasi Kinerja	3,86	4,34	4,71
Capaian Kinerja (%)	83,55	80,37	77,21

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 di Kabupaten Takalar adalah sebesar 4,71 %. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 4,34% dan tahun 2023 yaitu sebesar 3,86% atau rata rata mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,04% setiap tahunnya. Dari sisi capaian kinerja, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar mengalami penurunan selama periode 2023 – 2025 dengan nilai capaian

kinerja 83,55% pada tahun 2023 menjadi 80,37% pada tahun 2024 dan turun lagi menjadi 77,21% pada tahun 2025.

Grafik III-7
Trend Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

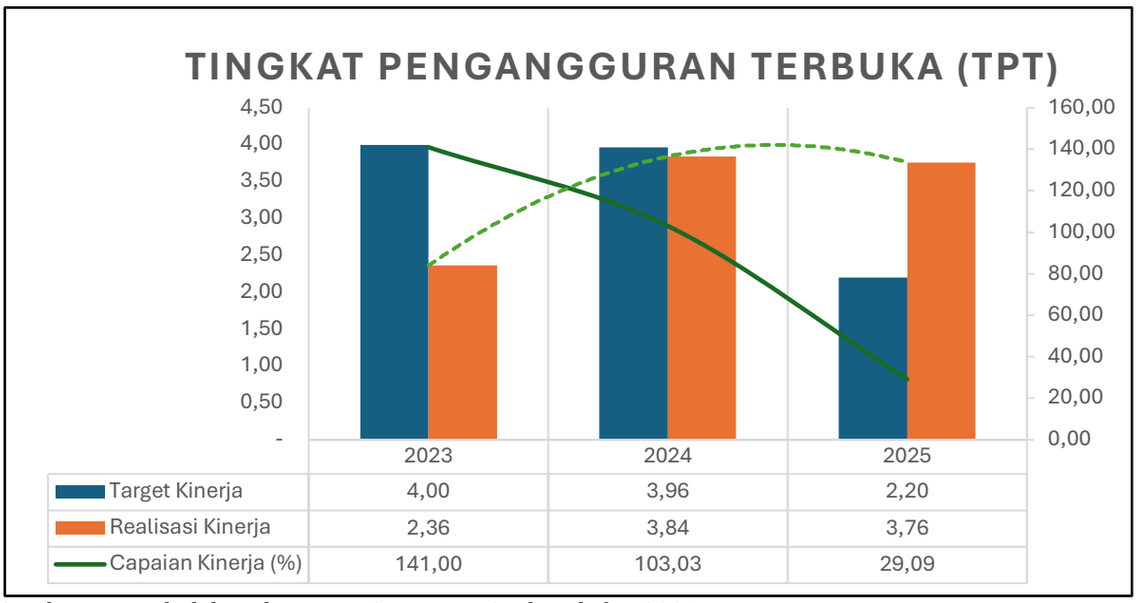

	2023	2024	2025
Target Kinerja	4,00	3,96	2,20
Realisasi Kinerja	2,36	3,84	3,76
Capaian Kinerja (%)	141,00	103,03	29,09

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Realisasi kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Takalar selama periode 2023 -2025 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023, persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,36% naik menjadi 3,84% pada tahun 2024 dan kemudian turun kembali ke posisi 3,76 pada tahun 2025. Sementara itu capaian kinerja yang dicapai selama periode 2023 – 2025 menunjukkan kecenderungan menurun dimana pada tahun 2023, besaran capaian kinerja adalah 141,00% menjadi 103,03% pada tahun 2024 dan turun menjadi 29,09% pada tahun 2025.

3.2.1.6 Tujuan 2 Sasaran 4 Berkurangnya Penduduk Miskin

Grafik III-8
Trend Capaian Indikator Angka Kemiskinan
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

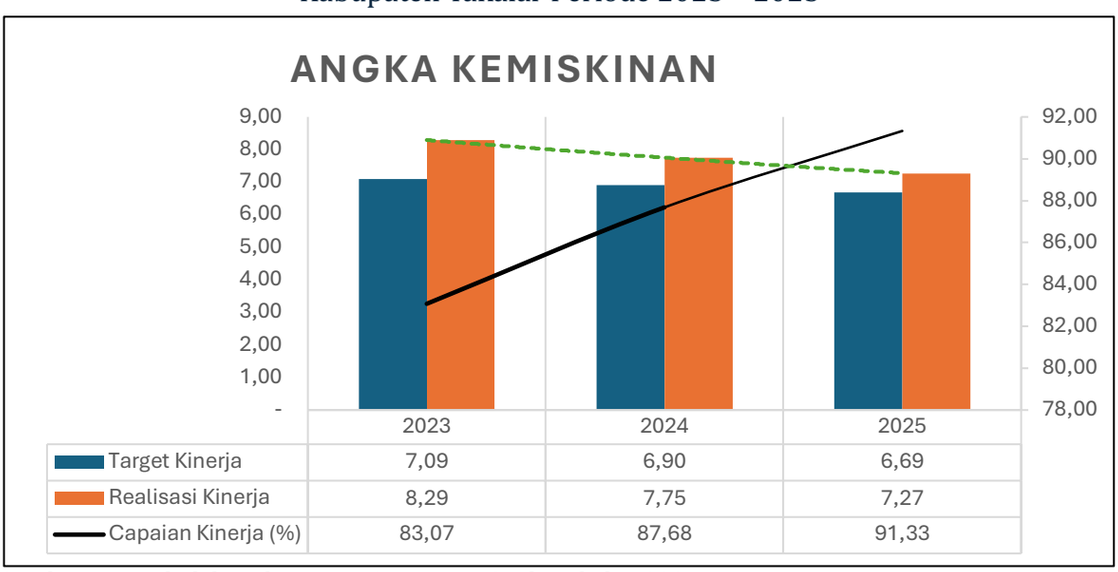

	2023	2024	2025
Target Kinerja	7,09	6,90	6,69
Realisasi Kinerja	8,29	7,75	7,27
Capaian Kinerja (%)	83,07	87,68	91,33

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Untuk indikator angka kemiskinan, realisasi kinerja yang dicapai selama periode 2023 – 2024 di Kabupaten Takalar mengalami penurunan dimana pada tahun 2023, angka penduduk miskin adalah sebesar 8,29% turun menjadi 7,75% pada tahun 2024 dan selanjutnya turun lagi menjadi 7,27% pada tahun 2025. Dari aspek capaian kinerja, pencapaian yang diperoleh Kabupaten Takalar selama periode 2023 -2025 mengalami peningkatan yang cukup baik dimana pada tahun 2023, persentase capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 83,07%, meningkat menjadi 87,68% pada tahun 2025 dan meningkat lagi menjadi 91,33% pada tahun 2025.

3.2.1.7 Tujuan 2 Sasaran 5 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Grafik III-9
Trend Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

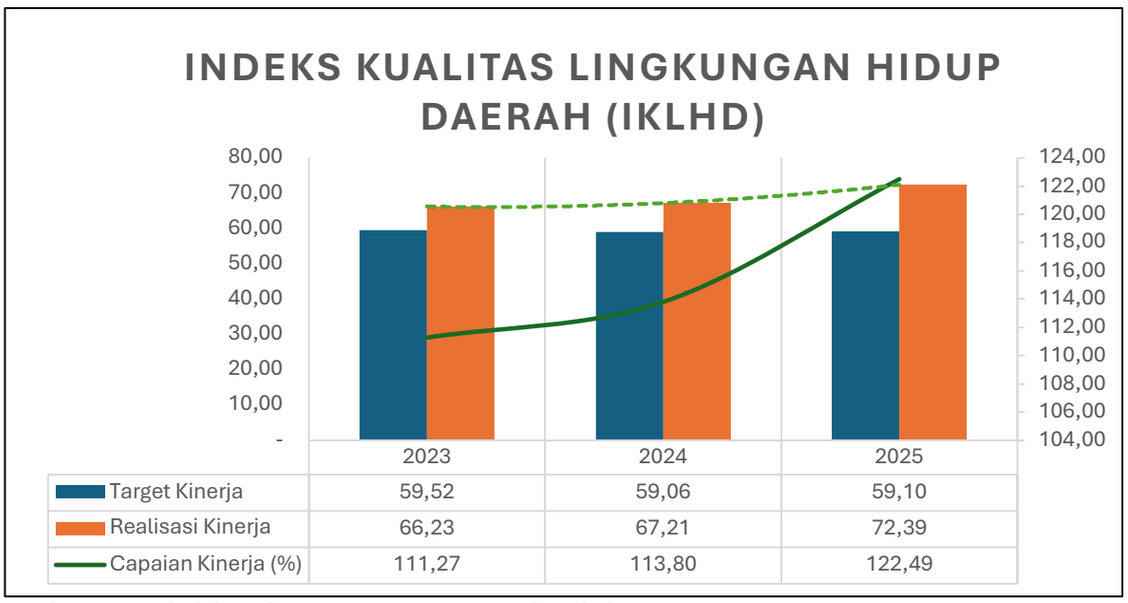

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Realisasi kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kabupaten Takalar selama periode 2023 -2025 mengalami peningkatan setiap tahun dengan nilai realisasi berada pada skor 66,23 (kategori sedang) pada tahun 2023, meningkat menjadi 67,21(kategori sedang) pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 72,39 (kategori sedang) pada tahun 2025. Capaian kinerja yang dihasilkan selama periode yang sama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan nilai capaian kinerja sebesar 111,27% pada tahun 2023 menjadi 113,80% pada tahun 2024 dan 122,49% pada tahun 2025.

3.2.1.8 Tujuan 3 Memperbaiki Kualitas tata Kelola Pemerintahan

Realisasi kinerja untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang digunakan untuk mengukur tujuan 3 yaitu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Takalar selama periode 2023 -2025 masing masing adalah pada tahun 2023 memperoleh predikat CC dengan nilai 52,33, kemudian meningkat menjadi predikat B dengan nilai 68,26 namun kemudian menurun realisasinya di tahun 2025 menjadi 60,4 namun masih termasuk dalam predikat B.

Tabel III-14
Trend Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2023	BB (71 - 72)	CC (52,33)
2024	BB (73 - 75)	B (68,26)
2025	BB (71 - 80)	B (60,4)

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.1.9 Tujuan 3 Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel III-15
Trend Capaian Indikator Nilai SAKIP Daerah
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2023	B (>60 - 70)	B (63,37)
2024	B (>60 - 70)	B (64,05)
2025	BB (71 - 80)	B (64,59)

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Realisasi kinerja indikator Nilai SAKIP Daerah yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama periode 2023 – 2024 masing masing pada tahun 2023 memperoleh predikat B dengan nilai 63,37, tahun 2024 memperoleh predikat B dengan nilai 64,05 dan tahun 2025 memperoleh predikat B dengan nilai 64,59.

Grafik III-10
Trend Capaian Indikator Indeks Kepatuhan Terhadap SPM
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

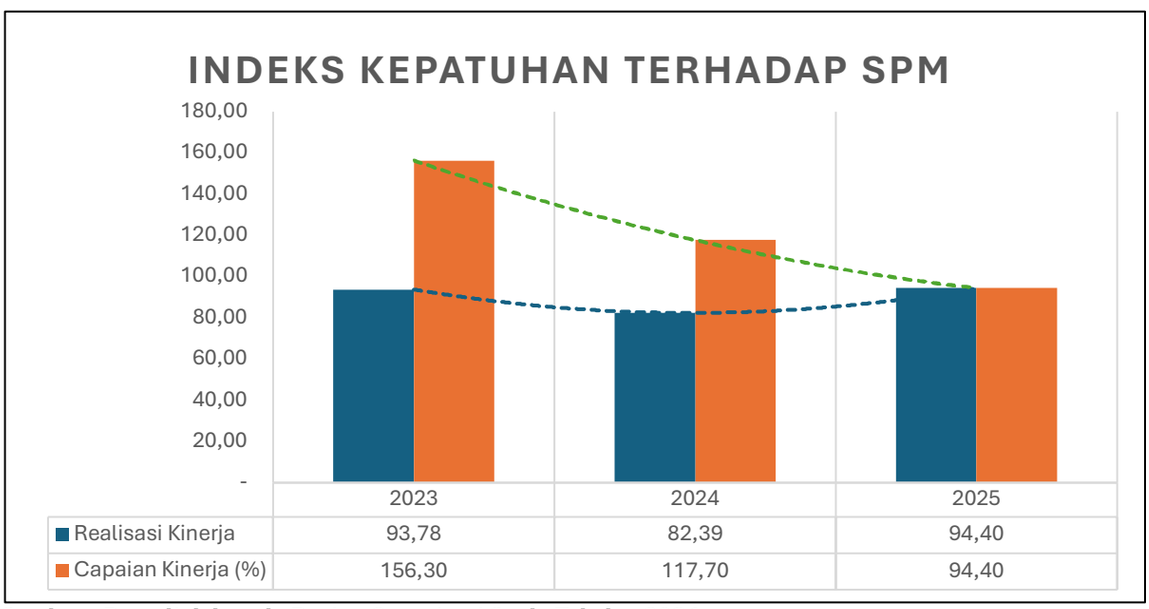

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Realisasi kinerja indikator Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Takalar selama periode 2023 – 2025 mengalami fluktuasi

dengan nilai realisasi kinerja masing masing pada tahun 2023 sebesar 93,78%, tahun 2024 menurun menjadi 82,39% dan kemudian meningkat kembali menjadi 94,40%. Sementara itu, capaian kinerja yang dihasilkan selama periode yang sama untuk indikator ini adalah masing masing 156,30% pada tahun 2023, menurun menjadi 117,70% pada tahun 2024 dan menurun lagi menjadi 94,40% pada tahun 2025.

3.2.1.10 Tujuan 3 Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel III-16
Trend Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2023	BAIK	BAIK
2024	BAIK	BAIK
2025	76,61 - 88,30	87,99

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Takalar selama periode 2023 – 2025 berada dalam kategori predikat BAIK.

3.2.1.11 Tujuan 3 Sasaran 8 : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban

Grafik III-11
Trend Capaian Indikator Angka Kriminalitas
Kabupaten Takalar Periode 2023 – 2025

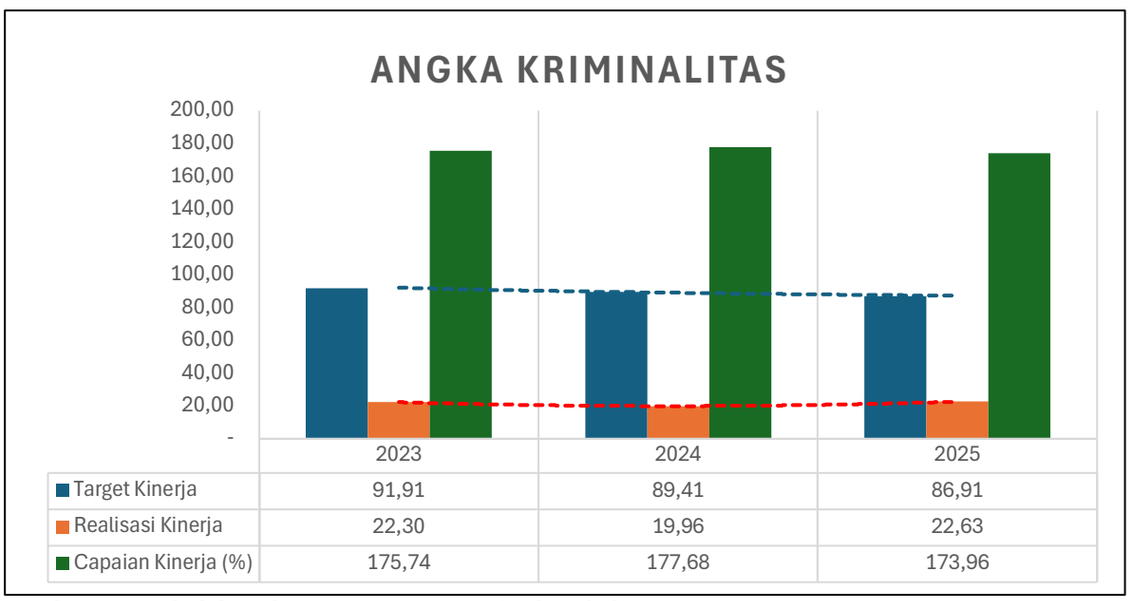

	2023	2024	2025
Target Kinerja	91,91	89,41	86,91
Realisasi Kinerja	22,30	19,96	22,63
Capaian Kinerja (%)	175,74	177,68	173,96

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Nilai realisasi indikator Angka Kriminalitas di Kabupaten Takalar selama periode 2023 – 2024 berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2023, realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 22,30 per 100.000 penduduk, tahun 2024 turun menjadi 19,95 per 100.000 penduduk dan tahun 2025 naik menjadi 22,63 per 100.000 penduduk. Sementara itu capaian kinerja yang dihasil telah memenuhi target yang ditetapkan dengan masing masing nilai capaian kinerja sebesar 175.74% pada tahun 2023, 177,68% pada tahun 2024 dan 173,96% pada tahun 2025.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Tahun Akhir Perubahan RPD 2023-2026

Setelah dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026, diperoleh hasil bahwa dari 14 (empat belas) indikator tujuan dan sasaran, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang termasuk dalam kategori Belum Memenuhi Target RPD dan 4 (empat) indikator yang termasuk dalam kategori Memenuhi Target RPD.

Kesepuluh indikator tersebut masing masing :

1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. PDRB Per Kapita (Juta)
4. Indeks Gini
5. Tingkat Pengangguran Terbuka
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
7. Nilai SAKIP Daerah
8. Indeks Kepatuhan Terhadap SPM
9. Indeks Kepuasan Masyarakat
10. Angka Kriminalitas

Sementara itu 4 (empat) indikator yang belum memenuhi target adalah masing masing :

1. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Angka kemiskinan (%)
4. Indeks Reformasi Birokrasi

Perbandingan realisasi masing masing indikator dengan RPD adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Tujuan 1 Memperkuat Daya Saing Daerah

Tabel III-17
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 1
dengan Target Kinerja Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir Perubahan RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,85	3,49	90,65	Tidak Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, realisasi indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang telah dicapai di Kabupaten Takalar sebesar 3,49 belum melampaui target realisasi yang ditetapkan dalam perubahan dokumen RPD untuk periode tahun 2026 yaitu sebesar 3,85. Capaian kinerja untuk indikator ini terhadap target RPD periode tahun 2026 di tahun 2025 sebesar 90,65%

3.2.2.2 Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 dengan target kinerja tahun terakhir dalam Perubahan RPD 2023 - 2026 termasuk dalam kategori tidak memenuhi target dengan nilai kinerja pada tahun 2025 sebesar 72,79 atau lebih rendah jika dibandingkan dengan target kinerja tahun terakhir Perubahan RPD RPD 2023 - 2026 yaitu sebesar 73,86. Persentase capaian tahun 2025 terhadap target tahun terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026 mencapai 98,55%.

Tabel III-18
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1
dengan Target Kinerja Tahun Terakhir
Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir Perubahan RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,86	72,79	98,55	Tidak Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.2.3 Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur

Persentase capaian pada tahun 2025 untuk indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 2 yaitu meningkatnya Daya Saing Infrastruktur jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPD 2023 – 2026 yaitu sebesar 3,95, termasuk dalam kategori Belum Memenuhi Target dengan nilai capaian hanya sebesar 94,43%. Realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 3,73 atau masih berada dibawah target kinerja yang tertuang dalam dokumen perubahan RPD 2023 - 2026.

Tabel III-19
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Infrastruktur
dengan Target Kinerja Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir Perubahan RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	3,95	3,73	94,43	Belum Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.2.4 Tujuan 2 Mewujudkan Perekonomian Yang Inklusif dan Ramah Lingkungan

Tabel III-20
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 2
dengan Target Kinerja Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir Perubahan RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
PDRB Per Kapita (Juta)	Juta	56,51	44,81	79,30	Tidak Memenuhi Target
Indeks Gini	Rasio	0,30	0,34	86,87	Tidak Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

Realisasi kinerja indikator PDRB Per Kapita sebagai salah satu dari 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan pada tahun 2025 mencapai angka 44,81 juta per Kapita. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun terakhir dalam perubahan RPD 2023 - 2026 yaitu sebesar 56,51 juta per kapita maka nilai tersebut berada jauh dibawah target yang ditetapkan. Persentase capaian yang diperoleh dari hasil perbandingan tersebut hanya sebesar 79,30%.

Sementara itu untuk realisasi kinerja indikator Indeks Gini tahun 2025 terhadap target tahun terakhir RPD 2023 - 2026 juga masih belum memenuhi target (0,30) dengan nilai realisasi sebesar 0,34. Persentase capaian yang diperoleh dari hasil perbandingan tersebut sebesar 86,87%.

3.2.2.5 Tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor sektor perekonomian daerah.

Realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 di Kabupaten Takalar adalah 4,71 %. Nilai ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun terakhir yaitu pada rentang 6,22 sampai 7,78 yang tertuang dalam perubahan RPD 2023 - 2026, maka dapat dikatakan masih berada dibawah target sehingga capaian kinerja untuk indikator ini termasuk dalam kategori belum memenuhi target dengan persentase capaian sebesar 75,72%.

Untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2025 adalah 3,76% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan target kinerja tahun terakhir yang tertuang dalam dokumen perubahan RPD 2023 - 2026 yaitu sebesar 2,00. Indikator TPT merupakan indikator progres negatif sehingga semakin rendah realisasi kinerja maka semakin baik hasil yang dicapai. Persentase capaian tahun 2025 terhadap target tahun terakhir perubahan RPD 2023 - 2026 adalah sebesar 12,00% atau masuk dalam kategori memenuhi target.

Tabel III-21
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3
dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir Perubahan RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.22-7.78	4,71	75,72	Belum Memenuhi Target
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,00	3,76	12,00	Belum Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.2.6 Tujuan 2 Sasaran 4 Berkurangnya Penduduk Miskin

Realisasi kinerja indikator angka kemiskinan tahun 2025 di Kabupaten Takalar mencapai angka 7,27%, jika dibandingkan dengan target tahun terakhir perubahan RPD 2023 - 2026 berada pada angka 6,60% maka realisasi tersebut masih berada dibawah target yang ditetapkan. Persentase capaian kinerja terhadap target RPD periode tahun 2026 mencapai angka 89,85% atau masih termasuk dalam kategori belum mencapai target.

Tabel III-22
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4
dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir Perubahan RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Angka Kemiskinan	Persen	6,60	7,27	89,85	Belum Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.2.7 Tujuan 2 Sasaran 5 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) pada tahun 2025 di Kabupaten Takalar adalah 72,39 atau lebih besar dari target tahun terakhir perubahan RPD 2023 - 2026 yaitu sebesar 59,14. Persentase capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 122,40%.

Tabel III-23
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5
dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	59,14	72,39	122,40	Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.2.8 Tujuan 3 Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Realisasi Kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh pada tahun 2025 di Kabupaten Takalar adalah predikat B dengan nilai sebesar 60,40 atau masih lebih rendah jika dibanding dengan target tahun terakhir perubahan RPD 2023 - 2026 yaitu predikat BB dengan nilai rentang antara 71-80. Persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara target RPD periode tahun 2026 dengan realisasi 2025 adalah 85,07%.

Tabel III-24
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan
dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat/Angka	BB (71-80)	B (60,40)	85,07	Tidak Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.2.9 Tujuan 3 Sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar memperoleh nilai SAKIP sebesar 64,59 (predikat B), sementara target yang ditetapkan di dalam Dokumen perubahan RPD 2023 - 2026 berada pada rentang angka lebih besar dari 71 - 80 sehingga realisasi kinerja yang dihasilkan belum melampaui target yag ditetapkan. Persentase capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 90,97%.

Sementara untuk indikator indeks kepatuhan terhadap SPM, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar memperoleh realisasi kinerja sebesar 94,40% dari target yang ditetapkan pada rentang 90 – 100 persen. Dengan kata lain realisasi kinerja untuk indikator ini telah tercapai dengan persentase capaian kinerja sebesar 157,33%.

Tabel III-25
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6
dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Nilai SAKIP Daerah	Predikat/Angka	B (71-80)	B (64,59)	90,97	Belum Memenuhi Target
Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	Persen	90-100	94,40	157,33	Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.2.10 Tujuan 3 Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Target realisasi kinerja tahun terakhir perubahan RPD 2023 - 2026 terhadap indikator Indeks Kepuasan Masyarakat selaku indikator yang digunakan untuk

mengukur sararan meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah predikat BAIK dengan rentang nilai 76,61 – 88,30. Realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu memperoleh predikat BAIK dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel III-26
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 7
dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat/Angka	BAIK	BAIK	100	Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.2.11 Tujuan 3 Sasaran 8 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban

Target tahun terakhir yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran terpeliharanya ketentraman dan ketertiban melalui indikator angka kriminalitas dalam dokumen perubahan RPD 2023 - 2026 adalah 84,41 per 100.000 penduduk sementara realisasi yang dicapai pada tahun 2025 berada dibawah nilai tersebut yaitu sebesar 22,63 per 100.000 penduduk. Nilai realisasi ini adalah nilai progres negatif sehingga pencapaian nilai yang lebih kecil dari target dinyatakan berhasil atau dengan kata lain memenuhi target sebesar 173.19%.

Tabel III-27
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 8
dengan Target Tahun Terakhir Perubahan RPD 2023 - 2026

Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun Akhir RPD 2023-2026	Realisasi 2025	% Capaian Terhadap Target RPD 2026	Kategori Capaian
Angka Kriminalitas	Angka/100.000 Penduduk	84,41	22,63	173,19	Memenuhi Target

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi Sulsel dan Nasional

Indikator Indeks Pembangunan Manusia, PDrB per Kapita, Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Nilai Sakip Daerah merupakan indikator indikator yang juga merupakan indikator yang digunakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengukur kinerjanya dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Sementara untuk tingkat nasional, indikator yang sama dan digunakan di Kabupaten Takalar adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka Kemiskinan.

Adapun perbadingan target dan realisasi kinerja masing masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-28
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Provinsi dan Nasioanal
Tahun 2025

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Perbandingan Realisasi				
		Realisasi Tahun 2025	Provinsi Sulsel		Nasional	
			Target RPD 2024-2026	Realisasi 2025	Target RPJMN 2025 - 2029	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,49	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,79	74,02	75,18	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	3,73	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
PDRB Per Kapita (Juta)	Juta	44,81	70,70	73,57	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
Indeks Gini	Rasio	0,34	0,361	0,363	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,71	5,23 - 6,71	5,02	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,76	4,24	4,19	4,50–5,00	4,74
Angka kemiskinan (%)	Persen	7,27	8,31	7,77	7,0–8,0	8,25
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	72,39	73,57	75,69	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat /Angka	60,4 (B)	67,31 (B)	81,74	71,38	Tidak Ada Data
Nilai Sakip Daerah	Predikat /Angka	64,59 (B)	68,52 (B)	69,02 (B)	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	Persen	94,40	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Perbandingan Realisasi				
		Realisasi Tahun 2025	Provinsi Sulsel		Nasional	
			Target RPD 2024-2026	Realisasi 2025	Target RPJMN 2025 - 2029	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat /Angka	BAIK	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029
Angka Kriminalitas	Angka	22,63	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator Dalam RPD Provinsi Sulsel	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029	Bukan Indikator RPJMN 2025 - 2029

Sumber : Data diolah pada Bagian Organisasi Setda Takalar, 2026

3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan

Untuk memahami capaian yang telah diraih, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta hambatan yang menyebabkan kegagalan.

3.3.1 Tujuan 1 Memperkuat Daya Saing Daerah

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah merupakan sebuah instrumen pengukuran yang dipergunakan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengukur daya saing daerah dengan memberikan gambaran produktivitas dan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. IDSD mengadopsi kerangka Global *Competitiveness Index* (GCI) 2019, mencakup 4 komponen utama dan 12 pilar untuk memotret produktivitas daerah.

Berdasarkan data BRIN dalam Buku Indeks Daya Saing Daerah 2025, pada tahun 2025 Kabupaten Takalar memperoleh nilai indeks IDSD sebesar 3,49 dari target 2,50 dalam Perjanjian Kinerja dengan tingkat capaian sebesar 139,60. Nilai realisasi kinerja ini juga telah melampui target kinerja tahun yang sama yang tercantum dalam dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Takalar 2023 – 2026 yaitu sebesar 2,51. Dari 4 komponen dan 12 pilar yang menjadi dasar penilaian IDSD 2025, terdapat 10 pilar yang mengalami peningkatan, 1 pilar dengan nilai tetap dan 1 pilar yang mengalami penurunan. Adapun detail masing masing komponen dan pilar tersebut adalah masing masing sebagai berikut :

Tabel III-29
Perbandingan Capaian Nilai IDSD Berdasarkan
Komponen dan Pilar Tahun 2024 – 2025

No	Komponen/Pilar	Capaian		Selisih	Kondisi
		2024	2025		
I	Aspek Lingkungan Pendukung				

No	Komponen/Pilar	Capaian		Selisih	Kondisi
		2024	2025		
1	Institusi	4,27	4,66	0,39	Naik
2	Infrastruktur	3,72	3,73	0,01	Naik
3	Adopsi TIK	4,53	4,63	0,1	Naik
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,27	3,39	0,12	Naik
II	Aspek Sumber Daya Manusia				
5	Kesehatan	3,58	3,59	0,01	Naik
6	Keterampilan	3,87	4,04	0,17	Naik
III	Aspek Pasar				
7	Pasar Pokok	2,72	2,75	0,03	Naik
8	Pasar Tenaga Kerja	2,85	2,85	0	Tetap
9	Sistem Keuangan	2,34	2,56	0,22	Naik
10	Ukuran Pasar	3,98	4,00	0,02	Naik
IV	Aspek Ekosistem Inovasi				
11	Dinamisme Bisnis	3,9	3,5	-0,4	Turun
12	Kapabilitas Inovasi	1,83	2,21	0,38	Naik
Nilai		**3,41**	**3,49**	**0,087**	**Naik**

Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 dan 2025

Faktor faktor kunci peningkatan daya saing Kabupaten Takalar dapat dipetakan menjadi beberapa aspek yaitu :

Tabel III-30
Faktor Kunci Realisasi Indikator Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Faktor Kunci	Analisis Faktor Kunci
1	Transformasi Digital dan Ekonomi Digital	a. Visi dan Komitmen Politik yang Kuat Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM dan Wakil Bupati Hengky Yasin (periode 2025-2030) menetapkan visi besar "**Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital**". Visi ini menjadi kompas strategis dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah. b. Dilaksanakannya Program Unggulan Digitalisasi berupa : 1). Pojok Internet Desa (Poindes) • Program ini mencakup penyediaan infrastruktur internet hingga pelatihan bagi warga desa dan

No	Faktor Kunci	Analisis Faktor Kunci
		bahkan menjangkau wilayah kepulauan Tanakeke. • Implementasi Pojok Internet Desa di 50 desa sebagai infrastruktur digital dasar. • Target 50% desa di Takalar menerapkan digitalisasi pada 2025 2). Digitalisasi Pemerintahan Desa • Canangkan website di seluruh desa untuk memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Penyelenggaraan Bimtek OpenSID dan penandatanganan kerja sama ekosistem satu data bersama Telkomsel dan OpenDesa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik digital 3). Digitalisasi UMKM dan IKM • Sebanyak 3.149 Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Takalar disiapkan menembus pasar digital. • Program pendampingan digitalisasi UMKM perikanan berbasis website, seperti di Desa Puntondo yang difasilitasi oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. • Integrasi UMKM ke platform e-commerce untuk memperluas akses pasar Program-program ini secara langsung meningkatkan skor pada Pilar 3 (Adopsi TIK) dan Pilar 11 (Dinamika Bisnis), yang merupakan komponen penting dalam IDSD 2025.
2	Kawasan Industri Takalar sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)	a. Memberikan implikasi strategis berupa : 1. Percepatan perizinan dan kemudahan investasi 2. Alokasi anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat untuk jalan, air, listrik, dan logistik. 3. Fasilitasi investasi melalui BKPM untuk menarik investor domestik dan asing 4. Posisi Takalar sebagai pintu gerbang industri baru Sulawesi Selatan di wilayah pesisir b. Memberikan dampak terhadap ekonomi berupa : 1. Penciptaan lapangan kerja baru yang signifikan

No	Faktor Kunci	Analisis Faktor Kunci
		2. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari sektor industri Hal hal tersbut diatas memberikan Penguatan Pilar 2 (Infrastruktur) dan Pilar 10 (Ukuran Pasar) dalam IDSD
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Takalar mencatat lonjakan signifikan dalam IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) tahun 2025 dengan nilai 26,38, menempati peringkat 4 di Sulawesi Selatan dan peringkat 33 secara nasional. Capaian ini merupakan lonjakan signifikan dari posisi sebelumnya di peringkat 20 tingkat provinsi.
4	Tata kelola pemerintahan yang baik	Kepemimpinan Daeng Manye yang menekankan pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil melalui inisiatif strategis berupa : a. Digitalisasi pelayanan publik untuk mengurangi birokrasi b. Penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan c. Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan d. Kemitraan strategis dengan pemerintah pusat, provinsi, dan stakeholder lainnya.
5	Penurunan ketimpangan pendapatan	Tingkat ketimpangan di Takalar menunjukkan perbaikan signifikan dengan penurunan Gini Ratio dari 0,385 menjadi 0,34 pada 2025. Hal ini dapat dicapai memalui upaya : a. Bantuan sosial tepat sasaran untuk keluarga rentan b. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa c. Akses kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM Penurunan ketimpangan mencerminkan pertumbuhan inklusif yang memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi, berkontribusi pada Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro).

Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah di Kabupaten Takalar tahun 2025 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk Indeks Pembangunan Manusia, realisasi tahun 2025 belum mampu memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 73,45 (capaian kineja 99,10%) namun telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPD pada periode akhir pelaksanaan RPD yaitu tahun 2026 sebesar 70,54.

Gambar III-1
Upaya Pencapaian Realisasi Indikator Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2025



3.3.1.2 Tujuan 1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi dasar; umur panjang/sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi). Dimensi Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat), diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir (mencerminkan jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir), dimensi Pengetahuan (Pendidikan), diukur melalui dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Dimensi Standar Hidup Layak (Ekonomi): Diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (disesuaikan dengan Purchasing Power Parity), yang mencerminkan kemampuan ekonomi penduduk. Walaupun realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan target dalam dokumen perjanjian kinerja, namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mencapai realisasi kinerja yang ada saat ini. Tabel berikut merangkum seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama periode tahun 2025

Tabel III-31
Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar
dalam rangka meningkatkan realisasi kinerja Indikator Pembangunan Manusia
Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Upaya
1	Meningkatnya Kualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Dimensi Kesehatan a. Pemerataan dan Penguatan Layanan Kesehatan Primer

No	Sasaran	Indikator	Upaya
	Hidup Manusia		1. Revitalisasi dan pembangunan Puskesmas serta Posyandu, termasuk di wilayah pulau untuk memastikan akses kesehatan merata. 2. Implementasi Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) yang mendekatkan layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif ke masyarakat. 3. Pemanfaatan inovasi digital seperti e-RME (Rekam Medis Elektronik) dan layanan telemedicine untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan kesehatan b. Program Penurunan Stunting dan Gizi Berbasis Konvergensi 1. Pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara konvergen lintas sektor melibatkan dinas kesehatan, PKK, dan pemangku kepentingan lainnya 2. Intervensi gizi berbasis pangan lokal seperti pemanfaatan jagung sebagai sumber gizi alternatif untuk menekan angka stunting 3. Target penurunan stunting hingga 20-24% pada 2025 menjadi fokus strategis yang berdampak pada kesehatan anak jangka panjang. c. Akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) yang Inklusif 1. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 98 persen, sehingga hampir seluruh masyarakat terlindungi akses layanan kesehatan 2. Program BPJS non-mandiri yang dibiayai pemerintah daerah memastikan warga kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. 3. Kemudahan administrasi melalui aplikasi JKN Mobile dan layanan antrian online meningkatkan utilisasi layanan kesehatan. d. Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Pelatihan, pemberian insentif, dan pemerataan penempatan tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat)

No	Sasaran	Indikator	Upaya
			di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. 2. Sinergi dengan Balai Labkesmas Makassar untuk memperkuat kapasitas laboratorium dan layanan diagnostik di tingkat puskesmas. e. Pendekatan Determinan Sosial Kesehatan 1. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pengeluaran riil per kapita (dari Rp11,67 juta menjadi Rp12,01 juta) berkontribusi pada perbaikan status gizi dan akses layanan kesehatan 2. Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui pembinaan tatanan di tingkat puskesmas f. Tata Kelola dan Kepemimpinan yang Berorientasi Hasil. 1. Komitmen kepemimpinan daerah (duet FDM–HHY) yang menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, tercermin dari alokasi anggaran dan koordinasi lintas OPD. 2. Monitoring berbasis data melalui Satu Data Takalar memungkinkan evaluasi real-time dan penyesuaian program kesehatan. Dimensi Pendidikan a. Program Sekolah Rakyat Gratis Pemerintah Kabupaten Takalar menghadirkan Sekolah Rakyat (SMP dan SMA) yang dirancang khusus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan gratis. b. Transformasi Digital Pendidikan Penerapan platform skul.id yaitu platform digital terintegrasi dari Telkomsel untuk mendigitalisasi manajemen sekolah, absensi, dan kegiatan belajar-mengajar bagi siswa, guru, dan orang tua. Aplikasi ini mempermudah administrasi seperti e-rapor, presensi berbasis lokasi/wajah, pembayaran SPP, dan kelas virtual secara daring. c. Revitalisasi Kepemimpinan Sekolah Bupati Takalar melantik 138 Kepala Sekolah (19 Kepala SMP dan 119 Kepala SD) serta 6 pejabat fungsional dengan tujuan dapat memberikan dampak

No	Sasaran	Indikator	Upaya
			meningkatnya peringkat pendidikan Takalar dari ranking 23 menjadi ranking 15 di Sulawesi Selatan d. Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidik e. Peningkatan Akses dan Infrastruktur Pendidikan f. Komitmen Pimpinan Daerah 1. Mendorong digitalisasi total di sektor pendidikan 2. Transformasi birokrasi pendidikan yang lebih efisien dan akuntabel Dimensi Standar Hidup Layak a. Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti Combine Harvester, Traktor 4 Roda, dan Traktor 2 Roda b. Distribusi pupuk bersubsidi sebanyak 29 ribu ton untuk meningkatkan produktivitas lahan c. Bantuan bibit tanaman, pupuk, dan alat semprot (hard sprayer) untuk puluhan kelompok tani melalui program P2B d. Peresmian dan revitalisasi pasar tradisional sebagai pusat distribusi ekonomi lokal e. Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan

Gambar III-2
Bukti Dukung Kegiatan Upaya Peningkatan Realisasi Indikator
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Takalar Tahun 2025





1	Tata Kelola dan Kepemimpinan yang Berorientasi Hasil. Komitmen kepemimpinan daerah (duet FDM–HHY) yang menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan.



2	Pj. Bupati Takalar Launching Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) pada 17 Puskesmas di Kab. Takalar









3	Intervensi gizi berbasis pangan lokal



4	Pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara konvergen lintas sektor melibatkan dinas kesehatan, PKK, dan pemangku kepentingan lainnya



5	Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui pembinaan tatanan di tingkat



6	Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 98 persen pada Tahun 2025 sehingga memperoleh Penghargaan **UHC AWARDS 2026**

3.3.1.3 Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah

Untuk mengukur sasaran Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah, digunakan indikator Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, dimana pada tahun 2025 realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 3,73 (capaian kinerja 12,78%) masih berada jauh dibawah target baik target dalam perjajian Kinerja sebesar 29,18 dan target dalam RPD pada periode akhir pelaksanaan RPD yaitu tahun 2026 yaitu sebesar 29,17%. Terlalu tingginya penetapan target Indeks Daya Saing Daerah baik dalam dokumen RPD 2023 – 2026 maupun dalam Perjanjian Kinerja merupakan penyebab pokok terjadinya kegagalan dalam pencapaian realisasi kinerja untuk sasaran ini.

Berdasarkan data yang dirilis dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025, 5 daerah yang meraih nilai tertinggi untuk Pilar Infrastruktur adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 4,74, disusul oleh Jawa Timur Jawa Tengah dan Sumatera Utara masing masing sebesar 4,54 dan Jawa Barat dengan nilai 4,48, Berdasarkan nilai yang diperoleh tersebut maka nilai Indeks Daya Saing Daerah yang diperoleh Kabupaten Takalar tahun 2025 sebesar 3,73 merupakan capaian di atas rata-rata beberapa kabupaten/kota di Indonesia dan berkontribusi terhadap peningkatan IDSD Sulawesi Selatan secara keseluruhan yang mencapai 3,85 (peringkat 7 nasional). Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur daerah Kabupaten Takalar berada dalam kondisi operasional memadai namun masih membutuhkan peningkatan signifikan untuk mencapai tahap "Tinggi" atau "Sangat Kompetitif".

3.3.2 Tujuan 2 Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan

Jumlah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan 2 “Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan” adalah sebanyak 6 (enam) indikator yaitu PDRB per Kapita dan Indeks Gini sebagai indikator tujuan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) sebagai indikator sasaran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar dalam buku Takalar dalam angka 2026, nilai realisasi PDRB per Kapita Kabupaten Takalar sebesar 44,81 juta atau tidak mencapai target pada Perjanjian Kinerja sebesar 51,24 juta. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan disebabkan oleh bebarapa faktor baik itu faktor eksternal maupun makroekonomi.

Tabel III-32
Faktor Kegagalan Reaiisasi Kinerja Indikator PDRB Per Kapita
Kabupaten Takalar 2025

No	Tujuan	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
1	Memperkuat Daya Saing Daerah	PDRB Per Kapita	1. Sektor industri pengolahan (sekunder) belum menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi 2. Investasi swasta yang rendah membatasi	1. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pemungutan pajak dan perluasan basis wajib pajak 2. Percepatan implementasi PSN Kawasan Industri untuk menarik investasi segera

No	Tujuan	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
			penciptaan lapangan kerja berkualitas 3. UMKM sulit berkembang menjadi penggerak ekonomi skala menengah 4. Pendapatan Takalar masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat (DAU, DAK, DBH)	3. Fokus pada hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah lokal 4. Diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata bahari dan industri pengolahan 5. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri 6. Perluasan infrastruktur digital ke 100% desa untuk mendukung ekonomi digital

Realisasi Indikator Indeks Gini Kabupaten Takalar turun dari 0,385 menjadi 0,34 pada tahun 2025. Adapun faktor keberhasilan yang menyebabkan turunnya indeks gini adalah sebegai berikut :

Tabel III-33
Faktor Keberhasilan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Gini
Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator	Faktor Keberhasilan
1	Memperkuat Daya Saing Daerah	Indeks Gini	1. Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani. Produksi padi meningkat 18,52%, dari 115,61 ribu ton menjadi 137,01 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). 2. Bedah Rumah Tidak Layak Huni melalui BSPS untuk meningkatkan aset rumah tangga miskin 3. Inflasi daerah terkendali, menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan tetap. 4. Kepemimpinan Bupati Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM menekankan pendekatan pembangunan yang inklusif.

Gambar III-3
Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan
Realisasi Kinerja Indikator Indeks Gini
Kabupaten Takalar Tahun 2025



Pupuk Bersubsidi

1

Benih Padi Andalan

2





3 **Kegiatan Bedah Rumah di 9 Kecamatan**

3.3.2.2 Tujuan 2 Sasaran 3 : Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah

Sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data yang ada, kedua indikator ini telah melampui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Adapun faktor faktor yang menjadi keberhasilan pencapaian kinerja dari masing masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-34
Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
1	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi 50-60% terhadap PDRB Takalar mengalami pertumbuhan signifikan. 2. Digalakkannya Ekonomi Digital sebagai Katalis Pertumbuhan. 3. Tim Pengendali Inflasi Daerah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. 4. Adanya Komitmen Politik untuk Pertumbuhan dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah pusat, provinsi, dan stakeholder
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Pemberdayaan UMKM yang memiliki elastisitas tinggi dalam penyerapan tenaga kerja melalui Digitalisasi 3.149 IKM. 2. Pelatihan Konten Kreator 3. Pelatihan Pemasaran UMKM via Google & AI 4. Pelaksanaan Magang ke Jepang (110 Pemuda) 5. Pemerintah Kabupaten Takalar menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Gambar III-4
Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan
Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Takalar Tahun 2025





1 PEMBAGIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN





2 MENGGALAKKAN EKONOMI DIGITAL

Gambar III-5
Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan
Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Takalar Tahun 2025



1

Kerjasama dengan Kaizen collaborative impact, mitra Kerjasama Google.Org dan ASEAN Foundation





2

Rekruitmen Magang Ke Jepang

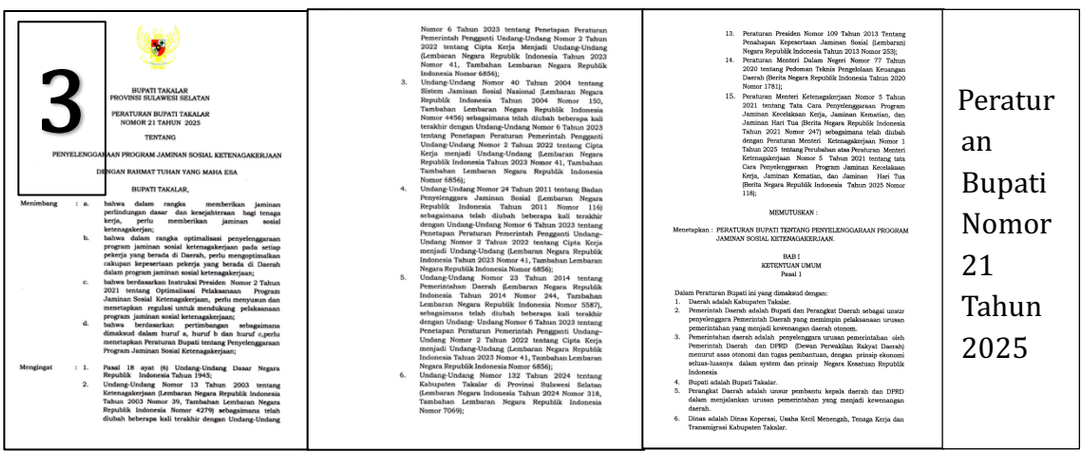

3

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, perlu memberikan jaminan sosial ketenagakerjan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah, perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

14. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025

3.3.2.3 Tujuan 2 Sasaran 4 Berkurangnya Penduduk Miskin

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Angka Kemiskinan. Angka kemiskinan pada tahun 2025 di Kabupaten Takalar sebesar 7,27% atau turun 0,48% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,75%. Perbandingan *Year To Year* menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dan Kabupaten Takalar dapat dikatakan berhasil menurunkan angka kemiskinan namun berdasarkan capaian kinerja, Kabupaten Takalar pada tahun 2025 gagal memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023 – 2026 sebesar 6,60% maupun dalam Perjanjian Kinerja sebesar 6,69%.

Faktor faktor yang menjadi faktor kunci kegagalan Kabupaten Takalar dalam capaian kinerja penurunan angka kemiskinan adalah sebagai berikut :

Tabel III-35
Faktor Kegagalan Realisasi Indikator Angka Kemiskinan
Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
1	Berkurangnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	1. Basis pajak daerah yang sempit dan bergantung pada sektor tradisional 2. Ketergantungan tinggi pada transfer pusat (DAU, DAK) yang fluktuatif 3. Kesenjangan Perencanaan dan Realitas Lapangan, dimana realitas menunjukkan penurunan rata-rata hanya 0,24 poin/tahun (2022-2025) 4. Masalah Validitas Data Kemiskinan. Koordinasi dengan Kemensos RI untuk program DTEN 2025 menunjukkan upaya perbaikan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan teknis.	Jangka Pendek : 1. Revisi target berbasis evidance. Dalam RPJMD Kabupaten Takalar, target angka kemiskinan tahun 2025 telah disesuakan pada rentang 7,62 – 5,16 2. Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan basis data daerah untuk targeting yang lebih akurat. 3. Optimalisasi alokasi anggaran dengan memprioritaskan program dengan dampak langsung pada pengurangan kemiskinan (bantuan produktif, pelatihan keterampilan) Jangka Menengah : 1. Diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan upaya hilirisasi produk pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
			5. Program penanggulangan kemiskinan memerlukan koordinasi lintas OPD (Dinsos, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian), namun sinergi operasional masih menghadapi kendala berupa Perbedaan prioritas program antar instansi dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang belum terintegrasi.	pendapatan masyarakat. 2. Memperkuat kapasitas aparatur misalnya melalui pelatihan teknis pendampingan kemiskinan untuk perangkat desa dan tenaga lapangan. 3. Kolaborasi dengan swasta, CSO, dan akademisi untuk memperluas cakupan dan inovasi program

3.3.2.4 Tujuan 2 Sasaran 5 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah pada tujuan 2 Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan

Sasaran ini diukur menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Realisasi kinerja yang dicapai tahun 2025 sebesar 72,39 berada diatas target yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023 – 2026 dan Perjanjian Kinerja 2025 yaitu masing masing sebesar 59,10.

Tabel III-36
Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Kabupaten Takalar 2025

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
1	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	1. Lebih dari 50% wilayah Kabupaten Takalar berupa lahan pertanian yang secara tidak langsung memberikan dampak baik terhadap kualitas udara. 2. Belum adanya indutri industri berat sehingga sumber penyumbang polusi udara masih sangat terbatas. 3. Terlaksananya program penghijauan baik yang dilaksanakan oleh Pemda maupun oleh instansi lainnya. 4. Pengendalian sampah plastik termasuk pengurangan emisi dari pembakaran sampah.

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
			5. Pengeolaan hutan magrove dan ekonomi biru yang dikerjasamakan dengan NGO luar negeri. 6. Pengadaan sarana kebersihan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. 7. Peningkatan standar pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dengan pendampingan Kementerian LHK.

Gambar III-6
Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan
Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Kabupaten Takalar Tahun 2025



3.3.3 Tujuan 3 Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan

Tujuan 3 **Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan** diukur dengan 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan 4 (empat) indikator sasaran.

Berdasarkan data hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada portal Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kabupaten Takalar memperoleh indeks Reformasi Birokrasi (RB) predikat B dengan nilai realisasi sebesar 60,40 atau tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu predikat BB dengan nilai realisasi sebesar 71 – 80. Adapun faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel III-37
Faktor Kegagalan Realisasi Kinerja
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Takalar 2025

No	Tujuan	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
1	Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terutama terkait pemenuhan kebutuhan data yang harus disediakan pada Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB. 2. Belum tersusunnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik yang selaras dengan tema yang ditetapkan secara nasional dan berfokus pada permasalahan utama tematik. 3. Perumusan indikator yang belum memenuhi kriteria SMART	1. Mengupayakan komitmen pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah) secara konsisten mendorong dan memantau implementasi reformasi birokrasi. 2. Ketersediaan anggaran reformasi birokrasi memadai dan tepat sasaran. 3. Pelatihan intensif untuk tim reformasi birokrasi. 4. Membangun kemitraan dengan KemenPANRB, Pemprov, dan pihak terkait untuk pendampingan.

No	Tujuan	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya
			4. Instansi belum melakukan penyusunan Arsitektur SPBE sesuai standar. 5. Masih belum maksimalnya pengelolaan dan managemen data statistik.	

3.3.3.2 Tujuan 3 Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Republik Indonesia melalui aplikasi E-Sakip Reviu dan Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal.

Realisasi kinerja indikator Nilai SAKIP Daerah yang dicapai Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2025 adalah Predikat B dengan nilai kinerja sebesar 64,59. Walaupun terjadi peningkatan nilai realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai kinerja tahun 2025 tetap tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu predikat BB dengan nilai kinerja sebesar 71 – 80. Faktor faktor yang menyebabkan kegagalan memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III-38
Faktor Kegagalan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Nilai SAKIP Daerah
Kabupaten Takalar 2025

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya Perbaikan
1	Meningkatn Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah	1. Sasaran strategis belum berorientasi hasil dan belum menggambarkan level kinerja Kepala Dinas 2. Indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART dan belum cukup jelas. 3. Penjenjangan (cascading) kinerja belum mempertimbangkan logical framework dan	1. Melakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan 2. Reviu indikator kinerja untuk memastikan kriteria SMART 3. Menjamin cascading kinerja mengacu pada Permenpan RB No. 89/2021 dengan logical framework dan CSF 4. Reviu dokumen IKU untuk kelengkapan definisi operasional, formula, dan sumber data 5. Menyusun laporan kinerja komprehensif sesuai Permenpan RB No. 53/2014

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya Perbaikan
			Critical Success Factor (CSF). 4. Dokumen IKU belum dilengkapi formulasi perhitungan, definisi operasional, sumber data, dan penanggung jawab. 5. Laporan kinerja belum menyajikan Analisis mendalam penyebab capaian/kegagalan indikator, Informasi deskriptif program/kegiatan dan Analisis upaya perbaikan ke depan. 6. Informasi laporan belum digunakan untuk perbaikan perencanaan (masih ada target lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa penjelasan memadai). 7. Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan catatan dan rekomendasi yang menyasar akar permasalahan 8. Rekomendasi evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti	6. Meningkatkan pemahaman penyusunan laporan di seluruh Perangkat Daerah 7. Optimalkan pemanfaatan laporan untuk penetapan target yang lebih baik dan realistis 8. Inspektorat sebagai quality assurance harus memberikan rekomendasi yang mendalam dan solutif 9. Monitoring berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi evaluasi 10. Memastikan perbaikan akuntabilitas kinerja berjalan berkelanjutan

No	Sasaran	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya Perbaikan
			oleh Perangkat Daerah 9. Belum ada pemantauan tindak lanjut rekomendasi.	

Realisasi kinerja indikator Indeks Kepatuhan Terhadap SPM yang dicapai Kabupaten Takalar tahun 2025 sebesar 94.40% atau melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 80 – 90%.

Tabel III-39
Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Takalar 2025

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
	Meningkatn Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran 2. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan 3. Pelaksanaan dan Peningkatan Mutu Layanan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Gambar III-7
Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Takalar Tahun 2025





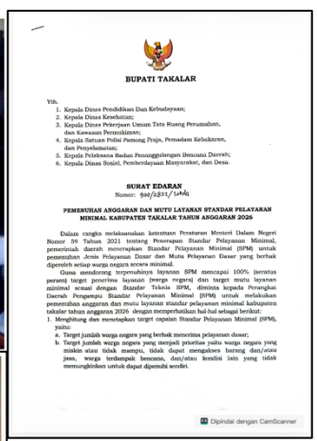
BUPATI TAKALAR

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa.

SURAT EDARAN
Nomor: 900/5831/SETDA

PEMENUHAN ANGGARAN DAN MUTU LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% (seratus persen) target penerima layanan (warga negara) dan target mutu layanan minimal sesuai dengan Standar Teknis SPM, diminta kepada Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk melakukan pemenuhan anggaran dan mutu layanan standar pelayanan minimal kabupaten takalar tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Menghitung dan menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu:
   a. Target jumlah warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar;
   b. Target jumlah warga negara yang menjadi prioritas yaitu warga negara yang miskin atau tidak mampu, tidak dapat mengakses barang dan/atau jasa, warga terdampak bencana, dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Dipindai dengan CamScanner

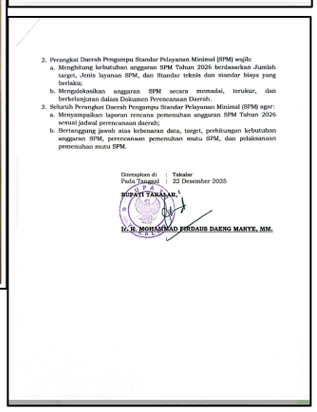
2. Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib:
   a. Menghitung kebutuhan anggaran SPM Tahun 2026 berdasarkan Jumlah target, Jenis layanan SPM, dan Standar teknis dan standar biaya yang berlaku;
   b. Mengalokasikan anggaran SPM secara memadai, terukur, dan berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
3. Seluruh Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar:
   a. Menyampaikan laporan rencana pemenuhan anggaran SPM Tahun 2026 sesuai jadwal perencanaan daerah;
   b. Bertanggung jawab atas kebenaran data, target, perhitungan kebutuhan anggaran SPM, perencanaan pemenuhan mutu SPM, dan pelaksanaan pemenuhan mutu SPM.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 22 Desember 2025

BUPATI TAKALAR,

H. MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MARYE, MM.

3.3.3.3 Tujuan 3 Sasaran 7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan matriks Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 87,89. Nilai realisasi ini telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berada pada rentang 76,61 – 88,30. Adapun faktor faktor yang menjadi kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

Tabel III-40
Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Takalar 2025

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakt	1. Pendampingan pada seluruh tahapan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi Perangkat Daerah. 2. Perbaikan dan Peningkatan pada 9 unsur IKM sesuai PermenPANRB 14/2017

Gambar III-8
Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Takalar Tahun 2025



3.3.3.4 Tujuan 3 Sasaran 8 Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Angka Kriminalitas. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2025 sebesar 22.63 per 100.000 penduduk atau lebih kecil dari target realisasi sebesar 86,91 per 100.000 penduduk. Realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa terdapat kejadian kriminalitas sebesar 22,63 per 100.000 penduduk atau lebih kecil dari yang ditargetkan sebesar 86,91 kejadian kriminalitas per 100.000 penduduk. Adapun faktor faktor yang menjadi kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

Tabel III-41
Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja
Angka Kriminalitas
Kabupaten Takalar 2025

No	Sasaran	Indikator	Faktor Keberhasilan
	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	1. Tersedianya Command Centre yang memantau titik titik rawan di Kabupaten Takalar. 2. Terselenggaranya Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) 3. Gerakan Bersama Satreskim Polres Takalar. 4. Pengamanan dan Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar

Gambar III-9
Bukti Dukung Kegiatan Faktor Keberhasilan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Angka Kriminalitas
Kabupaten Takalar Tahun 2025

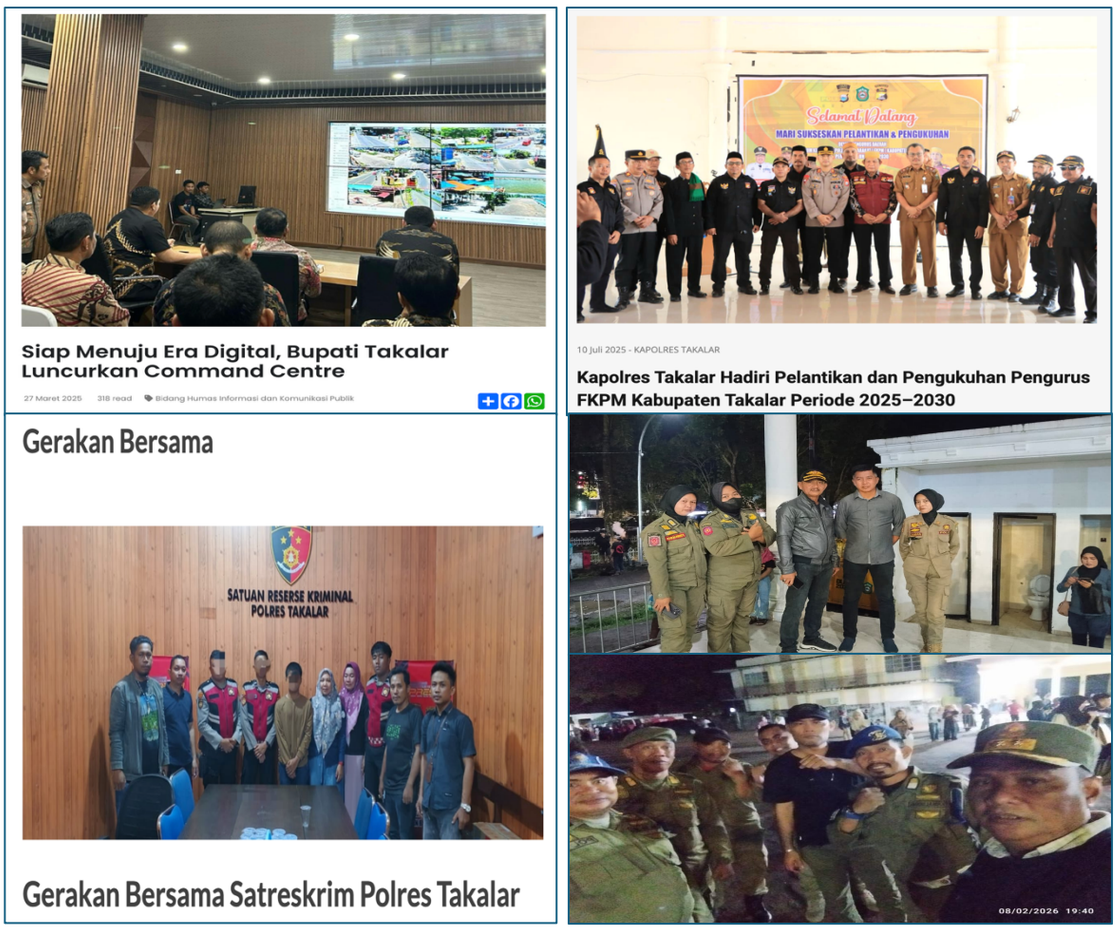

3.4 Analisis Efiseiensi Sumber Daya (Anggaran)

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis efisiensi anggaran menjadi aspek penting dalam menilai sejauh mana alokasi dan penggunaan anggaran di Kabupaten Takalar telah berjalan secara optimal. Efisiensi anggaran mencerminkan bagaimana sumber daya keuangan daerah digunakan secara efektif untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penghematan, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Kabupaten.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\%\ Efisiensi\ Biaya = 100\% - \frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya}\ x\ 100\%$$

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp 1.089.038.268.854,73** (Satu Trilyun Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga

Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah koma Tujuh PuluhTiga Sen) dari total pagu anggaran sebesar **Rp 1.185.434.080.310,00** (Satu Trilyun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).

Berdasarkan rumus efisiensi tersebut diatas, maka persentase efisiensi biaya yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\%\ Efisiensi\ Biaya = 100\% - \frac{1.089.038.268.854,73}{1.185.434.080.310,00}\ x\ 100\%$$

$$\%\ Efisiensi\ Biaya = 8,13\ \%$$

Persentase efisiensi biaya tahun 2025 adalah sebesar 8,13%, dengan demikian maka terdapat **Rp 96.395.811.455,27** (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah koma Dua Puluh Tujuh Sen) sisa anggaran yang tidak terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, sisa Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai, dan Sisa Belanja Tunjangan Profesi Guru, Belanja Barang dan Jasa tidak dilaksanakan karena sumber dana yang terbatas, dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi batas waktu yang tersedia karena transferan baru diterima di bulan akhir Desember 2025. Untuk dana Insentif Fiskal dan sisa Belanja Modal tidak terealisasi seluruhnya karena Kegiatan sumber dana Bantuan Keuangan dari Provinsi tidak tersalurkan, dan Program kegiatan yang bersumber dari PAD tidak mencukupi.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Per Urusan Tahun Anggaran 2025, berikut adalah analisis efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Takalar :

1. Urusan dengan efisiensi tertinggi (serapan anggaran >90%)

Tabel III-42
Urusan Pemerintahan dengan Nilai Serapan Anggaran Tertinggi Tahun 2025

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	211.799.470.689,77	203.372.104.627,2	96,02
2	Unsur Pemerintahan Umum	5.824.491.856,00	5.366.996.424,00	92,15
3	Unsur Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	718.574.972.615,13	660.027.139.090,00	91,85
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	88.197.716.646,10	80.375.883.997,00	91,13

Sumber : Data dioleh, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar 2025

2. Urusan dengan efisiensi terendah (serapan <90%)

Tabel III-43
Urusan Pemerintahan dengan Nilai Serapan Anggaran Terendah
Tahun 2025

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Urusan Pemerintahan Pilihan	17.579.541.111,00	14.382.681.732,00	81,81
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	89.162.913.677,00	77.377.891.906,36	86,78
3	Unsur Kewilayahan	40.460.419.800,00	35.759.654.346,17	88,38
4	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	13.834.553.915,00	12.375.916.732,00	89,46

Sumber : Data dioleh, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar 2025

3. Perangkat Daerah dengan Penyerapan Anggaran Tertinggi (>95%)

Tabel III-44
Perangkat Daerah dengan Nilai Serapan Tertinggi Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	340.438.085.416,13	330.780.476.186,00	97,16
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	189.903.862.741,77	184.460.951.885,20	97,13
3	Dinas Perikanan	6.663.557.656,00	6.341.835.684,00	95,17

Sumber : Data dioleh, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar 2025

4. Perangkat Daerah dengan Penyerapan Anggaran Terendah (<85%)

Tabel III-45
Perangkat Daerah dengan Nilai Serapan Tertinggi Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.537.895.560,00	4.149.766.072,00	63,47
2	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian	12.951.558.605,00	9.860.606.476,00	76,13
3	Kecamatan Galesong	1.897.201.043,00	1.464.485.567,00	77,19
4	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	1.345.381.318,00	1.083.031.649,00	80,50

Sumber : Data dioleh, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar 2025

3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berbagai program dan kegiatan strategis telah dirancang dan diimplementasikan sebagai upaya konkret dalam meningkatkan efektivitas pencapaian pembangunan di Kabupaten Takalar. Program dan kegiatan ini disusun berdasarkan prioritas daerah serta mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, guna memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berikut adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja daerah di tahun 2025.

Tabel III-46
Program Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja
di Kabupaten Takalar Tahun 2025

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	252.196.964.322,40	244.365.698.596,00	96,89	7.831.265.726,40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.095.000,00	18.095.000,00	100	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	251.374.577.322,40	243.570.029.306,00	96,9	7.804.548.016,40
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.615.000,00	5.615.000,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.322.000,00	2.322.000,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.790.000,00	45.624.000,00	99,64	166.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.200.000,00	5.183.700,00	99,69	16.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.230.000,00	328.985.000,00	97,27	9.245.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.135.000,00	389.844.590,00	95,75	17.290.410,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86.396.182.469,73	85.735.851.030,00	99,24	660.331.439,73
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46.369.751.178,00	46.172.389.230,00	99,57	197.361.948,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.245.566.944,73	24.023.121.687,00	99,08	222.445.257,73
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.222.076.247,00	9.990.022.413,00	97,73	232.053.834,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.558.788.100,00	5.550.317.700,00	99,85	8.470.400,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0	0,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	88.827.300,00	88.827.300,00	100	0,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.827.300,00	88.827.300,00	100	0,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	114.635.000,00	114.635.000,00	100	0,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.635.000,00	114.635.000,00	100	0,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.641.476.324,00	475.464.260,00	28,97	1.166.012.064,00
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	55.800.700,00	55.800.700,00	100	0,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.585.675.624,00	419.663.560,00	26,47	1.166.012.064,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.859.839.853,32	55.832.558.764,00	94,86	3.027.281.089,32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.603.920,00	168.086.100,00	79,43	43.517.820,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.876.551.795,00	54.049.658.500,00	95,03	2.826.893.295,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.933.650,00	63.923.650,00	99,98	10.000,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9.999.790,00	9.999.790,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.219.640,00	14.901.470,00	30,9	33.318.170,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	408.335.850,00	383.072.360,00	93,81	25.263.490,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.070.000,00	276.683.700,00	99,86	386.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.557.104,04	468.557.700,00	98,94	4.999.404,04
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.568.104,28	397.675.494,00	81,06	92.892.610,28
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	107.490.994.628,68	97.781.574.440,00	90,97	9.709.420.188,68
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.513.296.221,68	10.864.008.963,00	94,36	649.287.258,68
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.503.022.467,00	86.463.761.637,00	90,54	9.039.260.830,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	62.400.000,00	50.400.000,00	80,77	12.000.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	412.275.940,00	403.403.840,00	97,85	8.872.100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.172.858.260,00	860.841.620,00	73,4	312.016.640,00
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	100	0,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	122.342.000,00	16.432.500,00	13,43	105.909.500,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.047.016.260,00	840.909.120,00	80,31	206.107.140,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	188.748.580,00	172.245.600,00	91,26	16.502.980,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.748.580,00	172.245.600,00	91,26	16.502.980,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.374.317.391,00	28.016.959.039,00	95,38	1.357.358.352,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.374.317.391,00	28.016.959.039,00	95,38	1.357.358.352,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	88.389.213.941,00	77.979.218.373,00	88,22	10.409.995.568,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	118.359.500,00	118.359.500,00	100	0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.270.854.441,00	77.860.858.873,00	88,21	10.409.995.568,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.215.420.722,00	6.710.300.965,00	93	505.119.757,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.893.260,00	52.636.260,00	99,51	257.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.717.260.202,00	6.241.476.505,00	92,92	475.783.697,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.749.760,00	18.706.600,00	99,77	43.160,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.896.200,00	1.895.000,00	99,94	1.200,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.425.000,00	87.125.000,00	99,66	300.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.671.500,00	250.458.600,00	92,19	21.212.900,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.524.800,00	58.003.000,00	88,52	7.521.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.400.156.000,00	848.688.000,00	7,44	10.551.468.000,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.784.650.000,00	234.282.300,00	2,17	10.550.367.700,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	615.506.000,00	614.405.700,00	99,82	1.100.300,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.930.225.400,00	1.928.809.300,00	99,93	1.416.100,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.930.225.400,00	1.928.809.300,00	99,93	1.416.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.420.379.300,00	4.412.555.800,00	99,82	7.823.500,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.420.379.300,00	4.412.555.800,00	99,82	7.823.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.622.862.340,00	1.620.091.440,00	99,83	2.770.900,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.622.862.340,00	1.620.091.440,00	99,83	2.770.900,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	89.921.850,00	89.877.000,00	99,95	44.850,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	89.921.850,00	89.877.000,00	99,95	44.850,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	16.330.099.124,00	13.576.787.830,00	83,14	2.753.311.294,00
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	16.330.099.124,00	13.576.787.830,00	83,14	2.753.311.294,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	16.055.333.946,00	15.789.342.055,00	98,34	265.991.891,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	16.055.333.946,00	15.789.342.055,00	98,34	265.991.891,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	20.095.860,00	19.981.640,00	99,43	114.220,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	8.516.860,00	8.418.640,00	98,85	98.220,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	11.579.000,00	11.563.000,00	99,86	16.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	279.763.000,00	278.163.000,00	99,43	1.600.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	279.763.000,00	278.163.000,00	99,43	1.600.000,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	354.943.500,00	349.498.250,00	98,47	5.445.250,00
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60.349.400,00	60.189.200,00	99,73	160.200,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	294.594.100,00	289.309.050,00	98,21	5.285.050,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	12.901.530.500,00	4.511.231.500,00	34,97	8.390.299.000,00
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	252.000,00	252.000,00	100	0,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	12.901.278.500,00	4.510.979.500,00	34,97	8.390.299.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.713.182.100,00	2.700.429.950,00	99,53	12.752.150,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.713.182.100,00	2.700.429.950,00	99,53	12.752.150,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.360.513.400,00	7.760.589.500,00	92,82	599.923.900,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.652.760,00	4.652.760,00	100	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.327.567.050,00	5.760.665.346,00	91,04	566.901.704,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.702.800,00	1.702.800,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.993.400,00	81.881.620,00	99,86	111.780,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.606.090,00	44.306.590,00	99,33	299.500,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.457.000,00	45.440.700,00	99,96	16.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.928.500,00	1.768.414.174,00	98,19	32.514.326,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.605.800,00	53.525.510,00	99,85	80.290,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.732.410,00	70.570.760,00	99,77	161.650,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.793.600,00	6.750.200,00	99,36	43.400,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	63.938.810,00	63.820.560,00	99,82	118.250,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	246.452.740,00	234.827.780,00	95,28	11.624.960,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	244.045.380,00	232.456.850,00	95,25	11.588.530,00
Investigasi Kejadian Kebakaran	411.430,00	395.000,00	96,01	16.430,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.995.930,00	1.975.930,00	99	20.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.773.932.426,00	2.237.730.201,00	80,67	536.202.225,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.667.870,00	9.287.800,00	96,07	380.070,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.437.286.796,00	1.907.874.670,00	78,28	529.412.126,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.021.800,00	511.800,00	50,09	510.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.780.060,00	57.651.260,00	99,78	128.800,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.737.000,00	39.117.550,00	98,44	619.450,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.178.900,00	175.331.500,00	97,85	3.847.400,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.260.000,00	47.955.621,00	97,35	1.304.379,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	156.599.070,00	156.431.070,00	99,89	168.000,00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	12.967.100,00	12.967.100,00	100	0,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	22.550.000,00	22.382.000,00	99,25	168.000,00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	121.081.970,00	121.081.970,00	100	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.000.000,00	1.999.700,00	99,99	300,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	1.999.700,00	99,99	300,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	102.965.900,00	101.216.100,00	98,3	1.749.800,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	101.260.000,00	99.527.000,00	98,29	1.733.000,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.705.900,00	1.689.100,00	99,02	16.800,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	301.797.100,00	299.118.696,00	99,11	2.678.404,00
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	0,00	0,00	0	0,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	301.797.100,00	299.118.696,00	99,11	2.678.404,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	89.980.000,00	88.689.550,00	98,57	1.290.450,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	89.980.000,00	88.689.550,00	98,57	1.290.450,00
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	4.000.000,00	4.000.000,00	100	0,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.044.638.177,00	3.691.214.887,00	91,26	353.423.290,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.966.000,00	99,43	34.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.850.860.643,00	3.498.979.428,00	90,86	351.881.215,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.564.140,00	2.564.140,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.383.130,00	26.204.730,00	99,32	178.400,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.200.000,00	5.183.700,00	99,69	16.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.836.660,00	61.786.660,00	99,92	50.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.793.604,00	90.530.229,00	98,62	1.263.375,00
PROGRAM PENATAAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	100	0,00
Penyelenggaraan Penataan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	100	0,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	314.003.320,00	263.811.890,00	84,02	50.191.430,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	314.003.320,00	263.811.890,00	84,02	50.191.430,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	857.386.360,00	855.308.204,00	99,76	2.078.156,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	857.386.360,00	855.308.204,00	99,76	2.078.156,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.796.909.504,00	3.298.240.105,00	86,87	498.669.399,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.737.690,00	1.960.000,00	15,39	10.777.690,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.615.002.314,00	3.186.096.405,00	88,14	428.905.909,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.729.000,00	0,00	0	15.729.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.470.000,00	5.183.700,00	94,77	286.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.964.500,00	105.000.000,00	87,53	14.964.500,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.006.000,00	0,00	0	28.006.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.570.000,00	2.170.000,00	60,78	1.400.000,00
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.310.000,00	910.000,00	39,39	1.400.000,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	100	0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	251.914.680,00	49.640.000,00	19,71	202.274.680,00
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	71.550.000,00	0,00	0	71.550.000,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	111.345.000,00	0,00	0	111.345.000,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.019.680,00	49.640.000,00	71,92	19.379.680,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	5.627.110,00	0,00	0	5.627.110,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5.627.110,00	0,00	0	5.627.110,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	149.265.000,00	12.435.000,00	8,33	136.830.000,00
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.470.000,00	0,00	0	30.470.000,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.795.000,00	12.435.000,00	10,47	106.360.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	345.200.000,00	61.760.000,00	17,89	283.440.000,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	345.200.000,00	61.760.000,00	17,89	283.440.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.310.525.200,00	3.466.133.737,00	65,27	1.844.391.463,00
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.032.680.000,00	446.758.800,00	43,26	585.921.200,00
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.491.185.000,00	2.061.158.737,00	82,74	430.026.263,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	856.184.000,00	366.540.000,00	42,81	489.644.000,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	930.476.200,00	591.676.200,00	63,59	338.800.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.712.800.000,00	1.561.065.920,00	91,14	151.734.080,00
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	187.600.000,00	131.381.000,00	70,03	56.219.000,00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.525.200.000,00	1.429.684.920,00	93,74	95.515.080,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	95.323.210,00	39.915.810,00	41,87	55.407.400,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	33.977.210,00	33.915.810,00	99,82	61.400,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	61.346.000,00	6.000.000,00	9,78	55.346.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.499.760,00	1.499.760,00	100	0,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1.499.760,00	1.499.760,00	100	0,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.000.170,00	985.770,00	98,56	14.400,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1.000.170,00	985.770,00	98,56	14.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.154.109.057,00	9.276.828.191,00	83,17	1.877.280.866,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.139.010,00	12.069.010,00	99,42	70.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.942.877.697,00	9.065.967.971,00	82,85	1.876.909.726,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.770.760,00	2.723.900,00	98,31	46.860,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.489.160,00	22.380.080,00	99,51	109.080,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.144.700,00	105.139.500,00	100	5.200,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.687.730,00	68.547.730,00	99,8	140.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.295.302.390,00	2.230.938.290,00	97,2	64.364.100,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.086.326.550,00	2.026.169.450,00	97,12	60.157.100,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	208.975.840,00	204.768.840,00	97,99	4.207.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.026.663.150,00	2.871.467.120,00	94,87	155.196.030,00
Pengembangan Prasarana Pertanian	5.409.890,00	5.409.890,00	100	0,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	3.021.253.260,00	2.866.057.230,00	94,86	155.196.030,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4.529.730,00	4.529.730,00	100	0,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	4.529.730,00	4.529.730,00	100	0,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.526.449.550,00	1.465.462.725,00	96	60.986.825,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.526.449.550,00	1.465.462.725,00	96	60.986.825,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	257.138.420,00	204.374.500,00	79,48	52.763.920,00
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	257.138.420,00	204.374.500,00	79,48	52.763.920,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	104.565.650,00	102.930.775,00	98,44	1.634.875,00
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	104.565.650,00	102.930.775,00	98,44	1.634.875,00
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	165.000,00	165.000,00	100	0,00
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.000,00	165.000,00	100	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	728.000,00	728.000,00	100	0,00
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	728.000,00	728.000,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.140.450.080,00	7.611.718.711,00	93,5	528.731.369,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.026.960,00	17.950.230,00	89,63	2.076.730,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.314.786.170,00	3.824.117.871,00	88,63	490.668.299,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.353.000,00	4.350.500,00	99,94	2.500,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.519.600,00	1.519.600,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	999.250,00	999.250,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.860.000,00	7.430.000,00	94,53	430.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.584.000,00	5.567.700,00	99,71	16.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.459.801.100,00	3.446.188.100,00	99,61	13.613.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.520.000,00	303.595.460,00	93,26	21.924.540,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	624.000,00	624.000,00	100	0,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	624.000,00	624.000,00	100	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.271.300,00	6.255.300,00	99,74	16.000,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5.129.700,00	5.113.700,00	99,69	16.000,00
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.141.600,00	1.141.600,00	100	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	118.963.720,00	103.294.400,00	86,83	15.669.320,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	118.963.720,00	103.294.400,00	86,83	15.669.320,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	936.000,00	936.000,00	100	0,00
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	936.000,00	936.000,00	100	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.152.458.820,00	1.469.563.120,00	68,27	682.895.700,00
Pengelolaan Sampah	2.152.458.820,00	1.469.563.120,00	68,27	682.895.700,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.787.320.767,00	3.053.398.001,00	80,62	733.922.766,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.076.600,00	51.753.000,00	99,38	323.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.928.202.467,00	2.216.455.454,00	75,69	711.747.013,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.107.100,00	13.103.100,00	99,97	4.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.096.600,00	412.618.534,00	95,94	17.478.066,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.740.000,00	285.441.000,00	98,52	4.299.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.098.000,00	74.026.913,00	99,9	71.087,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	705.432.700,00	705.216.317,00	99,97	216.383,00
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	695.432.700,00	695.336.317,00	99,99	96.383,00
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	10.000.000,00	9.880.000,00	98,8	120.000,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	20.744.000,00	20.571.200,00	99,17	172.800,00
Pelayanan Pencatatan Sipil	14.464.000,00	14.441.200,00	99,84	22.800,00
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	6.280.000,00	6.130.000,00	97,61	150.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	37.291.000,00	37.109.400,00	99,51	181.600,00
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	32.221.000,00	32.169.400,00	99,84	51.600,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.070.000,00	4.940.000,00	97,44	130.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	14.768.000,00	14.744.000,00	99,84	24.000,00
Penyusunan Profil Kependudukan	14.768.000,00	14.744.000,00	99,84	24.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.357.034.538,00	3.818.665.086,00	87,64	538.369.452,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.848.800,00	1.839.800,00	99,51	9.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.966.350.332,00	3.437.571.525,00	86,67	528.778.807,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.408.030,00	78.263.935,00	98,56	1.144.095,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.287.376,00	170.142.900,00	99,92	144.476,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.140.000,00	130.846.926,00	94,04	8.293.074,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.566.630.974,00	3.390.830.240,36	95,07	175.800.733,64
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.240.000,00	1.200.000,00	96,77	40.000,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.501.303.974,00	3.325.636.060,36	94,98	175.667.913,64
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	7.545.000,00	7.516.180,00	99,62	28.820,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49.332.000,00	49.274.000,00	99,88	58.000,00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.975.000,00	4.969.000,00	99,88	6.000,00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.235.000,00	2.235.000,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.311.722.855,00	2.896.656.559,00	87,47	415.066.296,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.673.030,00	56.410.991,00	99,54	262.039,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.150.967.734,00	2.743.601.897,00	87,07	407.365.837,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.413.040,00	4.374.503,00	99,13	38.537,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.333.770,00	1.331.430,00	99,82	2.340,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.616.400,00	21.815.366,00	96,46	801.034,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	899.211,00	870.345,00	96,79	28.866,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.329.670,00	42.490.830,00	98,06	838.840,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.490.000,00	25.761.197,00	81,81	5.728.803,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.983.685.700,00	2.903.864.179,00	97,32	79.821.521,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.983.685.700,00	2.903.864.179,00	97,32	79.821.521,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.572.351.350,00	3.987.099.438,00	60,66	2.585.251.912,00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.889.880,00	51.588.650,00	99,42	301.230,00
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.520.461.470,00	3.935.510.788,00	60,36	2.584.950.682,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76.954.700,00	66.531.800,00	86,46	10.422.900,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	76.954.700,00	66.531.800,00	86,46	10.422.900,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	6.844.000,00	6.454.500,00	94,31	389.500,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.844.000,00	6.454.500,00	94,31	389.500,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	47.090.700,00	47.088.500,00	100	2.200,00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	47.090.700,00	47.088.500,00	100	2.200,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	70.536.070,00	69.591.030,00	98,66	945.040,00
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	70.536.070,00	69.591.030,00	98,66	945.040,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.433.204.858,00	5.823.920.926,00	90,53	609.283.932,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.605.600,00	27.565.700,00	99,86	39.900,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.179.968.658,00	5.576.966.846,00	90,24	603.001.812,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.849.300,00	5.832.500,00	99,71	16.800,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.012.900,00	27.757.300,00	99,09	255.600,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.725.000,00	14.001.600,00	95,09	723.400,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.600.000,00	53.311.500,00	97,64	1.288.500,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.443.400,00	118.485.480,00	96,77	3.957.920,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	32.215.600,00	20.222.000,00	62,77	11.993.600,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	32.215.600,00	20.222.000,00	62,77	11.993.600,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	108.660.250,00	8.639.200,00	7,95	100.021.050,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	108.660.250,00	8.639.200,00	7,95	100.021.050,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	109.485.000,00	108.187.166,00	98,81	1.297.834,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	109.485.000,00	108.187.166,00	98,81	1.297.834,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.169.779.300,00	665.475.287,00	56,89	504.304.013,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.169.779.300,00	665.475.287,00	56,89	504.304.013,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	7.463.100,00	7.463.100,00	100	0,00
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	7.463.100,00	7.463.100,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.224.122.641,00	2.757.892.756,00	85,54	466.229.885,00
Perencanaan, Penganggaran, dan	24.810.270,00	24.809.990,00	100	280,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.034.720.771,00	2.599.911.942,00	85,67	434.808.829,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.099.200,00	4.072.000,00	99,34	27.200,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.024.000,00	14.921.085,00	99,31	102.915,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.126.400,00	75.877.300,00	70,83	31.249.100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.342.000,00	38.300.439,00	99,89	41.561,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0	0,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0	0,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	19.254.000,00	19.253.200,00	100	800,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.254.000,00	19.253.200,00	100	800,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	66.649.500,00	51.672.197,00	77,53	14.977.303,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	66.649.500,00	51.672.197,00	77,53	14.977.303,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	62.352.700,00	61.716.700,00	98,98	636.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	62.352.700,00	61.716.700,00	98,98	636.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	494.953.030,00	485.244.230,00	98,04	9.708.800,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	494.953.030,00	485.244.230,00	98,04	9.708.800,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.494.770.870,00	1.479.980.200,00	99,01	14.790.670,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0	0,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.916.300,00	89.439.900,00	99,47	476.400,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	986.245.370,00	984.054.500,00	99,78	2.190.870,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	418.609.200,00	406.485.800,00	97,1	12.123.400,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	232.087.600,00	232.087.600,00	100	0,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	232.087.600,00	232.087.600,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.380.485.445,00	4.844.164.743,00	90,03	536.320.702,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.080.480,00	19.036.260,00	99,77	44.220,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.902.961.295,00	4.467.329.194,00	91,11	435.632.101,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100	0,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	52.191.900,00	2.241.900,00	4,3	49.950.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.831.170,00	11.772.000,00	99,5	59.170,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.466.200,00	108.934.340,00	99,51	531.860,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.008.000,00	115.008.000,00	100	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.946.400,00	116.843.049,00	69,99	50.103.351,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	49.759.690,00	49.759.690,00	100	0,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	49.759.690,00	49.759.690,00	100	0,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	600.000.000,00	595.000.000,00	99,17	5.000.000,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	600.000.000,00	595.000.000,00	99,17	5.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	200.476.900,00	155.121.000,00	77,38	45.355.900,00
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	200.476.900,00	155.121.000,00	77,38	45.355.900,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	194.916.500,00	193.414.300,00	99,23	1.502.200,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	37.862.000,00	36.680.000,00	96,88	1.182.000,00
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	157.054.500,00	156.734.300,00	99,8	320.200,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.849.588.648,00	2.604.229.915,00	91,39	245.358.733,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.783.940.348,00	2.538.719.915,00	91,19	245.220.433,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.864.300,00	1.864.000,00	99,98	300,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	789.000,00	781.000,00	98,99	8.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.995.000,00	15.865.000,00	99,19	130.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	100	0,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	384.016.690,00	383.005.440,00	99,74	1.011.250,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	374.407.190,00	373.399.440,00	99,73	1.007.750,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.609.500,00	9.606.000,00	99,96	3.500,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	14.440.000,00	14.200.000,00	98,34	240.000,00
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.920.000,00	98,4	80.000,00
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.440.000,00	9.280.000,00	98,31	160.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	5.949.000,00	5.849.000,00	98,32	100.000,00
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	960.000,00	96	40.000,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1.719.000,00	1.689.000,00	98,25	30.000,00
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	3.230.000,00	3.200.000,00	99,07	30.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	6.000.000,00	5.864.000,00	97,73	136.000,00
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	100	0,00
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	100	0,00
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2.000.000,00	1.904.000,00	95,2	96.000,00
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	1.000.000,00	960.000,00	96	40.000,00
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	1.000.000,00	1.000.000,00	100	0,00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	885.500,00	885.000,00	99,94	500,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	885.500,00	885.000,00	99,94	500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.546.060.606,00	4.249.829.778,00	93,48	296.230.828,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.800.020,00	3.800.020,00	100	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.380.419.806,00	4.084.432.968,00	93,24	295.986.838,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.074.300,00	1.074.300,00	100	0,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	949.840,00	949.840,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.876.250,00	1.876.250,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.019.490,00	52.775.500,00	99,54	243.990,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.488.900,00	78.488.900,00	100	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.432.000,00	26.432.000,00	100	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.768.497.390,00	1.745.110.448,00	98,68	23.386.942,00
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.615.836.760,00	1.594.895.608,00	98,7	20.941.152,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	147.745.630,00	145.299.900,00	98,34	2.445.730,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4.915.000,00	4.914.940,00	100	60,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	339.092.960,00	336.988.758,00	99,38	2.104.202,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	4.865.420,00	4.865.400,00	100	20,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	334.227.540,00	332.123.358,00	99,37	2.104.182,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	9.906.700,00	9.906.700,00	100	0,00
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	2.424.200,00	2.424.200,00	100	0,00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	2.846.700,00	2.846.700,00	100	0,00
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.635.800,00	4.635.800,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.507.607.600,00	3.261.320.422,00	92,98	246.287.178,00
Perencanaan, Penganggaran, dan	13.850.770,00	13.822.650,00	99,8	28.120,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.337.398.310,00	3.106.133.532,00	93,07	231.264.778,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.017.240,00	5.017.220,00	100	20,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.430.000,00	0,00	0	11.430.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.351.600,00	42.976.564,00	92,72	3.375.036,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.710.000,00	10.689.300,00	99,81	20.700,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.458.300,00	79.439.776,00	99,98	18.524,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.391.380,00	3.241.380,00	95,58	150.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.812.621.600,00	743.479.250,00	41,02	1.069.142.350,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.872.000,00	3.872.000,00	100	0,00
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.985.200,00	6.695.200,00	95,85	290.000,00
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.801.764.400,00	732.912.050,00	40,68	1.068.852.350,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.007.961.380,00	111.351.000,00	11,05	896.610.380,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	1.007.961.380,00	111.351.000,00	11,05	896.610.380,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	134.952.190,00	16.435.600,00	12,18	118.516.590,00
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	127.302.190,00	8.785.600,00	6,9	118.516.590,00
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	2.550.000,00	2.550.000,00	100	0,00
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.100.000,00	5.100.000,00	100	0,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	9.880.390,00	9.540.300,00	96,56	340.090,00
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	9.880.390,00	9.540.300,00	96,56	340.090,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	64.872.400,00	7.639.500,00	11,78	57.232.900,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	64.872.400,00	7.639.500,00	11,78	57.232.900,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.118.601.145,00	3.636.951.737,00	88,31	481.649.408,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.236.350,00	15.357.300,00	94,59	879.050,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.678.813.095,00	3.377.471.937,00	91,81	301.341.158,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.783.000,00	1.783.000,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.459.600,00	2.219.600,00	90,24	240.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.076.300,00	28.053.000,00	73,68	10.023.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.102.800,00	178.441.200,00	98,53	2.661.600,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.130.000,00	33.625.700,00	16,8	166.504.300,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.890.000,00	5.888.400,00	99,97	1.600,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.890.000,00	5.888.400,00	99,97	1.600,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	10.946.750,00	10.935.400,00	99,9	11.350,00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.946.750,00	10.935.400,00	99,9	11.350,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	5.890.000,00	5.830.000,00	98,98	60.000,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	5.890.000,00	5.830.000,00	98,98	60.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	230.890.000,00	225.604.439,00	97,71	5.285.561,00
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	230.890.000,00	225.604.439,00	97,71	5.285.561,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	5.870.000,00	5.870.000,00	100	0,00
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.870.000,00	5.870.000,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.393.848.060,10	38.618.312.668,00	93,29	2.775.535.392,10
Perencanaan, Penganggaran, dan	74.243.850,00	73.968.120,00	99,63	275.730,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.817.883.322,47	11.025.224.050,00	86,01	1.792.659.272,47
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	146.543.690,00	146.137.620,00	99,72	406.070,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	34.177.250,00	34.053.840,00	99,64	123.410,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177.566.300,00	91.442.200,00	51,5	86.124.100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.520.684.088,00	2.434.208.062,00	96,57	86.476.026,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.638.673.609,00	4.517.619.801,00	97,39	121.053.808,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.283.989.772,00	4.212.020.985,00	98,32	71.968.787,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.847.456.048,63	9.495.705.158,00	96,43	351.750.890,63
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.350.227.000,00	1.160.247.568,00	85,93	189.979.432,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.636.963.500,00	4.567.140.966,00	98,49	69.822.534,00
Penataan Organisasi	82.218.760,00	78.513.660,00	95,49	3.705.100,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	783.220.870,00	782.030.638,00	99,85	1.190.232,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.600.943.620,00	5.148.835.209,00	91,93	452.108.411,00
Administrasi Tata Pemerintahan	160.335.470,00	159.351.180,00	99,39	984.290,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.158.331.990,00	4.666.487.329,00	90,47	491.844.661,00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	259.241.160,00	300.022.700,00	115,73	-40.781.540,00
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	23.035.000,00	22.974.000,00	99,74	61.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.467.984.470,00	1.233.520.120,00	84,03	234.464.350,00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	901.872.860,00	900.289.320,00	99,82	1.583.540,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	41.465.580,00	39.386.800,00	94,99	2.078.780,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	500.288.000,00	269.673.000,00	53,9	230.615.000,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	24.358.030,00	24.171.000,00	99,23	187.030,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.037.044.296,00	23.030.310.446,00	85,18	4.006.733.850,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.275.120,00	199.098.000,00	96,05	8.177.120,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.675.155.782,00	4.136.845.470,00	88,49	538.310.312,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.788.380,00	50.596.100,00	99,62	192.280,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.319.600,00	71.991.712,00	83,4	14.327.888,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.696.840.880,00	1.380.422.750,00	81,35	316.418.130,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.151.370,00	0,00	0	34.151.370,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.945.130,00	667.828.100,00	88,81	84.117.030,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.789.015.300,00	2.650.041.289,00	95,02	138.974.011,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.164.852.734,00	13.380.027.102,00	82,77	2.784.825.632,00
Layanan Administrasi DPRD	580.700.000,00	493.459.923,00	84,98	87.240.077,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.697.896.200,00	12.344.905.554,00	97,22	352.990.646,00
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.192.464.660,00	1.148.872.234,00	96,34	43.592.426,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	194.072.540,00	188.574.200,00	97,17	5.498.340,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.225.142.680,00	2.020.140.600,00	90,79	205.002.080,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.527.079.190,00	2.467.169.302,00	97,63	59.909.888,00
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.956.822.130,00	1.920.922.300,00	98,17	35.899.830,00
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	832.000,00	400.000,00	48,08	432.000,00
Fasilitasi Tugas DPRD	4.601.483.000,00	4.598.826.918,00	99,94	2.656.082,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.212.300.039,00	3.312.778.475,00	78,65	899.521.564,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.244.040,00	62.418.540,00	98,69	825.500,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.548.624.839,00	2.840.314.916,00	80,04	708.309.923,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.965.990,00	20.879.760,00	99,59	86.230,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.260.190,00	33.515.542,00	87,6	4.744.648,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.249.200,00	248.300.420,00	66,52	124.948.780,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.083.000,00	59.114.300,00	83,16	11.968.700,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.872.780,00	48.234.997,00	49,79	48.637.783,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.343.081.670,00	1.192.076.988,00	88,76	151.004.682,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	664.590.470,00	646.891.188,00	97,34	17.699.282,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	176.542.200,00	174.352.900,00	98,76	2.189.300,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	480.679.100,00	352.337.600,00	73,3	128.341.500,00
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	21.269.900,00	18.495.300,00	86,96	2.774.600,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	180.445.900,00	179.491.500,00	99,47	954.400,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	82.061.400,00	81.454.800,00	99,26	606.600,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	26.442.000,00	26.322.000,00	99,55	120.000,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	71.942.500,00	71.714.700,00	99,68	227.800,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	494.390.580,00	160.603.280,00	32,49	333.787.300,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	302.968.600,00	0,00	0	302.968.600,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	102.362.100,00	99.999.400,00	97,69	2.362.700,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	89.059.880,00	60.603.880,00	68,05	28.456.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.115.985.993,77	19.263.548.385,00	91,23	1.852.437.608,77
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	324.269.500,00	318.164.220,00	98,12	6.105.280,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.182.490.013,77	12.412.039.642,00	94,16	770.450.371,77
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	238.504.580,00	210.969.633,00	88,46	27.534.947,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.061.200,00	124.559.600,00	80,33	30.501.600,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.237.500,00	419.072.615,00	78,59	114.164.885,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.556.543.200,00	5.681.132.763,00	86,65	875.410.437,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.880.000,00	97.609.912,00	77,54	28.270.088,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	167.825.554.858,00	164.264.067.893,00	97,88	3.561.486.965,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.668.746.330,00	1.669.855.730,00	100,07	-1.109.400,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.433.141.500,00	1.425.199.730,00	99,45	7.941.770,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.209.288.430,00	1.053.710.000,00	87,13	155.578.430,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	162.807.171.098,00	159.410.593.933,00	97,91	3.396.577.165,00
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	707.207.500,00	704.708.500,00	99,65	2.499.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	962.321.890,00	933.335.607,20	96,99	28.986.282,80
Pengelolaan Barang Milik Daerah	962.321.890,00	933.335.607,20	96,99	28.986.282,80
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.214.006.506,00	6.706.677.504,00	92,97	507.329.002,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.675.120,00	140.898.320,00	96,06	5.776.800,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.104.202.586,00	5.710.341.490,00	93,55	393.861.096,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.027.800,00	19.924.200,00	79,61	5.103.600,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.412.250,00	81.817.100,00	92,54	6.595.150,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.420.750,00	395.001.870,00	88,48	51.418.880,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.600.000,00	307.300.000,00	93,8	20.300.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.668.000,00	51.394.524,00	67,92	24.273.476,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.469.360.470,00	2.231.968.031,00	90,39	237.392.439,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.469.360.470,00	2.231.968.031,00	90,39	237.392.439,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.779.986.833,00	3.917.889.695,00	81,96	862.097.138,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.157.000,00	7.157.000,00	100	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.491.995.263,00	3.631.117.220,00	80,84	860.878.043,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.187.500,00	1.187.500,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.127.070,00	153.023.106,00	99,93	103.964,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.980.000,00	83.583.000,00	99,53	397.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.400.000,00	36.400.000,00	100	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.140.000,00	5.421.869,00	88,3	718.131,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	519.548.170,00	517.693.905,00	99,64	1.854.265,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	252.794.060,00	251.635.950,00	99,54	1.158.110,00
Mutasi dan Promosi ASN	112.179.110,00	111.604.655,00	99,49	574.455,00
Pengembangan Kompetensi ASN	147.964.500,00	147.842.800,00	99,92	121.700,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.610.500,00	6.610.500,00	100	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	666.169.680,00	675.708.264,00	101,43	-9.538.584,00
Pengembangan Kompetensi Teknis	666.169.680,00	675.708.264,00	101,43	-9.538.584,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.318.100,00	16.265.100,00	99,68	53.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.318.100,00	16.265.100,00	99,68	53.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.635.338.515,00	9.191.879.632,00	86,43	1.443.458.883,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.420.000,00	10.830.000,00	70,23	4.590.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.887.419.855,00	6.594.960.444,00	83,61	1.292.459.411,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.292.464.000,00	1.285.294.140,00	99,45	7.169.860,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	702.816.860,00	655.612.920,00	93,28	47.203.940,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285.851.000,00	228.244.698,00	79,85	57.606.302,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.298.000,00	93.218.650,00	95,81	4.079.350,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.818.800,00	321.468.780,00	91,37	30.350.020,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.746.865.400,00	2.742.045.600,00	99,82	4.819.800,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.250.515.400,00	2.245.706.000,00	99,79	4.809.400,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	496.350.000,00	496.339.600,00	100	10.400,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	452.350.000,00	441.991.500,00	97,71	10.358.500,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	0,00	0,00	0	0,00
Pendampingan dan Asistensi	452.350.000,00	441.991.500,00	97,71	10.358.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.029.126.931,00	7.269.139.010,00	90,53	759.987.921,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.810.040,00	15.330.000,00	96,96	480.040,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.245.648.441,00	6.510.444.491,00	89,85	735.203.950,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.927.750,00	151.748.600,00	99,88	179.150,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.182.000,00	47.312.000,00	71,49	18.870.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.578.000,00	515.603.300,00	99,04	4.974.700,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.980.700,00	28.700.619,00	99,03	280.081,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.125.000,00	4.125.000,00	100	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.125.000,00	4.125.000,00	100	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.718.507.412,00	1.715.217.412,00	99,81	3.290.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.642.882.412,00	1.642.882.412,00	100	0,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	75.625.000,00	72.335.000,00	95,65	3.290.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.020.610.838,00	5.906.781.919,00	84,13	1.113.828.919,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.040.000,00	34.290.000,00	680,36	-29.250.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.384.590.498,00	5.279.547.531,00	82,69	1.105.042.967,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.527.840,00	154.117.220,00	103,07	-4.589.380,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.793.500,00	389.245.368,00	90,99	38.548.132,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.559.000,00	43.481.800,00	91,43	4.077.200,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.500.000,00	3.500.000,00	100	0,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000,00	450.000,00	100	0,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100	0,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.600.000,00	1.600.000,00	100	0,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	450.000,00	450.000,00	100	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.338.868.440,00	1.329.393.440,00	99,29	9.475.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.025.000,00	4.025.000,00	100	0,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.300.678.440,00	1.300.678.440,00	100	0,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34.165.000,00	24.690.000,00	72,27	9.475.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	600.000,00	600.000,00	100	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	600.000,00	600.000,00	100	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	600.000,00	600.000,00	100	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	600.000,00	600.000,00	100	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	600.000,00	600.000,00	100	0,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	600.000,00	600.000,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.697.686.150,00	5.162.791.659,00	90,61	534.894.491,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.422.000,00	55.078.000,00	95,92	2.344.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.784.480.169,24	4.269.063.209,00	89,23	515.416.960,24
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	544.800,00	268.050,00	49,2	276.750,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.452.000,00	210.000,00	14,46	1.242.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.047.180,00	255.778.816,00	97,24	7.268.364,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.170.000,76	546.573.584,00	99,17	4.596.416,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.570.000,00	35.820.000,00	90,52	3.750.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.208.214.673,00	1.208.152.235,00	99,99	62.438,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.167.820,00	1.167.700,00	99,99	120,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.207.046.853,00	1.206.984.535,00	99,99	62.318,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.344.900,00	9.344.900,00	100	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.344.900,00	9.344.900,00	100	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.625.000,00	9.439.950,00	98,08	185.050,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.625.000,00	9.439.950,00	98,08	185.050,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.000.050,00	600.000,00	60	400.050,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.000.050,00	600.000,00	60	400.050,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.341.710.920,00	2.819.073.065,00	84,36	522.637.855,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.703.520,00	45.352.484,00	676,55	-38.648.964,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.123.505.540,00	2.593.625.291,00	83,04	529.880.249,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.058.460,00	2.044.000,00	99,3	14.460,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.399.000,00	73.685.100,00	112,67	-8.286.100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	100	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.914.400,00	85.666.190,00	96,35	3.248.210,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.430.000,00	11.000.000,00	23,19	36.430.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.704.000,00	1.759.000,00	37,39	2.945.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.989.000,00	669.000,00	33,63	1.320.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.715.000,00	1.090.000,00	40,15	1.625.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	162.497.568,00	151.806.579,00	93,42	10.690.989,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	159.472.568,00	149.606.579,00	93,81	9.865.989,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.650.000,00	825.000,00	50	825.000,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.375.000,00	1.375.000,00	100	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.200.000,00	1.100.000,00	50	1.100.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.200.000,00	1.100.000,00	50	1.100.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.156.170.146,00	1.954.927.112,00	90,67	201.243.034,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.096.090,00	6.750.000,00	95,12	346.090,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.919.463.156,00	1.719.658.412,00	89,59	199.804.744,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	804.200,00	700.000,00	87,04	104.200,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.564.700,00	1.540.000,00	98,42	24.700,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.560.000,00	28.555.000,00	99,98	5.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.200.000,00	5.183.700,00	99,69	16.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.060.000,00	159.060.000,00	100	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.422.000,00	33.480.000,00	97,26	942.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	298.585.817,00	298.234.817,00	99,88	351.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.505.000,00	3.505.000,00	100	0,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	274.609.817,00	274.279.817,00	99,88	330.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.471.000,00	20.450.000,00	99,9	21.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.500.000,00	13.500.000,00	100	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.500.000,00	13.500.000,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.345.427.112,00	1.182.197.191,00	87,87	163.229.921,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.864.040,00	4.864.040,00	100	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.235.954.746,00	1.091.341.012,00	88,3	144.613.734,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.715.000,00	5.715.000,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.522.000,00	22.222.000,00	90,62	2.300.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.683.176,00	25.755.139,00	72,18	9.928.037,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.688.150,00	30.300.000,00	82,59	6.388.150,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.133.400,00	20.208.400,00	91,3	1.925.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	100	0,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.633.400,00	15.708.400,00	89,08	1.925.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.150.000,00	3.150.000,00	100	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.150.000,00	3.150.000,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.874.317.543,00	1.445.857.067,00	77,14	428.460.476,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.110.000,00	2.011.000,00	95,31	99.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.768.760.343,00	1.345.555.367,00	76,07	423.204.976,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.164.000,00	1.164.000,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.281.800,00	19.339.000,00	83,06	3.942.800,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.039.000,00	21.022.700,00	99,92	16.300,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.214.000,00	29.212.000,00	99,99	2.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.748.400,00	27.553.000,00	95,84	1.195.400,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.775.900,00	1.775.900,00	100	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	987.900,00	987.900,00	100	0,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	788.000,00	788.000,00	100	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.318.700,00	14.063.700,00	76,77	4.255.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.628.000,00	4.628.000,00	100	0,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.690.700,00	9.435.700,00	68,92	4.255.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.006.600,00	1.006.600,00	100	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.006.600,00	1.006.600,00	100	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.782.300,00	1.782.300,00	100	0,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.782.300,00	1.782.300,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.838.254.752,00	2.413.259.827,17	85,03	424.994.924,83
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.574.000,00	2.574.000,00	100	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.633.211.252,00	2.208.543.427,17	83,87	424.667.824,83
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	271.000,00	271.000,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.194.500,00	36.169.500,00	99,93	25.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.488.000,00	14.488.000,00	100	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.554.000,00	130.341.900,00	99,84	212.100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.962.000,00	20.872.000,00	99,57	90.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	271.000,00	271.000,00	100	0,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	271.000,00	271.000,00	100	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	290.642.400,00	288.978.593,00	99,43	1.663.807,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	100	0,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	281.041.700,00	280.402.893,00	99,77	638.807,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.100.700,00	5.075.700,00	83,2	1.025.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	271.000,00	271.000,00	100	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	271.000,00	271.000,00	100	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.048.000,00	1.048.000,00	100	0,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.048.000,00	1.048.000,00	100	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.324.774.358,00	1.065.945.449,00	80,46	258.828.909,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.496.400,00	18.260.200,00	89,09	2.236.200,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.257.239.958,00	1.006.244.249,00	80,04	250.995.709,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	392.000,00	392.000,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	100	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.106.000,00	13.770.000,00	85,5	2.336.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	100	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.790.000,00	5.529.000,00	62,9	3.261.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.550.000,00	6.730.000,00	78,71	1.820.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.900.000,00	1.520.000,00	80	380.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.850.000,00	1.710.000,00	60	1.140.000,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.800.000,00	3.500.000,00	92,11	300.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.149.800,00	10.356.200,00	92,88	793.600,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.288.200,00	9.531.200,00	92,64	757.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	861.600,00	825.000,00	95,75	36.600,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	907.160,00	0,00	0	907.160,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	907.160,00	0,00	0	907.160,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.685.270.130,00	1.435.232.221,00	85,16	250.037.909,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.348.700,00	10.507.000,00	73,23	3.841.700,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.579.950.440,00	1.344.979.981,00	85,13	234.970.459,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000,00	1.765.000,00	58,83	1.235.000,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.014.990,00	19.872.500,00	79,44	5.142.490,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.131.000,00	16.095.000,00	99,78	36.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.554.000,00	21.540.900,00	95,51	1.013.100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.271.000,00	20.471.840,00	84,35	3.799.160,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	619.300,00	204.000,00	32,94	415.300,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	213.300,00	204.000,00	95,64	9.300,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	406.000,00	0,00	0	406.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.192.600,00	5.079.800,00	97,83	112.800,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.192.600,00	5.079.800,00	97,83	112.800,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	850.000,00	825.000,00	97,06	25.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	850.000,00	825.000,00	97,06	25.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.929.900,00	726.000,00	24,78	2.203.900,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.929.900,00	726.000,00	24,78	2.203.900,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.958.805.466,00	2.552.157.624,00	86,26	406.647.842,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.744.280,00	14.694.900,00	99,67	49.380,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.773.767.426,00	2.379.757.842,00	85,8	394.009.584,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.583.000,00	3.583.000,00	100	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.006.290,00	3.006.000,00	99,99	290,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.659.900,00	94.556.882,00	95,84	4.103.018,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.392.770,00	44.559.000,00	98,16	833.770,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.651.800,00	12.000.000,00	61,06	7.651.800,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	793.204.880,00	762.837.800,00	96,17	30.367.080,00

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	NILAI		%	SISA
	ANGGARAN	REALISASI		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	793.204.880,00	762.837.800,00	96,17	30.367.080,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.113.157.000,00	1.112.157.000,00	99,91	1.000.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.113.157.000,00	1.112.157.000,00	99,91	1.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.476.800,00	0,00	0	1.476.800,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.476.800,00	0,00	0	1.476.800,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.740.000,00	0,00	0	1.740.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.740.000,00	0,00	0	1.740.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	956.107.710,00	939.844.000,00	98,3	16.263.710,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	956.107.710,00	939.844.000,00	98,3	16.263.710,00
JUMLAH	**1.185.790.071.810,00**	**1.087.445.653.062,73**	98,3	**98.344.418.747,27**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar, 2026

3.6 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan pagu anggaran di Kabupaten Takalar selama periode 2023-2026 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Besar pagu anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp 1.270.139.670.225,00** (Satu Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), turun sebesar **Rp 26.007.307.889,54** atau 2,04% menjadi **Rp. 1.244.132.362.335,46** pada tahun

2024, kemudian turun lagi sebesar **Rp 58.698.282.025,46** atau 4,71% menjadi **Rp 1.185434080.310,00** pada tahun 2025. Dari sisi realisasi capaian setiap tahunnya berada diatas 90%.

Tabel III-47

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2025

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	266.721.508.274,00	240.240.782.473,00	26.480.725.801,00	90,07	251.191.384.509,00	241.524.152.223,00	9.667.232.286,00	96,15	252.196.964.322,40	244.365.698.596,00	7.831.265.726,40	96,89
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.837.227.446,00	121.242.477.848,00	594.749.598,00	99,51	118.452.742.922,00	115.780.783.939,00	2.671.958.983,00	97,74	86.396.182.469,73	85.735.851.030,00	660.331.439,73	99,24
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			-		25.000.000,00	25.000.000,00	-				-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	284.407.000,00	201.653.400,00	82.753.600,00	70,90	649.240.500,00	631.484.500,00	17.756.000,00	97,27	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			-		152.743.000,00	152.743.000,00	-		88.827.300,00	88.827.300,00	-	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			-		276.730.700,00	276.730.700,00	-		114.635.000,00	114.635.000,00	-	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			-		437.921.500,00	357.575.825,00	80.345.675,00		1.641.476.324,00	475.464.260,00	1.166.012.064,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	675.471.260,00	611.275.610,00	64.195.650,00	90,50	461.439.800,00	432.355.607,00	29.084.193,00	93,70			-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.327.021.544,00	49.989.360.985,00	1.337.660.559,00	97,39	67.853.794.045,00	64.195.596.098,00	3.658.197.947,00	94,61	58.859.839.853,32	55.832.558.764,00	3.027.281.089,32	94,86
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	131.042.645.886,00	116.914.010.534,00	14.128.635.352,00	89,22	114.790.685.032,00	102.871.730.927,00	11.918.954.105,00	89,62	107.490.994.628,68	97.781.574.440,00	9.709.420.188,68	90,97
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.023.676.100,00	993.850.690,00	29.825.410,00	97,09	1.707.199.500,00	1.523.305.200,00	183.894.300,00	89,23	1.172.858.260,00	860.841.620,00	312.016.640,00	73,40
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	166.517.900,00	122.997.900,00	43.520.000,00	73,86	50.000.000,00	44.400.000,00	5.600.000,00	88,80			-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.619.465.200,00	1.436.799.400,00	182.665.800,00	88,72	339.862.200,00	326.248.000,00	13.614.200,00	95,99	188.748.580,00	172.245.600,00	16.502.980,00	91,26

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.671.284.497,00	27.472.329.544,00	1.198.954.953,00	95,82	30.934.862.508,00	29.007.803.087,22	1.927.059.420,78	93,77	29.374.317.391,00	28.016.959.039,00	1.357.358.352,00	95,38
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.970.302.938,00	68.940.064.865,00	- 1.969.761.927,00	102,94	80.600.755.700,00	83.450.602.099,00	- 2.849.846.399,00	103,54	88.389.213.941,00	77.979.218.373,00	10.409.995.568,00	88,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.441.460.018,00	7.142.362.703,00	299.097.315,00	95,98	7.944.938.619,00	7.147.894.370,00	797.044.249,00	89,97	7.215.420.722,00	6.710.300.965,00	505.119.757,00	93,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.704.513.100,00	11.942.333.889,00	4.762.179.211,00	71,49	4.870.586.900,00	4.762.087.738,00	108.499.162,00	97,77	11.400.156.000,00	848.688.000,00	10.551.468.000,00	7,44
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	958.606.000,00	832.521.000,00	126.085.000,00	86,85	2.178.430.000,00	843.270.450,00	1.335.159.550,00	38,71	1.930.225.400,00	1.928.809.300,00	1.416.100,00	99,93
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.900.000,00	11.880.000,00	20.000,00	99,83			-		4.420.379.300,00	4.412.555.800,00	7.823.500,00	99,82
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.702.682.806,00	3.969.575.354,00	1.733.107.452,00	69,61	1.396.350.100,00	1.404.328.760,00	- 7.978.660,00	100,57	1.622.862.340,00	1.620.091.440,00	2.770.900,00	99,83
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.996.600,00	4.993.500,00	3.100,00	99,94			-				-	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	201.310.000,00	100.989.000,00	100.321.000,00	50,17	219.522.000,00	218.577.000,00	945.000,00	99,57	89.921.850,00	89.877.000,00	44.850,00	99,95
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	19.302.426.675,00	11.372.030.340,00	7.930.396.335,00	58,92	22.921.136.444,00	22.555.452.945,00	365.683.499,00	98,40	16.330.099.124,00	13.576.787.830,00	2.753.311.294,00	83,14
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.479.740.038,00	59.411.989.032,00	2.067.751.006,00	96,64	36.992.646.076,00	35.397.881.459,00	1.594.764.617,00	95,69	16.055.333.946,00	15.789.342.055,00	265.991.891,00	98,34
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	280.373.900,00	280.132.837,00	241.063,00	99,91	22.640.000,00	22.604.700,00	35.300,00	99,84	20.095.860,00	19.981.640,00	114.220,00	99,43
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	446.865.250,00	445.053.050,00	1.812.200,00	99,59	367.990.000,00	365.523.500,00	2.466.500,00	99,33	279.763.000,00	278.163.000,00	1.600.000,00	99,43
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	153.370.000,00	152.280.640,00	1.089.360,00	99,29	946.951.800,00	726.595.700,00	220.356.100,00	76,73	354.943.500,00	349.498.250,00	5.445.250,00	98,47

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	178.579.900,00	177.790.000,00	789.900,00	99,56	249.980.000,00	47.757.793,00	202.222.207,00	19,10	12.901.530.500,00	4.511.231.500,00	8.390.299.000,00	34,97
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.075.196.080,00	3.048.990.700,00	26.205.380,00	99,15	3.604.113.700,00	2.663.685.750,00	940.427.950,00	73,91	2.713.182.100,00	2.700.429.950,00	12.752.150,00	99,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.057.351.398,00	8.796.043.490,00	261.307.908,00	97,11	8.873.975.327,00	8.338.795.329,00	535.179.998,00	93,97	8.360.513.400,00	7.760.589.500,00	599.923.900,00	92,82
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.822.761.200,00	1.813.979.180,00	8.782.020,00	99,52	816.839.000,00	800.367.700,00	16.471.300,00	97,98	70.732.410,00	70.570.760,00	161.650,00	99,77
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	493.566.470,00	490.847.398,00	2.719.072,00	99,45	482.202.150,00	468.764.250,00	13.437.900,00	97,21	246.452.740,00	234.827.780,00	11.624.960,00	95,28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.203.052.566,00	1.961.729.929,00	241.322.637,00	89,05	2.502.868.037,00	2.248.645.640,00	254.222.397,00	89,84	2.773.932.426,00	2.237.730.201,00	536.202.225,00	80,67
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	148.023.300,00	101.626.937,00	46.396.363,00	68,66	300.016.000,00	41.785.200,00	258.230.800,00	13,93	156.599.070,00	156.431.070,00	168.000,00	99,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.912.357.080,00	3.640.851.924,00	271.505.156,00	93,06			-				-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-		3.000.000,00	3.000.000,00	-		2.000.000,00	1.999.700,00	300,00	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	394.512.000,00	385.802.032,00	8.709.968,00	97,79	414.832.400,00	413.939.100,00	893.300,00	99,78	102.965.900,00	101.216.100,00	1.749.800,00	98,30
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	242.795.000,00	223.383.800,00	19.411.200,00	92,01	9.197.600,00	9.094.300,00	103.300,00	98,88	301.797.100,00	299.118.696,00	2.678.404,00	99,11
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	263.253.000,00	260.679.100,00	2.573.900,00	99,02	100.970.000,00	93.979.800,00	6.990.200,00	93,08	89.980.000,00	88.689.550,00	1.290.450,00	98,57
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	7.147.000,00	7.132.000,00	15.000,00	99,79	27.000.000,00	26.479.800,00	520.200,00	98,07	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		4.113.047.955,00	3.802.041.659,00	311.006.296,00		4.044.638.177,00	3.691.214.887,00	353.423.290,00	
PROGRAM PENATAAN DESA	50.000.000,00	42.536.380,00	7.463.620,00	85,07	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-	-				-				-	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	756.600.000,00	502.649.254,00	253.950.746,00	66,44	8.000.000,00	7.488.500,00	511.500,00	93,61	314.003.320,00	263.811.890,00	50.191.430,00	84,02
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.750.000.000,00	1.670.376.490,00	79.623.510,00	95,45	689.360.000,00	631.418.775,00	57.941.225,00	91,59	857.386.360,00	855.308.204,00	2.078.156,00	99,76
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	3.009.500,00	3.009.500,00	-	100,00			-				-	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00			-				-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.969.900,00	192.405.489,00	3.564.411,00	98,18	3.826.648.285,00	3.470.828.590,00	355.819.695,00	90,70	3.796.909.504,00	3.356.021.817,00	440.887.687,00	88,39
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	139.550.000,00	139.508.000,00	42.000,00	99,97	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	3.570.000,00	3.570.000,00	-	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	4.580.000,00	4.580.000,00	-	100,00	165.928.700,00	95.629.800,00	70.298.900,00	57,63	251.914.680,00	174.164.680,00	77.750.000,00	69,14
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	320.421.200,00	317.955.000,00	2.466.200,00	99,23			-				-	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.422.100,00	10.372.100,00	50.000,00	99,52			-		5.627.110,00	5.127.110,00	500.000,00	91,11

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			-		240.911.000,00	149.151.000,00	91.760.000,00		149.265.000,00	75.829.700,00	73.435.300,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.849.976.260,00	3.565.847.731,00	284.128.529,00	92,62			-				-	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	391.849.500,00	372.223.482,00	19.626.018,00	94,99	94.800.000,00	76.241.875,00	18.558.125,00	80,42	345.200.000,00	118.012.760,00	227.187.240,00	34,19
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.279.992.400,00	2.948.158.100,00	331.834.300,00	89,88	5.280.726.200,00	3.547.298.313,00	1.733.427.887,00	67,17	5.310.525.200,00	5.048.614.817,00	261.910.383,00	95,07
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.438.227.000,00	2.294.411.000,00	143.816.000,00	94,10	2.388.000.000,00	2.385.920.000,00	2.080.000,00	99,91	1.712.800.000,00	1.613.265.920,00	99.534.080,00	94,19
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	484.779.900,00	484.721.400,00	58.500,00	99,99	267.426.350,00	257.132.300,00	10.294.050,00	96,15	95.323.210,00	39.915.810,00	55.407.400,00	41,87
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	77.350.000,00	77.333.600,00	16.400,00	99,98			-		1.499.760,00	1.499.760,00	-	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	77.350.000,00	77.327.400,00	22.600,00	99,97			-		1.000.170,00	985.770,00	14.400,00	98,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.547.286.471,00	10.592.565.320,00	954.721.151,00	91,73	10.765.661.797,00	9.904.411.807,00	861.249.990,00	92,00	11.154.109.057,00	9.276.828.191,00	1.877.280.866,00	83,17
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.287.575.600,00	3.544.826.156,00	742.749.444,00	82,68	1.360.136.800,00	1.008.227.487,00	351.909.313,00	74,13	2.295.302.390,00	2.230.938.290,00	64.364.100,00	97,20
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.399.607.142,00	10.088.184.059,00	311.423.083,00	97,01	13.068.505.800,00	12.361.394.804,00	707.110.996,00	94,59	3.026.663.150,00	2.871.467.120,00	155.196.030,00	94,87
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.029.000,00	9.969.000,00	60.000,00	99,40	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	4.529.730,00	4.529.730,00	-	100,00

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	270.000.000,00	269.600.000,00	400.000,00	99,85	522.355.400,00	519.912.400,00	2.443.000,00	99,53	1.526.449.550,00	1.465.462.725,00	60.986.825,00	96,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	16.127.000,00	15.617.000,00	510.000,00	96,84	999.900,00	936.900,00	63.000,00	93,70	257.138.420,00	204.374.500,00	52.763.920,00	79,48
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.470.009.000,00	2.438.789.240,00	31.219.760,00	98,74	341.326.800,00	327.090.205,00	14.236.595,00	95,83	104.565.650,00	102.930.775,00	1.634.875,00	98,44
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			-				-		165.000,00	165.000,00	-	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			-				-		728.000,00	728.000,00	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.519.587.609,00	5.278.098.700,00	241.488.909,00	95,62	8.257.621.497,00	7.701.778.921,00	555.842.576,00	93,27	8.140.450.080,00	7.611.718.711,00	528.731.369,00	93,50
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	326.869.400,00	321.772.800,00	5.096.600,00	98,44	20.624.000,00	20.173.000,00	451.000,00	97,81	624.000,00	624.000,00	-	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	127.847.520,00	120.922.600,00	6.924.920,00	94,58	95.936.000,00	95.691.200,00	244.800,00	99,74	6.271.300,00	6.255.300,00	16.000,00	99,74
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	838.148.891,00	833.342.550,00	4.806.341,00	99,43	101.450.500,00	77.999.500,00	23.451.000,00	76,88	118.963.720,00	103.294.400,00	15.669.320,00	86,83
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			-		999.000,00	999.000,00	-				-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			-		11.789.000,00	11.318.000,00	471.000,00		936.000,00	936.000,00	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.116.158.950,00	5.043.455.647,00	72.703.303,00	98,58	1.601.582.000,00	1.458.856.627,00	142.725.373,00	91,09	2.152.458.820,00	1.469.563.120,00	682.895.700,00	68,27

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.537.707.758,00	3.327.591.218,00	210.116.540,00	94,06	3.313.681.640,00	3.074.766.134,00	238.915.506,00	92,79	3.787.320.767,00	3.053.398.001,00	733.922.766,00	80,62
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	708.368.000,00	706.341.462,00	2.026.538,00	99,71	705.148.700,00	704.955.070,00	193.630,00	99,97	705.432.700,00	705.216.317,00	216.383,00	99,97
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	115.005.200,00	69.322.554,00	45.682.646,00	60,28	330.000.000,00	295.496.718,00	34.503.282,00	89,54	20.744.000,00	20.571.200,00	172.800,00	99,17
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	150.452.100,00	149.562.075,00	890.025,00	99,41	34.033.800,00	33.980.600,00	53.200,00	99,84	37.291.000,00	37.109.400,00	181.600,00	99,51
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	108.180.000,00	107.580.000,00	600.000,00	99,45	11.660.000,00	11.660.000,00	-	100,00	14.768.000,00	14.744.000,00	24.000,00	99,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.094.440.468,00	3.700.853.803,00	393.586.665,00	90,39	4.322.328.729,00	4.001.829.606,00	320.499.123,00	92,59	4.357.034.538,00	3.818.665.086,00	538.369.452,00	87,64
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.964.832.084,00	1.112.174.567,00	852.657.517,00	56,60	1.542.265.814,00	1.462.387.532,00	79.878.282,00	94,82	3.566.630.974,00	3.390.830.240,36	175.800.733,64	95,07
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.901.200,00	4.901.200,00	-	100,00	-	-	-				-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.078.810.303,00	2.851.594.906,00	227.215.397,00	92,62	3.032.211.592,00	2.766.467.426,00	265.744.166,00	91,24	3.311.722.855,00	2.896.656.559,00	415.066.296,00	87,47
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.490.491.722,00	2.461.765.222,00	28.726.500,00	98,85	2.154.038.640,00	2.139.125.670,00	14.912.970,00	99,31	2.983.685.700,00	2.903.864.179,00	79.821.521,00	97,32
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.238.991.224,00	4.093.632.298,00	145.358.926,00	96,57	1.176.457.778,00	1.169.205.300,00	7.252.478,00	99,38	6.572.351.350,00	3.987.099.438,00	2.585.251.912,00	60,66
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	627.814.700,00	553.299.170,00	74.515.530,00	88,13	10.230.300,00	10.205.400,00	24.900,00	99,76	76.954.700,00	66.531.800,00	10.422.900,00	86,46
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	148.209.900,00	147.559.900,00	650.000,00	99,56	5.797.700,00	5.473.500,00	324.200,00	94,41	6.844.000,00	6.454.500,00	389.500,00	94,31
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	51.140.500,00	51.140.500,00	-	100,00	5.402.200,00	5.401.500,00	700,00	99,99	47.090.700,00	47.088.500,00	2.200,00	100,00

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			-		19.153.000,00	8.775.900,00	10.377.100,00		70.536.070,00	69.591.030,00	945.040,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.229.368.642,00	5.780.944.548,00	448.424.094,00	92,80	6.447.636.441,00	5.945.246.292,00	502.390.149,00	92,21	6.433.204.858,00	5.823.920.926,00	609.283.932,00	90,53
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.510.400,00	3.430.400,00	80.000,00	97,72	53.884.400,00	41.091.300,00	12.793.100,00	76,26	32.215.600,00	20.222.000,00	11.993.600,00	62,77
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			-				-		108.660.250,00	8.639.200,00	100.021.050,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	106.249.500,00	105.779.500,00	470.000,00	99,56	14.656.900,00	11.113.200,00	3.543.700,00	75,82	109.485.000,00	108.187.166,00	1.297.834,00	98,81
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	636.557.000,00	635.910.976,00	646.024,00	99,90	1.169.779.300,00	665.475.287,00	504.304.013,00	56,89
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.599.800,00	3.584.200,00	15.600,00	99,57	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	7.463.100,00	7.463.100,00	-	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.157.901.442,00	2.427.952.310,00	729.949.132,00	76,88			-				-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.393.200,00	3.009.000,00	384.200,00	88,68	3.012.468.182,00	2.756.613.823,00	255.854.359,00	91,51	3.224.122.641,00	2.757.892.756,00	466.229.885,00	85,54
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	509.600,00	-	509.600,00	-	446.000,00	-	446.000,00	-	-	-	-	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	12.174.000,00	11.084.000,00	1.090.000,00	91,05	15.000.000,00	14.948.860,00	51.140,00	99,66	19.254.000,00	19.253.200,00	800,00	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	313.723.400,00	308.413.108,00	5.310.292,00	98,31	74.960.000,00	74.754.480,00	205.520,00	99,73	66.649.500,00	51.672.197,00	14.977.303,00	77,53
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	427.799.800,00	409.089.800,00	18.710.000,00	95,63	597.785.000,00	591.888.000,00	5.897.000,00	99,01	62.352.700,00	61.716.700,00	636.000,00	98,98
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	293.600,00	293.600,00	-	100,00	120.000,00	-	120.000,00	-			-	

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
INFORMASI PENANAMAN MODAL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		5.102.645.732,00	4.803.497.147,00	299.148.585,00				-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	380.000.000,00	379.933.000,00	67.000,00	99,98	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	494.953.030,00	485.244.230,00	9.708.800,00	98,04
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	649.999.600,00	549.771.695,00	100.227.905,00	84,58	985.045.840,00	984.954.512,00	91.328,00	99,99	1.494.770.870,00	1.479.980.200,00	14.790.670,00	99,01
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	299.999.750,00	299.999.200,00	550,00	100,00	499.999.800,00	499.810.831,00	188.969,00	99,96	232.087.600,00	232.087.600,00	-	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.532.276.753,00	5.287.905.890,00	244.370.863,00	95,58			-		5.380.485.445,00	4.844.164.743,00	536.320.702,00	90,03
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	449.999.500,00	448.932.064,00	1.067.436,00	99,76	398.935.700,00	317.137.200,00	81.798.500,00	79,50	49.759.690,00	49.759.690,00	-	100,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-		600.000.000,00	594.500.000,00	5.500.000,00		600.000.000,00	595.000.000,00	5.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			-				-		200.476.900,00	155.121.000,00	45.355.900,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	229.999.700,00	228.119.700,00	1.880.000,00	99,18	270.000.000,00	270.000.000,00	-	100,00	194.916.500,00	193.414.300,00	1.502.200,00	99,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.350.487.278,00	2.839.734.503,00	510.752.775,00	84,76	2.970.543.122,00	2.743.422.706,00	227.120.416,00	92,35	2.849.588.648,00	2.604.229.915,00	245.358.733,00	91,39
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.403.488.660,00	2.395.571.397,00	7.917.263,00	99,67	1.984.672.000,00	1.955.751.900,00	28.920.100,00	98,54	384.016.690,00	383.005.440,00	1.011.250,00	99,74
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	150.000.000,00	149.504.800,00	495.200,00	99,67	75.000.000,00	71.658.000,00	3.342.000,00	95,54	14.440.000,00	14.200.000,00	240.000,00	98,34

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			-		15.500.000,00	15.500.000,00	-		5.949.000,00	5.849.000,00	100.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			-		5.000.000,00	4.797.000,00	203.000,00		6.000.000,00	5.864.000,00	136.000,00	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			-		1.000.000,00	1.000.000,00	-		885.500,00	885.000,00	500,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.356.131.532,00	4.063.953.588,00	292.177.944,00	93,29	4.740.522.250,00	4.387.980.055,00	352.542.195,00	92,56	4.546.060.606,00	4.249.829.778,00	296.230.828,00	93,48
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.515.644.084,00	6.360.568.147,00	155.075.937,00	97,62	1.341.856.600,00	1.037.369.700,00	304.486.900,00	77,31	1.768.497.390,00	1.745.110.448,00	23.386.942,00	98,68
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.192.717.800,00	4.115.764.250,00	76.953.550,00	98,16	145.294.700,00	87.705.745,00	57.588.955,00	60,36	339.092.960,00	336.988.758,00	2.104.202,00	99,38
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.632.700.243,00	1.178.956.154,00	453.744.089,00	72,21	315.759.800,00	193.099.300,00	122.660.500,00	61,15	9.906.700,00	9.906.700,00	-	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.248.110.330,00	3.082.058.965,00	166.051.365,00	94,89	3.667.184.361,00	3.320.165.205,00	347.019.156,00	90,54	3.507.607.600,00	3.261.320.422,00	246.287.178,00	92,98
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.783.203.800,00	1.775.821.707,50	7.382.092,50	99,59	1.148.709.700,00	896.794.254,00	251.915.446,00	78,07	1.812.621.600,00	743.479.250,00	1.069.142.350,00	41,02
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.648.952.696,00	2.548.330.300,00	100.622.396,00	96,20	282.280.300,00	120.578.250,00	161.702.050,00	42,72	1.007.961.380,00	111.351.000,00	896.610.380,00	11,05
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	160.575.000,00	157.778.600,00	2.796.400,00	98,26	561.980.000,00	450.380.160,00	111.599.840,00	80,14	134.952.190,00	16.435.600,00	118.516.590,00	12,18
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	260.902.100,00	247.839.354,00	13.062.746,00	94,99	20.000.000,00	19.809.300,00	190.700,00	99,05	9.880.390,00	9.540.300,00	340.090,00	96,56
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			-				-		64.872.400,00	7.639.500,00	57.232.900,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.580.968.160,00	3.305.880.541,00	275.087.619,00	92,32	3.792.849.119,00	3.456.863.887,00	335.985.232,00	91,14	4.118.601.145,00	3.636.951.737,00	481.649.408,00	88,31

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			-		59.400,00	59.400,00	-				-	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	140.513.600,00	138.157.800,00	2.355.800,00	98,32	55.757.700,00	25.658.000,00	30.099.700,00	46,02	5.890.000,00	5.888.400,00	1.600,00	99,97
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	28.690.000,00	27.104.300,00	1.585.700,00	94,47	104.960.000,00	64.117.000,00	40.843.000,00	61,09	10.946.750,00	10.935.400,00	11.350,00	99,90
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15.000.000,00	14.920.000,00	80.000,00	99,47	12.322.000,00	6.845.800,00	5.476.200,00	55,56	5.890.000,00	5.830.000,00	60.000,00	98,98
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	158.131.000,00	157.919.400,00	211.600,00	99,87	10.063.000,00	4.972.000,00	5.091.000,00	49,41	230.890.000,00	225.604.439,00	5.285.561,00	97,71
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	113.492.900,00	17.380.000,00	96.112.900,00	15,31	11.020.000,00	9.960.000,00	1.060.000,00	90,38	5.870.000,00	5.870.000,00	-	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.478.993.952,00	27.561.955.197,00	2.917.038.755,00	90,43	29.761.154.891,00	27.976.654.897,00	1.784.499.994,00	94,00	41.393.848.060,10	38.618.312.668,00	2.775.535.392,10	93,29
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.373.500.100,00	7.637.883.351,26	735.616.748,74	91,21	11.868.581.700,00	10.858.924.388,00	1.009.657.312,00	91,49	5.600.943.620,00	5.148.835.209,00	452.108.411,00	91,93
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.089.498.800,00	1.079.437.660,00	10.061.140,00	99,08	1.170.804.700,00	1.098.167.705,00	72.636.995,00	93,80	1.467.984.470,00	1.233.520.120,00	234.464.350,00	84,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.012.826.036,00	16.951.673.770,00	2.061.152.266,00	89,16	22.394.687.985,00	19.431.651.861,00	2.963.036.124,00	86,77	27.037.044.296,00	23.030.310.446,00	4.006.733.850,00	85,18
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.842.027.600,00	8.630.074.602,00	211.952.998,00	97,60	11.109.988.660,00	9.651.096.896,00	1.458.891.764,00	86,87	12.697.896.200,00	12.344.905.554,00	352.990.646,00	97,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.670.588.927,00	3.536.523.134,00	134.065.793,00	96,35	3.836.158.351,00	3.410.932.408,00	425.225.943,00	88,92	4.212.300.039,00	3.312.778.475,00	899.521.564,00	78,65
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	923.106.700,00	823.701.346,00	99.405.354,00	89,23	1.169.572.200,00	1.026.817.630,00	142.754.570,00	87,79	1.343.081.670,00	1.192.076.988,00	151.004.682,00	88,76

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	447.419.000,00	430.353.815,00	17.065.185,00	96,19	286.898.100,00	284.986.605,00	1.911.495,00	99,33	180.445.900,00	179.491.500,00	954.400,00	99,47
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	485.194.400,00	465.317.700,00	19.876.700,00	95,90	1.049.999.300,00	806.785.116,00	243.214.184,00	76,84	494.390.580,00	160.603.280,00	333.787.300,00	32,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.548.573.562,00	15.224.046.658,00	3.324.526.904,00	82,08	21.748.437.399,46	14.825.484.318,00	6.922.953.081,46	68,17	21.115.985.993,77	19.263.548.385,00	1.852.437.608,77	91,23
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	156.365.768.522,00	154.256.292.557,00	2.109.475.965,00	98,65	169.826.826.840,00	165.025.717.796,00	4.801.109.044,00	97,17	167.825.554.858,00	164.264.067.893,00	3.561.486.965,00	97,88
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.452.363.844,00	1.422.913.951,00	29.449.893,00	97,97	1.317.365.800,00	1.209.663.066,00	107.702.734,00	91,82	962.321.890,00	933.335.607,20	28.986.282,80	96,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.715.792.998,00	7.878.772.208,00	837.020.790,00	90,40	7.151.596.353,00	6.332.314.519,00	819.281.834,00	88,54	7.214.006.506,00	6.706.677.504,00	507.329.002,00	92,97
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.291.308.900,00	3.666.239.847,00	625.069.053,00	85,43	2.573.171.200,00	2.245.039.760,00	328.131.440,00	87,25	2.469.360.470,00	2.231.968.031,00	237.392.439,00	90,39
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.140.002.827,00	3.790.032.741,00	349.970.086,00	91,55	4.403.177.395,00	4.022.821.493,00	380.355.902,00	91,36	4.779.986.833,00	3.917.889.695,00	862.097.138,00	81,96
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	537.519.400,00	528.710.042,00	8.809.358,00	98,36	875.839.800,00	932.901.701,00	- 57.061.901,00	106,52	519.548.170,00	517.693.905,00	1.854.265,00	99,64
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.404.505.000,00	1.270.464.260,00	134.040.740,00	90,46			-		666.169.680,00	675.708.264,00	- 9.538.584,00	101,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-				-		16.318.100,00	16.265.100,00	53.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.037.609.986,00	6.832.135.717,00	3.205.474.269,00	68,07	8.979.049.209,00	8.333.991.839,00	645.057.370,00	92,82	10.635.338.515,00	9.191.879.632,00	1.443.458.883,00	86,43
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	652.028.600,00	651.848.350,00	180.250,00	99,97	2.523.839.800,00	2.448.769.100,00	75.070.700,00	97,03	2.746.865.400,00	2.742.045.600,00	4.819.800,00	99,82

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	210.620.000,00	210.434.000,00	186.000,00	99,91	478.380.000,00	468.840.000,00	9.540.000,00	98,01	452.350.000,00	441.991.500,00	10.358.500,00	97,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.304.418.550,00	6.910.997.959,00	393.420.591,00	94,61	7.987.817.406,00	7.452.128.502,00	535.688.904,00	93,29	8.029.126.931,00	7.269.139.010,00	759.987.921,00	90,53
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.806.120.000,00	1.806.117.602,00	2.398,00	100,00	1.592.962.618,00	1.592.918.275,00	44.343,00	100,00	1.718.507.412,00	1.715.217.412,00	3.290.000,00	99,81
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.968.811.888,00	6.507.390.874,00	461.421.014,00	93,38	6.868.502.542,00	6.351.622.975,00	516.879.567,00	92,47	7.020.610.838,00	5.906.781.919,00	1.113.828.919,00	84,13
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.720.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	50,00	3.380.000,00	3.300.000,00	80.000,00	97,63	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.210.515.000,00	1.201.950.000,00	8.565.000,00	99,29	1.283.850.000,00	1.283.450.000,00	400.000,00	99,97	1.338.868.440,00	1.329.393.440,00	9.475.000,00	99,29
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	850.000,00	-	850.000,00	-	-	-	-		600.000,00	600.000,00	-	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-				-		600.000,00	600.000,00	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.550.000,00	850.000,00	1.700.000,00	33,33	-	-	-		600.000,00	600.000,00	-	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.466.036.656,00	5.183.000.873,00	283.035.783,00	94,82	5.586.330.759,00	5.246.218.275,00	340.112.484,00	93,91	5.697.686.150,00	5.162.791.659,00	534.894.491,00	90,61
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-				-				-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN	1.200.000.000,00	1.198.262.000,00	1.738.000,00	99,86	1.305.112.598,00	1.304.543.348,00	569.250,00	99,96	1.208.214.673,00	1.208.152.235,00	62.438,00	99,99

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-		7.500.000,00	7.499.650,00	350,00		9.344.900,00	9.344.900,00	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		10.000.000,00	10.000.000,00	-		9.625.000,00	9.439.950,00	185.050,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		6.850.000,00	6.811.800,00	38.200,00		1.000.050,00	600.000,00	400.050,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.987.807.526,00	2.772.100.250,00	215.707.276,00	92,78	3.288.474.256,00	2.938.208.337,00	350.265.919,00	89,35	3.341.710.920,00	2.819.073.065,00	522.637.855,00	84,36
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.500.400,00	8.846.800,00	653.600,00	93,12	8.621.200,00	8.571.200,00	50.000,00	99,42	4.704.000,00	1.759.000,00	2.945.000,00	37,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	210.978.600,00	208.947.200,00	2.031.400,00	99,04	165.860.930,00	165.860.930,00	-	100,00	162.497.568,00	151.806.579,00	10.690.989,00	93,42
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.430.200,00	3.078.756,00	351.444,00	89,75			-		2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	50,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.643.400,00	1.633.400,00	10.000,00	99,39			-				-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.236.800,00	2.156.800,00	80.000,00	96,42			-				-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.283.593.814,00	2.049.809.415,00	233.784.399,00	89,76	2.050.720.930,00	1.888.554.227,00	162.166.703,00	92,09	2.156.170.146,00	1.954.927.112,00	201.243.034,00	90,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.000,00	-	329.000,00	-	4.725.000,00	4.500.000,00	225.000,00	95,24			-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	217.600.000,00	207.650.000,00	9.950.000,00	95,43	303.029.200,00	300.590.300,00	2.438.900,00	99,20	298.585.817,00	298.234.817,00	351.000,00	99,88

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-		18.000.000,00	17.800.000,00	200.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.339.967.780,00	1.278.166.017,00	61.801.763,00	95,39	1.295.611.497,00	1.200.358.183,71	95.253.313,29	92,65	1.345.427.112,00	1.182.197.191,00	163.229.921,00	87,87
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.179.200,00	16.179.200,00	-	100,00	13.490.000,00	14.760.000,00	- 1.270.000,00	109,41	22.133.400,00	20.208.400,00	1.925.000,00	91,30
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-		2.010.000,00	2.000.000,00	10.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-				-				-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.700.310.260,00	1.618.163.155,00	82.147.105,00	95,17	1.770.345.226,00	1.640.616.886,00	129.728.340,00	92,67	1.874.317.543,00	1.445.857.067,00	428.460.476,00	77,14
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.085.400,00	1.085.400,00	-	100,00	2.579.300,00	2.579.300,00	-	100,00	1.775.900,00	1.775.900,00	-	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.625.500,00	9.542.400,00	83.100,00	99,14	10.436.400,00	10.436.400,00	-	100,00	18.318.700,00	14.063.700,00	4.255.000,00	76,77
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.496.200,00	1.496.200,00	-	100,00	1.754.000,00	1.754.000,00	-	100,00	1.006.600,00	1.006.600,00	-	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.878.200,00	1.878.200,00	-	100,00	951.600,00	951.600,00	-	100,00	1.782.300,00	1.782.300,00	-	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.854.837.580,00	2.683.760.531,00	171.077.049,00	94,01	2.875.728.107,00	2.659.096.937,00	216.631.170,00	92,47	2.838.254.752,00	2.413.259.827,17	424.994.924,83	85,03
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	998.000,00	998.000,00	-	100,00	1.334.600,00	1.331.800,00	2.800,00	99,79	271.000,00	271.000,00	-	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	211.527.800,00	191.942.500,00	19.585.300,00	90,74	321.100.200,00	320.858.000,00	242.200,00	99,92	290.642.400,00	288.978.593,00	1.663.807,00	99,43

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	902.800,00	902.800,00	-	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	271.000,00	271.000,00	-	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.708.400,00	2.148.200,00	560.200,00	79,32	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	1.048.000,00	1.048.000,00	-	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.409.391.860,00	1.257.777.273,00	151.614.587,00	89,24	1.283.395.021,00	1.123.979.254,00	159.415.767,00	87,58	1.324.774.358,00	1.065.945.449,00	258.828.909,00	80,46
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-				-		8.550.000,00	6.730.000,00	1.820.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.900.000,00	4.801.000,00	99.000,00	97,98	14.061.000,00	13.790.400,00	270.600,00	98,08	11.149.800,00	10.356.200,00	793.600,00	92,88
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-		2.500.000,00	1.495.000,00	1.005.000,00				-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-				-		-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		693.200,00	-	693.200,00		907.160,00	-	907.160,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.761.236.400,00	1.660.785.391,00	100.451.009,00	94,30	1.616.550.325,00	1.392.643.562,00	223.906.763,00	86,15	1.685.270.130,00	1.435.232.221,00	250.037.909,00	85,16
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.600.400,00	3.600.398,00	2,00	100,00	3.089.750,00	2.952.100,00	137.650,00	95,54	619.300,00	204.000,00	415.300,00	32,94
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.386.200,00	3.385.796,00	404,00	99,99	7.615.800,00	7.534.650,00	81.150,00	98,93	5.192.600,00	5.079.800,00	112.800,00	97,83
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.814.200,00	1.814.200,00	-	100,00	722.500,00	710.225,00	12.275,00	98,30	850.000,00	825.000,00	25.000,00	97,06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.990.800,00	2.990.800,00	-	100,00	2.697.400,00	2.687.400,00	10.000,00	99,63	2.929.900,00	726.000,00	2.203.900,00	24,78

NAMA PROGRAM	2023				2024				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.777.137.659,00	2.396.656.859,00	380.480.800,00	86,30	2.997.178.194,00	2.715.639.914,00	281.538.280,00	90,61	2.958.805.466,00	2.552.157.624,00	406.647.842,00	86,26
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	638.410.200,00	558.694.806,00	79.715.394,00	87,51	609.617.700,00	583.886.590,00	25.731.110,00	95,78	793.204.880,00	762.837.800,00	30.367.080,00	96,17
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13.618.897.800,00	13.424.957.600,00	193.940.200,00	98,58	23.715.924.000,00	23.715.352.650,00	571.350,00	100,00	1.113.157.000,00	1.112.157.000,00	1.000.000,00	99,91
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.283.400,00	2.303.400,00	1.980.000,00	53,78	736.400,00	-	736.400,00	-	1.476.800,00	-	1.476.800,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.977.800,00	2.020.600,00	1.957.200,00	50,80	1.860.000,00	-	1.860.000,00	-	1.740.000,00	-	1.740.000,00	-
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	606.690.600,00	588.058.138,00	18.632.462,00	96,93	1.002.093.000,00	912.279.000,00	89.814.000,00	91,04	956.107.710,00	939.844.000,00	16.263.710,00	98,30
JUMLAH	**1.270.139.670.225,00**	**1.180.848.535.477,76**	**89.291.134.747,24**	**92,97**	**1.244.132.362.335,46**	**1.175.052.230.559,93**	**69.080.131.775,53**	**94,45**	**1.185.434.080.310,00**	**1.089.038.268.854,73**	**96.395.811.455,27**	**91,87**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar, 2026

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja yang mencapai hasil yang diharapkan merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Takalar. Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai dapat memacu semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai realisasi yang diharapkan. Terkait dengan indikator kinerja yang belum tercapai, maka strategi di masa mendatang yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja OPD tahun berjalan untuk memantapkan tahapan realisasi kinerja;
2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala baik itu triwulan, semesteran dan tahunan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja OPD secara berkala dan berkelanjutan;
4. Mengefektifkan dan mengefesiensikan penggunaan anggaran dengan membuat program program yang prioritas dan menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar ini dibuat sebagai penggambaran capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Takalar. Semoga Laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang sehingga pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

Kabupaten
Takalar

LAMPIRAN
2025

TAKALAR
CEPAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MUHAMMAD HASBI**
Jabatan	:	Pj. BUPATI TAKALAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Takalar, Januari 2025

Pj. BUPATI TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

Dipindai dengan CamScanner

10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Rp	107.828.450,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp	9.957.217.790,00
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp	4.374.854.888,00
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp	5.218.346.073,00
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp	6.743.869.000,00
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rp	7.405.818.172,00
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	6.478.937.394,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp	7.038.693.802,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rp	3.426.994.996,00
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp	1.649.863.520,00
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp	138.975.000,00
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp	10.000.000,00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Rp	612.551.560,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp	3.306.025.548,00
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Rp	15.000.000,00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	6.526.814.256,00
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Rp	6.498.772.539,00
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Rp	21.871.911.404,00
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp	4.041.320.822,00
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp	20.000.000,00
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Rp	15.000.000,00
31	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp	73.151.949.784,00
32	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp	214.739.157.047,00
33	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Rp	17.929.404.952,00
34	UNSUR KEWILAYAHAN	Rp	40.582.129.877,00
35	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Rp	5.421.497.176,00
JUMLAH		Rp	1.183.543.239.179,00

Terbilang : Satu Trilyun Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh

Pj. BUPATI TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Memperkuat daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,500
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,45
3	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	29.182
4	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB/Kapita	51,24
		Indeks Gini	0,34
5	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6.10-7.14
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,2
6	Berkurangnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	6,69%
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	59,10
8	Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (71-80)
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah	BB (71-80)
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	80-90
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (76,61 - 88,30)
11	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban	Angka Kriminalitas	86,91 per 100.000 Penduduk

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rp	355.757.118.012,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp	301.127.906.343,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp	52.478.415.283,00
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	10.253.815.600,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp	11.377.470.576,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp	580.000.000,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Rp	182.500.000,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp	4.245.580.175,00
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rp	257.499.140,00

Dipindai dengan CamScanner

Volume
51
2026

Katalog/Catalogue: 1102001.7305
ISSN 0215-7128

KABUPATEN TAKALAR DALAM ANGKA 2026

Takalar Regency in Figures 2026

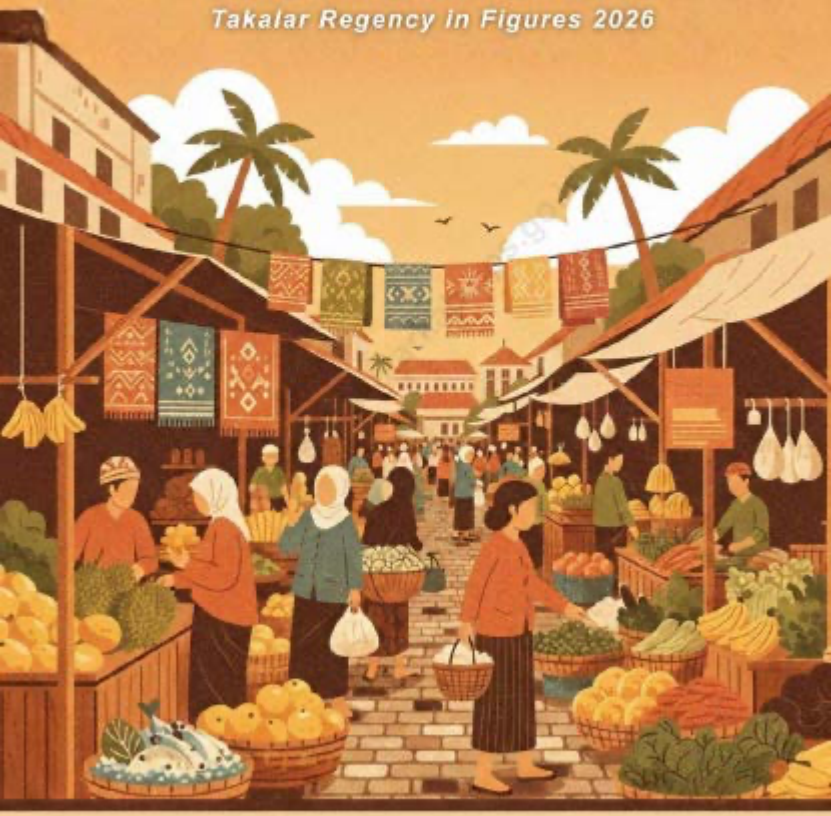

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAKALAR
BPS-STATISTICS TAKALAR REGENCY

Tabel 0.1 Statistik Kunci, 2023–2025
Table *Key Statistics, 2023–2025*

Rincian/Description	Satuan/Unit	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/*SOCIAL*				
Penduduk[1]/*Population*[1]	ribu/thousand	312,81	317,02	321,14
Laju Pertumbuhan Penduduk[1]/*Population Growth*[1]	%	1,39	1,35	1,30
Angka Harapan Hidup[1] -e_0/*Life Expectancy Rate*[1]	tahun/*years*	73,43	73,69	74,08
Angka Melek Huruf Usia 15+/*Literacy Rate Aged 15+*	%	89,74	89,62	91,41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK[2] *Labour Force Participation Rate-LFPR*[2]	%	65,86	64,43	69,71
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT[2] *Unemployment Rate-UR*[2]	%	3,58	3,84	3,76
Penduduk Miskin[3]/*Poor People*[3]	ribu/thousand	25,01	23,51	22,17
Persentase Penduduk Miskin[3] *Percentage of Poor People*[3]	%	8,29	7,75	7,27
Indeks Pembangunan Manusia-IPM[4] *Human Development Index*[4]	–	71,46	72,06	72,79
EKONOMI/*ECONOMIC*				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku[5] *Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price*[5]	miliar rupiah *billion rupiahs*	12.868,38	12.868,38	14.390,57
Laju Pertumbuhan Ekonomi[6]/*Economic Growth*[6]	%	3,86	4,34	4,71
PDRB Per Kapita Harga Berlaku *Per Capita of GRDP at Current Price*	juta rupiah *million rupiahs*	41,13	42,35	44,81

https://takalarkab.bps.go.id

Catatan/Notes:
1. Data 2022 merupakan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)/*The result of Interim Population Projection 2020-2023 (mid year/June)*
   Data 2022 merupakan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)/*The result of Interim Population Projection 2020-2023 (mid year/June)*
2. Kondisi Agustus/*Condition at August*
3. Kondisi Maret/*Condition at March*
4. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/*Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita*
5. Mulai tahun 2010 mengadopsi *System of National Account* 2008 (SNA 2008)/*Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008)*
6. Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/*Using 2010 base year (2010=100)*

PROVINSI SULAWESI SELATAN



3,71

SKOR IDSD 2025
PROVINSI
SULAWESI SELATAN



4

kab/kota
≥ skor provinsi

NAMA KABKOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR			EKOSISTEM INOVASI			SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	**4,80**	**3,87**	**3,88**	**4,02**	**3,79**	**3,87**	**2,65**	**2,96**	**2,90**	**4,88**	**2,78**	**3,64**	**3,60**
PROV. SULAWESI SELATAN	**4,40**	**3,86**	**3,87**	**4,24**	**3,87**	**3,90**	**2,64**	**2,69**	**3,02**	**4,73**	**3,29**	**4,24**	**3,71**
RATA-RATA KABKOTA	**4,68**	**3,29**	**4,49**	**3,76**	**3,78**	**4,81**	**3,14**	**2,81**	**2,49**	**4,13**	**3,08**	**2,64**	**3,63**
KEPULAUAN SELAYAR	4,61	3,27	4,36	4,10	3,59	4,53	2,40	2,45	2,65	3,72	2,50	2,25	3,38
BULUKUMBA	4,44	3,67	4,03	3,36	3,67	4,45	3,20	3,33	2,48	4,11	2,55	2,72	3,55
BANTAENG	4,50	3,56	4,71	3,36	3,86	4,32	3,02	2,65	2,78	4,00	2,42	2,43	3,47
JENEPONTO	4,65	3,63	4,48	3,45	3,51	4,07	3,17	2,28	2,48	4,00	4,13	2,24	3,51
TAKALAR	4,66	3,73	4,63	3,39	3,59	4,04	2,75	2,85	2,56	4,00	3,50	2,21	3,49
GOWA	4,45	3,69	4,62	3,65	3,84	4,22	3,71	2,82	2,80	4,36	3,12	3,20	3,71
SINJAI	4,72	3,99	4,52	3,77	3,59	4,53	2,80	2,74	2,05	4,05	3,44	2,76	3,58
MAROS	4,69	3,88	4,63	3,31	3,72	4,30	4,09	3,34	2,61	4,28	3,30	2,10	3,69
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	4,68	4,17	4,74	3,51	3,55	4,28	1,52	2,29	1,62	4,42	3,70	2,38	3,40
BARRU	4,79	4,03	4,35	4,21	3,73	4,10	3,06	2,82	2,30	3,86	2,51	1,89	3,47
BONE	4,62	3,63	4,43	3,65	3,59	4,33	2,31	2,17	1,94	4,54	2,74	3,12	3,42
SOPPENG	4,76	2,91	4,34	3,28	3,82	4,45	3,08	2,57	2,08	4,04	3,22	2,36	3,41
WAJO	4,49	2,96	4,77	3,81	3,61	4,34	3,11	2,32	2,17	4,28	2,64	2,72	3,43
SIDENRENG RAPPANG	4,43	3,16	4,40	4,10	3,84	4,50	2,60	2,83	2,28	4,10	2,96	3,04	3,52
PINRANG	4,38	3,32	4,66	3,92	3,80	4,36	2,81	3,34	2,09	4,29	3,11	1,90	3,50
ENREKANG	4,66	3,34	4,44	3,67	3,88	4,76	2,22	2,32	2,23	3,83	2,80	2,52	3,38
LUWU	4,53	2,64	4,19	4,06	3,65	4,38	2,46	2,66	2,32	4,19	3,17	1,80	3,36
TANA TORAJA	4,76	2,65	4,19	3,81	4,10	4,13	4,26	2,56	2,98	3,84	2,91	3,32	3,63
LUWU UTARA	4,61	2,77	3,47	3,92	3,72	4,34	2,28	2,77	2,21	4,09	3,06	1,01	3,19
LUWU TIMUR	4,78	2,54	4,00	3,37	3,67	4,18	1,21	2,53	1,98	4,38	3,05	1,64	3,13
TORAJA UTARA	4,82	2,60	4,27	3,57	4,08	4,41	4,61	2,47	2,01	3,89	2,96	2,20	3,49
KOTA MAKASSAR	4,11	3,25	5,00	4,84	3,98	3,88	4,80	4,38	3,51	5,00	2,78	4,50	4,17
KOTA PAREPARE	4,39	2,91	5,00	4,04	3,92	4,36	5,00	3,61	4,47	3,67	4,43	3,25	4,10
KOTA PALOPO	4,28	2,70	4,91	4,05	3,88	4,16	4,92	3,23	3,04	3,92	2,97	3,41	3,79

Keterangan : Pilar 1 Institusi; Pilar 2 Infrastruktur; Pilar 3 Adopsi TIK; Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro; Pilar 5 Kesehatan; Pilar 6 Keterampilan; Pilar 7 Pasar Produk; Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja; Pilar 9 Sistem Keuangan; Pilar 10 Ukuran Pasar; Pilar 11 Dinamika Bisnis; Pilar 12 Kapabilitas Inovasi.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/586/AA.05/2025 30 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.**

Yth.
Sekretaris Daerah
Kabupaten Takalar
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Takalar, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Takalar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).** Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 251230YPZX
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. **Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar menunjukkan nilai **64,59** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Takalar dapat diakses melalui portal https://portalrb.menpan.go.id/ dengan menggunakan akun instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS UJI HANTARA
Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

Tembusan
1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Yth. Bupati Takalar.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 251230YPZX
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

HASIL EVALUASI AKIP PEMDA KAB.TAKALAR TAHUN 2025		
Sesuai Surat Menpan-RB Nomor B/586/AA.05/2025 Tanggal 30 Desember 2025		
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025		
Nilai Evaluasi	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	**21,80**	**21,86**
Catatan :		
1. Masih terdapat sasaran strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil atau belum menggambarkan level kinerja Kepala Dinas. Kondisi ini terlihat, antara lain, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Lingkungan Hidup; 2. Beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound) dan belum cukup jelas. Misalnya, pada Dinas Sosial, sasaran "Meningkatnya penanganan PMKS" masih menggunakan indikator "Persentase kepatuhan SPM bidang sosial" dan "Persentase penyaluran bantuan pangan non tunai," yang belum sepenuhnya mencerminkan ketercapaian sasaran tersebut; **3.** Penjenjangan (cascading) kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) dalam pencapaian kinerja. Akibatnya, penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab-akibat serta belum mencerminkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Contoh permasalahan ini ditemukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perikanan.		
Rekomendasi		
1. Melakukan reviu dan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan guna memastikan bahwa seluruh isu strategis yang tercantum dapat diantisipasi dengan baik serta menjamin kesesuaian level kinerja perangkat daerah dengan rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil; 2. Melakukan reviu terhadap indikator kinerja di seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) serta memadai untuk mengawal pencapaian kinerja yang telah ditetapkan; 3. Menjamin bahwa penjenjangan (cascading) kinerja yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, dengan memastikan proses penjenjangan dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis (logical framework) dan mengutamakan critical success factor (CSF) sebagai dasar penyusunan penjenjangan kinerja antar level.		

Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	**18,59**	**18,75**
Catatan :		
1. Pemerintah Kabupaten Takalar telah menyusun dokumen IKU, namun pada beberapa perangkat daerah, indikator kinerja tersebut belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan, definisi operasional, sumber data, dan penanggung jawab. Akibatnya, ketepatan pengukuran dan keandalan data dari beberapa indikator masih diragukan. Kondisi ini ditemukan, antara lain, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, serta Dinas Kesehatan; 2. Pemanfaatan aplikasi EWAKI belum sepenuhnya mendukung implementasi manajemen kinerja organisasi. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan aplikasi oleh masing-masing perangkat daerah untuk melakukan pembaruan (update) kinerja secara berkala, serta belum adanya umpan balik (feedback) dari pimpinan terkait capaian kinerja yang dilaporkan.		
Rekomendasi :		
1. Melakukan reviu untuk memastikan bahwa dokumen Indikator Kinerja Utama pada seluruh perangkat daerah telah dilengkapi dengan definisi operasional, formula perhitungan, dan sumber data yang digunakan, serta dapat menjamin keandalan data dari setiap indikator yang ditetapkan; 2. Mendorong kepatuhan perangkat daerah dalam memanfaatkan aplikasi EWAKI dengan melakukan pembaruan (update) data kinerja secara berkala, sehingga aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai dasar pemberian umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.		
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	**10,40**	**10,40**
Catatan :		
1. Laporan kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum menyajikan analisis mendalam terkait penyebab tercapai/tidaknya setiap indikator kinerja, informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja, dan analisis upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per capaian kinerja yang dimiliki; 2. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari masih terdapat penetapan target kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, tanpa penjelasan yang memadai.		
Rekomendasi		
1. Menyusun Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah yang komprehensif dan memberikan informasi yang memadai sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Selain itu, perlu upaya peningkatan pemahaman penyusunan Laporan Kinerja pada seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu menyajikan Laporan Kinerja yang dapat		

menjelaskan secara rinci ketercapaian kinerja pada tahun bersangkutan serta memberikan umpan balik dalam upaya perbaikan kinerja mendatang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan kualitas antara laporan kinerja pada tingkat Pemda dan tingkat Perangkat Daerah; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Ini bertujuan agar perencanaan kinerja ke depan, khususnya target kinerja yang ditetapkan, dapat lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.		
Nilai Komponen Evaluasi Internal	**13,26**	**13,58**
Catatan :		
1. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung ke akar permasalahan yang dialami oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam implementasi SAKIP;		
Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan kepada Perangkat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa belum dilaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		
Nilai Hasil Evaluasi	**64,05**	**64,59**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**B**	**B**

PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Takalar

Provinsi Sulawesi Selatan

2025

Kepala Daerah : -
Luas Wilayah : - Km^2
Populasi : - Jiwa

Kepala DPRD : -
Kategori Daerah : -
Pendapatan Per Kapita : -

IKLH
72.39
SEDANG

Indeks Respon
0.00

Peringkat
Nasional : 289 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 21 dari 24 Kabupaten/Kota

Posisi IKLH



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	4	8	8
AIR	2	4	4
LAHAN	0	1	1
TOTAL	6	13	13

Indeks Respon

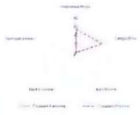

Sebaran Titik Pemantauan

Dipindai dengan CamScanner

MATRIKS REKAPITULASI ORGANISASI
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KABUPATEN TAKALAR 2025

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
1	Sekretariat Daerah	Tahunan		82,50	85,63	89,38	93,75	88,75	85,63	84,38	88,13	92,50	87,85	40	Online	Persyaratan & perilaku	-	-
		Tahunan	Pelayanan Administrasi	82,50	85,63	89,38	93,75	88,75	85,63	84,38	88,13	92,50	87,85	40				
2	Inspektorat Daerah	Tahunan		84,03	83,46	81,59	98,97	81,93	84,14	82,84	94,97	77,73	85,52	145	Online	Sarpras, waktu, produk, & perilaku	Menambah SDM, monitoring produk, pelatihan service excellent, peningkatan kualitas sarana	25%
		Tahunan	Layanan Bebas Temuan	85,91	84,77	83,18	98,64	83,86	86,14	85,68	96,36	80,45	87,22	110				
		Tahunan	Layanan Pengaduan	82,14	82,14	80	99,29	80	82,14	80	93,57	75	83,81	35				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
3	Sekretariat DPRD	Tahunan		92,08	88,81	88,71	89,05	94,3	89,45	87,76	90,09	89,78	90	35	Manual	Persyaratan & perilaku	Forum konsultasi publik untuk review SP, brenchmarking dengan instansi lain, pelatihan service excellent, reward & punishment berbasis umpan balik pengguna	100%
		Tahunan	Memfasilitasi Reses dan Pengawasan DPRD	100	100	87,5	75	100	100	75	87,5	75	88,89	2				
		Tahunan	Menyusun pokok pokok pikiran DPRD	83,33	75	75	100	100	91,67	91,67	91,67	83,33	87,96	3				
		Tahunan	Memfasilitasi rapat Bamus	95	85	85	95	95	100	85	85	90	90,56	5				
		Tahunan	Memfasilitasi Rapat Banggar	87,5	93,75	81,25	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	4				
		Tahunan	Memfasilitasi Rapat Bapemperda	87,5	87,5	100	87,5	100	100	100	100	100	95,83	2				
		Tahunan	Memfasilitasi Rapat Pansus	75	87,5	75	87,5	87,5	75	75	87,5	100	83,33	2				
		Tahunan	Memfasilkitis Rapat Dengar Pendapat (RDP)	100	100	100	87,5	100	100	100	100	87,5	97,22	2				
		Tahunan	Memfasilitasi Rapat Paripurna	92,86	85,71	92,86	92,86	96,43	96,43	92,86	89,29	89,29	92,07	7				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Memfasilitasi Rapat Pembahasan Anggaran / Rapat Komisi	91,67	100	91,67	91,67	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	87,96	3				
		Tahunan	Memfasilktasi Konsultasi dan Koordinasi	100	75	100	75	100	75	100	91,67	91,67	89,82	3				
		Tahunan	Memfasilitasi SPJ Perjalanan Dinas	100	87,5	87,5	100	87,5	75	75	87,5	100	88,89	2				
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan		81,69	82,5	81,53	94,57	82,02	82,89	82,37	97,01	80,86	85,05	265	Online	Sarpras & waktu	Budaya antri dan loket khusus, survey langsung penerima layanan	66,67%
		Tahunan	Pelayanan Administrasi	79,02	79,02	77,29	92,81	77,87	80,17	80,17	97,41	77,87	82,4	87				
		Tahunan	Pengurusan Kenaikan Pangkat	83,06	80,64	78,22	91,93	82,25	83,06	86,29	95,16	81,45	84,67	31				
		Tahunan	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	84,72	86,81	84,72	96,53	85,42	85,42	82,64	99,31	83,33	87,66	36				
		Tahunan	Pengurusan UNPTK & Sertifikasi	84,92	84,92	81,61	94,48	81,98	83,08	83,82	97,05	82,72	86,06	68				
		Tahunan	Pengurusan Pengesahan Ijazah & Dana Bos	82,14	83,92	87,5	98,21	85,71	85,71	82,14	100	78,57	87,1	14				
		Tahunan	Layanan Indonesia Pintar/verval Dapodik	75	77,77	83,33	91,66	80,55	83,33	83,33	97,22	80,55	83,64	9				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Layanan ebiling, NPWP Daftar Gaji, KP4	84,09	86,36	81,81	90,9	81,81	81,81	77,27	95,45	81,81	84,59	11				
		Tahunan	Layanan Izin Operasional PAUD dan PKBM	80,55	80,55	77,77	100	80,55	80,55	83,33	94,44	80,55	84,25	9				
5	Dinas Kesehatan	Tahunan		81,51	81,51	81,32	97,4	80,23	82,3	83,46	77,29	90,4	83,94	41	Online	Aduan & produk	Membuat ruang pengaduan, membuat media pengaduan, sosialisasi media pengaduan, membuat SOP & SP yang mudah dipahami	60%
		Tahunan	Umum dan Kepegawaian	85,53	85,53	88,16	94,74	86,84	89,47	88,16	82,89	96,05	88,60	19				
		Tahunan	Keuangan	75,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	77,78	2				
		Tahunan	Surat Izin Kerja	85,71	89,29	85,71	100,00	85,71	85,71	92,86	85,71	100,00	90,08	7				
		Tahunan	Surat Izin Praktek	82,14	78,57	78,57	96,43	78,57	82,14	82,14	67,86	89,29	81,75	7				
		Tahunan	Lain-lain	79,17	79,17	79,17	95,83	75,00	79,17	79,17	75,00	91,67	81,48	6				
6	Dinas Perhubungan	Tahunan		82,95	79,69	78,91	86,03	79,60	76,88	86,58	79,18	96,32	82,90	276	Online	Kompetensi & waktu	Workshop sesuai kebutuhan, SOP yang jelas, pelatihan etika dan komunikasi, perbaikan sarpras	100%
		Tahunan	Administrasi	87,50	81,25	81,25	87,50	81,25	75,00	93,75	81,25	100,00	85,42	4				
		Tahunan	Pelayanan KIR	78,40	78,13	76,56	84,56	77,94	78,77	79,41	77,11	92,65	80,39	272				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
7	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahunan		90,07	85,41	84,86	87,19	86,65	85,56	88,28	100,00	83,23	87,92	30	Online	Sarpras & waktu	Informasi waktu pelayanan, menambah petugas, pengadaan sarpras, perbaikan sarpras	66,67%
		Tahunan	Persetujuan Bangunan Gedung	83,70	81,52	80,43	81,52	80,43	78,26	83,70	100,00	77,17	82,97	23				
		Tahunan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	96,43	89,29	89,29	92,86	92,86	92,86	92,86	100,00	89,29	92,86	7				
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahunan		94,83	94,41	92,10	91,66	92,39	93,23	92,72	92,00	92,12	92,83	120	Online	Biaya, aduan, & waktu	Sosialisasi tarif, ruang pengaduan, sosialisasi pengaduan, digitalisasi produk, penyederhanaan regulasi	100%
		Tahunan	Izin Penelitian	95,45	93,18	88,64	88,64	88,64	93,18	93,18	90,91	93,18	83,60	11				
		Tahunan	Izin Tenaga Kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,10	87				
		Tahunan	Nomor Induk Berusaha	85,06	85,63	83,33	82,76	84,48	84,48	82,47	83,05	83,62	83,88	21				
		Tahunan	Izin Sarana Kesehatan	98,81	98,81	96,43	95,24	96,43	95,24	95,24	94,05	91,67	95,77	1				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tahunan		83,07	86,62	82,40	81,02	78,43	82,24	84,99	76,51	95,90	83,46	36	Manual	Aduan & produk	Forum konsultasi publik, monitoring layanan, pelatihan produk, sampling kelengkapan administrasi	50%
		Tahunan	Administrasi Persuratan	84,62	88,46	86,54	82,69	80,77	80,77	88,46	76,92	96,15	85,04	13				
		Tahunan	Konsultasi tentang Ekonomi Kreatif	81,52	84,78	78,26	79,35	76,09	83,70	81,52	76,09	95,65	81,88	23				
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Tahunan		93,63	86,21	86,94	100	93,25	88,13	85,08	91,79	90,25	90,59	76	Online	Perilaku, prosedur, & kompetensi	Pelatihan pelaksana layanan, pengawasan dan evaluasi prosedur layanan, pelatihan service excellent	75%
		Tahunan	Bantuan dan Fasilitasi	91,67	85,42	85,94	100	92,19	85,94	82,29	91,67	90,63	89,53	48				
		Tahunan	Informasi dan Konsultasi	95	86,67	88,33	100	93,33	90	88,33	93,33	91,67	91,85	15				
		Tahunan	Edukasi Pertanian	94,23	86,54	86,54	100	94,23	88,46	84,62	90,38	88,46	90,38	13				
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Tahunan		84,92	82,77	83,6	83,73	83,6	81,93	83,42	84,56	83,56	83,56	40	Online	Kompetensi & prosedur	Pelatihan service excellent, memperbaiki kualitas layanan, sosialisasi prosedur	90%

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Pelayanan TTE	88,16	85,53	85,53	90,79	85,53	85,53	86,84	90,79	92,11	87,87	21				
		Tahunan	Pelayanan Internet	81,67	80	81,67	76,67	81,67	78,33	80	78,33	75	79,26	19				
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan		90,18	90,56	92,12	100	90,18	89,18	90,59	87,76	92,3	91,43	38	Online	Aduan & Kompetensi	Sarpras pengaduan, meningkatkan kemampuan petugas aduan, evaluasi kinerja berkala	50%
		Tahunan	Perlindungan Perempuan dan Anak	87,5	90,63	93,75	100	87,5	89,06	85,94	92,19	95,31	91,32	17				
		Tahunan	Distribusi Alat Kontrasepsi	92,86	90,48	90,48	100	92,86	89,29	95,24	83,33	89,29	91,54	21				
13	Dinas Perikanan	Tahunan		85,68	82,5	79,09	81,03	84,55	84,32	84,55	82,73	78,98	82,60	32	Online	Sarpras & waktu	Meningkatkan kualitas layanan internet, pelatihan SDM, penambahan sarpras	60%
		Tahunan	Penerbitan SKT	85	77,5	77,5	82,5	85	80	85	82,5	75	81,11	10				
		Tahunan	Rekomendasi BBM	86,36	87,5	80,68	79,55	84,09	88,64	84,09	82,95	82,95	84,09	22				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tahunan		82,11	81,81	82,42	95,88	81,35	86,48	85,42	84,65	98,81	86,55	122	Online	Produk, prosedur, & waktu	Peningkatan kualitas pelayanan veteriner, peningkatan pengawasan penyakit hewan, pengembangan sistem manajemen, SOP yang jelas, sosialisasi registrasi online	86,52%
		Tahunan	Layanan Kesehatan Ternak	85,06	84,45	85,67	91,77	83,54	89,63	87,50	85,98	97,63	87,91	116				
		Tahunan	Penyuluhan	79,17	79,17	79,17	100,00	79,17	83,33	83,33	83,33	100,00	85,19	6				
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahunan		94,68	93,45	93,52	99,64	91,27	92,62	93,23	90,70	99,22	94,26	112	Online	Waktu & produk	Forum konsultasi publik untuk review SP, mengadakan mesin antrian, visualisasi informasi, pengadaan mesin cetak KIA dan fotocopy	90%
		Tahunan	KTPel	94,18	93,49	91,10	99,32	92,12	92,81	94,18	92,47	100,00	94,41	74				
		Tahunan	Kartu Keluarga	94,53	95,31	92,97	99,22	92,97	97,66	93,75	95,31	96,88	95,40	32				
		Tahunan	Akta Lahir	90,00	85,00	90,00	100,00	80,00	80,00	85,00	75,00	100,00	87,22	5				
		Tahunan	SKPWNI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
16	Dinas Sosial	Tahunan		80,88	85,04	82,37	100,00	87,82	82,26	80,45	94,87	96,69	87,82	47	Manual	Persyaratan & perilaku	Forum konsultasi publik untuk review SP, brenchmarking dengan instansi lain, pelatihan service excellent, reward & punishment berbasis umpan balik pengguna	100%
		Tahunan	Pembuatan BPJS	88,46	88,46	84,62	100,00	88,46	88,46	87,18	92,95	94,23	90,31	39				
		Tahunan	Subsidi Listrik	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00	86,11	2				
		Tahunan	Pengaduan Masyarakat	79,17	91,67	87,50	100,00	75,00	83,33	79,17	91,67	95,83	87,04	6				
17	Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan		89,89	88,83	92,55	100	89,89	88,83	88,83	86,17	86,17	90,13	47	Online	Sarpras & aduan	Forum konsultasi publik untuk memenuhi kebutuhan sarpras sesuai SP, membuat website aduan	20%
		Tahunan	Penerbitan AK.I	89,89	88,83	92,55	100	89,89	88,83	88,83	86,17	86,17	90,13	47				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan		89,00	90,50	88,50	75,00	87,50	83,00	90,00	90,00	78,00	85,72	50	Manual	Biaya & sarpras	Sosialisasi kepada penyewa tentang Perda No. 01 Tahun 2005, pemeliharaan sarpras, koordinasi dengan instansi terkait penganggaran	66,67%
		Tahunan	Penagihan Retribusi	89,00	90,50	88,50	75,00	87,50	83,00	90,00	90,00	78,00	85,72	50				
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Tahunan		82,86	88,83	77,12	82,29	83,2	82,83	90,85	80,88	73,22	82,45	306	Manual	Aduan & sarpras	Sosialisasi kanal pengaduan resmi, membuat sistem pengaduan digital, membentuk tim respons aduan, peremajaan armada pengangkut yang tak layak, menambah tempat sampah, pemetaan sarpras	60%
		Tahunan	Pelayanan Perizinan dan Administrasi Lingkungan	80,88	89,71	79,9	79,9	84,8	84,31	91,18	77,94	75,49	82,9	51				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Pelayanan Pengaduan Pencemaran	86,67	86,67	70	86,67	81,67	80	91,67	86,67	66,67	81,25	15				
		Tahunan	Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	81,04	90,1	81,46	80,31	83,13	84,17	89,69	78,02	77,5	83,05	240				
20	Badan Pendapatan Daerah	Tahunan		85,37	84,85	84,28	86,41	86,7	84,85	84,04	86,7	85,84	85,45	36	Online	Perilaku & waktu	Penyusunan kode etik, review SP	-
		Tahunan	Penerbitan PBB	87,5	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	83,33	91,67	91,67	90,28	6				
		Tahunan	Pembayaran PBB-P2	85,23	85,23	82,95	85,23	86,36	85,23	84,09	86,36	82,95	84,85	22				
		Tahunan	Pelayanan BPHTB	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	4				
		Tahunan	Balik Nama	87,5	81,25	81,25	87,5	87,5	81,25	87,5	87,5	87,5	85,42	4				
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahunan		91,01	91,46	89,41	93,86	92,26	89	91,21	93,42	92,12	91,53	152	Online	Kompetensi & waktu	Pelatihan untuk petugas, meningkatkan pemahaman SOP, evaluasi kinerja, penyederhanaan SOP dan alur, implementasi layanan digital, peningkatan efektivitas koordinasi antar unit	95%
		Tahunan	Layanan Manajemen ASN	90,14	89,79	86,62	93,66	90,14	87,68	88,03	91,2	90,49	89,75	71				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Pengadaan ASN (CPNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu)	91,88	93,13	92,19	94,06	94,38	90,31	94,38	95,63	93,75	93,3	81				
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahunan		83,58	92,06	88,34	100	87,65	87,4	89,78	90,63	88,69	89,79	54	Manual	Persyaratan & kompetensi	Banner alur dan persyaratan, pelatihan service excellent, penghargaan kepada petugas berprestasi	50%
		Tahunan	Permintaan Rekomendasi	84,38	93,75	90,63	100	84,38	87,5	93,75	84,38	93,75	90,28	8				
		Tahunan	Seleksi Paskibraka	85,12	88,69	86,9	100	91,07	93,45	88,1	87,5	91,07	90,21	42				
		Tahunan	Koordinasi Partai Politik	81,25	93,75	87,5	100	87,5	81,25	87,5	100	81,25	88,89	4				
23	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahunan		97,00	94,34	80,34	98,17	94,34	95,34	95,17	95,34	83,73	92,64	124	Online	Waktu & sarpras	Rapat permintaan anggaran sarpras, koordinasi pengadaan sarpras, mengusulkan penambahan/perbaikan sarpras, pelatihan etika dan komunikasi, penyediaan informasi yang jelas	-
		Tahunan	Aduan Masyarakat	94,00	88,67	85,67	96,33	88,67	90,67	90,33	90,67	85,00	90,00	75				
		Tahunan	Pelayanan	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,45	95,27	49				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tahunan		84,64	86,4	86,51	99,43	84,91	89	89,62	80,36	95,17	88,45	69	Online	Persyaratan & aduan	Koordinasi unsur persyaratan layanan, menyampaikan informasi terkait persyaratan pada layanan, forum konsultasi publik untuk menetapkan SP, menyiapkan sarpras pengaduan	67%
		Tahunan	Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pokok dan Perubahan	83,33	75	83,33	100	75	83,33	83,33	66,67	91,67	82,41	3				
		Tahunan	Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP)	83,33	83,33	83,33	100	83,33	83,33	91,67	75	91,67	86,11	3				
		Tahunan	Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU)	87,5	87,5	100	100	100	87,5	87,5	87,5	100	93,06	2				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Surat Perintah Pencairan Dana Lumpsump (SP2D-LS Pihak Ketiga)	83,33	91,67	83,33	100	75	91,67	100	91,67	75	87,96	3				
		Tahunan	Surat Perintah Pencairan Dana Lumpsump (SP2D-LS Gaji)	88,33	90	85	100	85	88,33	90	85	100	90,18	15				
		Tahunan	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	95,83	91,67	95,83	100	91,67	91,67	95,83	91,67	95,83	94,44	6				
		Tahunan	Surat Penyediaan Dana (SPD)	81,25	87,5	83,33	96,88	86,46	84,38	87,5	86,46	98,96	88,08	24				
		Tahunan	Standar Harga	75	87,5	87,5	100	87,5	87,5	87,5	62,5	100	86,11	2				
		Tahunan	Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	87,5	87,5	87,5	100	87,5	87,5	87,5	75	100	88,89	2				
		Tahunan	Penjualan Barang Milik Daerah dengan Lelang	75	75	75	100	75	100	75	75	100	83,33	1				
		Tahunan	Administrasi Persuratan	90,63	93,75	87,5	96,88	87,5	93,75	100	87,5	93,75	92,36	8				
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan		84,38	85,63	90	100	89,38	86,88	86,25	86,25	81,88	87,85	40	Manual	Sarpras & persyaratan	Forum konsultasi publik, rapat permintaan anggaran sarpras	50%

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Layanan informasi angin puting beliung, kebakaran, kekeringan, banjir, logistik, abrasi, orang tenggelam	84,38	85,63	90	100	89,38	86,88	86,25	86,25	81,88	87,85	40				
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Tahunan		76,39	77,31	75,93	85,65	77,31	78,70	79,17	72,69	93,06	79,58	35	Online	Aduan, waktu, produk, persyaratan	Menyiapkan kotak aduan, pengguna layanan menyampaikan kritik dan saran, waktu pelayanan sesuai jadwal, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, memperjelas persyaratan layanan	80%
		Tahunan	Pendampingan Penyusunan Dokumen	77,78	79,63	76,85	87,96	79,63	82,41	83,33	78,70	94,44	82,30	27				
		Tahunan	Monitoring Evaluasi	75,00	75,00	75,00	83,33	75,00	75,00	75,00	66,67	91,67	76,85	3				
		Tahunan	Koordinasi dan Konsultasi	75,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	87,50	75,00	75,00	79,17	2				
		Tahunan	Permintaan Data	87,50	87,50	87,50	100,00	87,50	87,50	87,50	87,50	100,00	90,28	2				
		Tahunan	Penyusunan Kebijakan	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	1				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
27	RSUD Pratama	Tahunan		87,58	85,46	88,29	96,33	86,5	86,25	89,92	89,13	81,21	87,85	100	Manual	Sarpras & prosedur	Sosialisasi regulasi, informasi lengkap layanan, pelatihan petugas, koordinasi kelengkapan sarpras	-
		Tahunan	Pelayanan Rawat Jalan	91,67	90	90	100	88,33	90	91,67	90	75	89,63	20				
		Tahunan	Pelayanan Rawat Inap	85	84,17	88,33	91,67	86,67	85	84,17	82,5	84,17	85,74	30				
		Tahunan	Pelayanan Unit Gawat Darurat	81,25	93,13	83,13	100	82,5	81,25	93,75	93,13	81,88	87,78	40				
		Tahunan	Pelayanan Penunjang	90	80	100	90	85	90	90	90	90	90	5				
		Tahunan	Pelayanan Lain-lain	90	80	80	100	90	85	90	90	75	86,67	5				
28	RSUD Padjonga	Tahunan		93,14	92,45	92,06	91,81	91,58	91,27	91,21	92,32	90,99	91,87	437	Online	Sarpras & perilaku	Perencanaan pengadaan sarpras, pelatihan service excellent, sistem reward & punishment	100%
		Tahunan	IGD	82,5	86	84,5	83	85,5	85	86,5	86,5	84	84,83	50				
		Tahunan	Admisi/Pendaftaran	96,56	95,18	94,72	85,78	93,81	94,5	86,01	92,89	93,81	92,58	109				
		Tahunan	Rawat Jalan	90,71	89,29	86,43	92,86	85	90,36	84,29	85	81,43	87,26	70				
		Tahunan	Rawat Inap	92,67	93,33	94	90,67	92,67	91	91,67	92,33	91,67	92,22	75				
		Tahunan	Laboratorium	95	91	95	97	95	94	96	98	96	95,22	25				
		Tahunan	Radiologi	97,67	94,77	96,51	97,67	94,19	93,6	94,19	96,51	96,51	95,74	43				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Perinatologi	100	100	98,33	100	100	96,67	100	98,33	100	99,26	15				
		Tahunan	Farmasi	90	90	87	87,5	86,5	85	91	89	84,5	87,83	50				
29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	Tahunan		95,37	98,53	93,22	99,04	94,18	92,48	91,52	88,13	95,65	94,23	30	Manual	Sarpras & produk	Melengkapi fasilitas dengan peralatan memadai, meningkatkan kualitas pelayanan yang sering mendapat keluhan	80%
		Tahunan	Administrasi Persuratan	92,65	97,06	94,12	100,00	94,12	92,65	92,65	89,71	97,06	94,45	17				
		Tahunan	Koordinasi dan Konsultasi	98,08	100,00	92,31	98,08	94,23	92,31	90,38	86,54	94,23	94,02	13				
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	Tahunan		88,75	92,5	87,5	97,5	88,75	90	87,5	93,75	82,5	89,86	20	Online	Waktu & perilaku	Publikasi jadwal pelayanan, membuat daftar piket harian, bimbingan kepada petugas layanan, membuat SK kode etik perilaku petugas pelayanan	75%
		Tahunan	Administrasi Persuratan	88,75	92,5	87,5	97,5	88,75	90	87,5	93,75	82,5	89,86	20				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
31	Kecamatan Mappakasunggu	Tahunan		90,81	85,3	83,46	83,09	83,46	83,46	100	90,08	100	88,85	36	Online	Biaya & waktu	Evaluasi prosedur pelayanan, pelatihan service excellent, sistem reward & punishment berbasis umpan balik pengguna	50%
		Tahunan	Administrasi Persuratan	94,12	95,59	91,91	91,18	91,91	91,91	100	92,65	100	94,36	34				
		Tahunan	Konsultasi dan Koordinasi	87,5	75	75	75	75	75	100	87,5	100	83,33	2				
32	Kecamatan Mangarabombang	Tahunan		87,74	90,87	84,26	94,95	89,91	88,35	86,42	94,6	82,34	88,82	20	Online	Waktu, perilaku, & persyaratan	Menambah petugas pelayanan, evaluasi petugas pelayanan, 3S, koordinasi pengadaan banner persyaratan, sosialisasi SOP dan banner alur dan persyaratan	80%
		Tahunan	Administrasi Persuratan	94,23	94,23	90,38	96,15	92,31	92,31	88,46	92,31	86,54	91,88	13				
		Tahunan	Koordinasi dan Konsultasi	81,25	87,5	78,13	93,75	87,5	84,38	84,38	96,88	78,13	85,76	7				
33	Kecamatan Galesong	Tahunan		83,20	80,62	85,28	100,00	79,40	83,40	84,53	79,27	100,00	86,19	48	Manual	Aduan & produk	Menyediakan SOP yang jelas, meningkatkan kemampuan petugas aduan	80%

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Administrasi Umum	82,93	83,54	82,93	100,00	79,88	83,54	89,02	87,80	100	87,74	41				
		Tahunan	Konsultasi	91,67	83,33	91,67	100,00	83,33	91,67	83,33	75,00	100	88,89	3				
		Tahunan	Izin Usaha Mikro	75,00	75,00	81,25	100,00	75,00	75,00	81,25	75,00	100	81,94	4				
34	Kecamatan Galesong Selatan	Tahunan		94,08	94,08	94,74	100	93,42	94,74	95,39	92,76	98,68	95,32	38	Manual	Aduan & produk	Meningkatkan kemampuan petugas aduan, meningkatkan kualitas pelayanan	80%
		Tahunan	Administrasi Persuratan	94,08	94,08	94,74	100	93,42	94,74	95,39	92,76	98,68	95,32	38				
35	Kecamatan Galesong Utara	Tahunan		88,24	88,03	85,72	99,11	87,82	87,5	88,81	96,75	83,93	89,54	48	Manual	Aduan & waktu	Meningkatkan kemampuan petugas aduan, menyediakan informasi tentang waktu dan prosedur	80%
		Tahunan	Administrasi Persuratan	88,97	86,76	87,5	100	84,56	87,5	91,91	97,06	87,5	90,2	34				
		Tahunan	Koordinasi dan Konsultasi	87,5	89,29	83,93	98,21	91,07	87,5	85,71	96,43	80,36	88,89	14				
36	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	Tahunan		95,54	95,24	94,05	100	93,75	98,22	96,73	99,41	84,77	95,3	44	Manual	Sarpras & produk	Mengusulkan pengadaan lahan strategis untuk pembangunan gedung, mengusulkan pengadaan PC, laptop, dan printer	100%

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Administrasi Persuratan	91,07	90,48	88,1	100	87,5	96,43	93,45	98,81	82,03	91,99	42				
		Tahunan	Konsultasi dan Koordinasi	100	100	100	100	100	100	100	100	87,5	98,61	2				
37	Kecamatan Sanrobone	Tahunan		90,85	89,06	93,58	100	90,75	89,43	89,43	86,52	91,23	91,21	52	Online	Aduan, prosedur, & kompetensi	Evaluasi kualitas dan prosedur pelayanan, menyediakan kotak saran dan pengaduan melalui WA, evaluasi prosedur layanan, pelatihan service excellent	75%
		Tahunan	Administrasi Persuratan	90,91	88,64	92,42	100	89,39	89,39	89,39	90,15	91,67	91,33	33				
		Tahunan	Konsultasi dan Koordinasi	90,79	89,47	94,74	100	92,11	89,47	89,47	82,89	90,79	91,08	19				
38	Kecamatan Pattallassang			84,03	77,43	89,59	99,66	90,63	90,63	90,97	87,85	96,53	89,7	38	Manual	Prosedur & persyaratan	Memperbaiki kualitas layanan, implementasi digitalisasi pelayanan (SI PINTAR), sosialisasi prosedur kepada petugas, forum konsultasi publik untuk review SP, menyusun panduan di loket	90%

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Administrasi Persuratan	80,56	79,86	79,17	99,31	81,25	81,25	81,94	75,69	93,06	83,57	36				
		Tahunan	Konsultasi dan Koordinasi	87,5	75	100	100	100	100	100	100	100	95,83	2				
39	Puskesmas Mappakasunggu	Tahunan		88,66	88,99	88,38	100	88,09	89,09	89,22	86,96	86,63	89,56	169	Online	Sarpras & aduan	Melengkapi fasilitas, pengajuan pemeliharaan gedung, publikasi tindak lanjut dari aduan	100%
		Tahunan	Klaster 1 (Administrasi & Pendaftaran)	91,43	86,43	85,71	100	87,86	89,29	87,14	85,71	86,43	88,89	35				
		Tahunan	Klaster 2 (Pelayanan Ibu Hamil)	89,52	89,52	89,52	100	89,52	89,52	91,94	89,52	87,9	90,77	31				
		Tahunan	Klaster 3 (Pelayanan Usia Dewasa)	90,63	89,06	89,84	100	89,06	89,84	80,47	87,5	85,94	89,15	32				
		Tahunan	Klaster 4 (Pelayanan Penyakit Menular)	81,25	90,63	84,38	100	87,5	87,5	96,88	84,38	84,38	88,54	8				
		Tahunan	Lintas Klaster	90,48	89,29	92,46	100	86,51	89,29	89,68	87,7	88,49	90,43	63				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
40	Puskesmas Aeng Towa	Tahunan		87,2	89,26	89,31	99,62	91,35	87,86	90,36	89,18	81,75	89,54	190	Manual	Sarpras & persyaratan	Sosialisasi antrian online, memasang persyaratan layanan, musyawarah untuk mencari solusi masalah persyaratan, pembenahan sarpras setiap ruangan, permohonan perbaikan gedung dan halaman, pengadaan mesin antrian	100%
		Tahunan	Pelayanan Klaster I (Pendaftaran, Rekam Medik, Manajemen)	96,43	87,5	86,61	100	85,71	89,29	89,29	90,18	76,79	89,09	28				
		Tahunan	Pelayanan Klaster II (Kesehatan Ibu dan Anak, Remaja)	84,09	90,15	93,18	100	90,91	89,39	90,15	87,12	82,58	89,73	33				
		Tahunan	Pelayanan Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia)	83,8	88,89	91,67	100	91,2	89,81	89,35	88,89	82,87	89,61	54				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Pelayanan Klaster IV (Penggulangan Penyakit Menular)	86,11	88,89	84,72	100	100	83,33	91,67	90,28	83,33	89,81	23				
		Tahunan	Pelayanan Lintas Klaster (UGD, Rawat Inap, Farmasi, Pelayanan Gigi dan Mulut dan Laboratorium)	85,58	90,87	90,38	98,08	88,94	87,5	91,35	89,42	83,17	89,48	52				
41	Puskesmas Bontokassi	Tahunan		95,42	91	89	92,67	90,92	91,83	95,17	89,42	87,97	91,5	80	Manual	Sarpras & waktu	Penambahan tenaga administrasi, penerapan sistem digitalisasi pelayanan, pembenahan sarpras	80%
		Tahunan	Klaster 1 (Loket Pendaftaran, Administrasi Rekam Medis, Administrasi Kepegawaian)	88,75	85	85	90	86,25	85	90	86,25	84	86,69	25				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Klaster 2 (Screening Pelayanan Dokter, Pelayanan Ibu Hamil, INC, Perawatan Nifas, Perawatan Anak, Imunisasi Gizi)	100	90	90	97,5	92,5	95	100	92,5	87,5	93,89	10				
		Tahunan	Klaster 3 (Screening Pelayanan Dokter, KB)	95	90	80	90	87,5	90	92,5	87,5	87,5	88,89	10				
		Tahunan	Klaster 4 (Pelayanan TB, HIV, Klinik Sanitasi, UBM)	100	100	100	95	100	100	100	90	98,33	98,33	5				
		Tahunan	Lintas Klaster (Pelayanan Gigi dan Mulut, Lab, Apotik, UGD, dan Rawat Inap)	93,33	90	90	90,83	88,33	89,17	93,33	90,83	82,5	89,72	30				
42	Puskesmas Bontomangape	Tahunan		89,74	90,88	89,5	91,89	90,93	90,48	94,2	89,37	86,48	90,4	220	Online	Sarpras & aduan	Menghimbau pendaftaran online, memasang alur pelayanan, meningkatkan layanan konsultasi dan pengaduan di media sosial dan kotak saran	100%

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Klaster 2 : KIA, Usia Bayi dan Balita, Usia Anak dan Remaja	93,18	95,45	90,91	95,45	93,18	88,64	95,45	93,18	86,36	92,42	11				
		Tahunan	Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lansia	87,50	90,50	88,10	90,50	90,50	91,67	94,05	89,30	83,93	89,56	42				
		Tahunan	Klaster 4 : Edukasi Layanan Program	89,17	88,83	89,50	90,83	90,17	91,17	93,67	87,50	87,83	89,85	16				
		Tahunan	Klaster 5 : UGD, Rawat Inap, Apotik dan Laboratorium	89,11	88,75	89,50	90,77	89,88	91,14	93,62	87,50	87,78	89,78	151				
43	Puskesmas Bontomarannu	Tahunan		83,97	83,15	80,57	81,45	82,65	82,49	80,92	82,92	81,54	82,19	120	Online	Waktu & perilaku	Pelatihan service excellent, sistem reward & punishment, evaluasi SP, penambahan komputer	-
		Tahunan	Pelayanan Klaster 1	82,64	80,56	79,17	81,94	81,25	79,86	79,86	82,64	81,94	81,10	36				
		Tahunan	Pelayanan Klaster 2	87,50	90,63	81,25	84,38	87,50	84,38	84,38	84,38	84,38	85,42	8				
		Tahunan	Pelayanan Klaster 3	86,70	84,57	82,45	81,91	83,51	82,98	81,38	80,32	81,38	82,80	47				
		Tahunan	Pelayanan Klaster 4	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	81,25	75,00	81,25	75,00	76,39	4				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Pelayanan Lintas Klaster (UGD, Rawat Inap, Farmasi, Pelayanan Gigi dan Mulut dan Laboratorium)	88,00	85,00	85,00	84,00	86,00	84,00	84,00	86,00	85,00	85,22	25				
44	Puskesmas Bulukunyi	Tahunan		87,86	86,66	86,25	88,59	89,79	88,91	89,87	86,98	91,56	88,5	316	Online	Waktu & prosedur	Forum konsultasi publik untuk review waktu pelayanan, FGD dengan semua PJ unit layanan terkait waktu, evaluasi prosedur layanan, antrian prioritas bagi lansia, anak, dan disabilitas	100%
		Tahunan	Layanan Klaster 1	87,16	86,49	86,49	88,85	90,2	88,18	89,53	87,16	91,22	88,36	74				
		Tahunan	Layanan Klaster 2	84,77	85,55	85,94	85,94	87,5	85,94	87,89	86,72	92,58	86,98	64				
		Tahunan	Layanan Klaster 3	89,47	87,17	86,84	90,13	91,45	91,45	91,45	87,17	91,78	89,66	76				
		Tahunan	Layanan Klaster 4	79,55	75	77,27	77,27	81,82	77,27	81,82	77,27	81,82	78,79	11				
		Tahunan	Layanan Lintas Klaster	89,29	87,36	85,99	89,29	89,84	89,84	90,66	87,09	91,48	88,98	91				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
45	Puskesmas Galesong	Tahunan		91,57	92,6	91,95	91,8	94,46	92,31	96,45	92,63	90,53	92,7	260	Online	Aduan & sarpras	Meningkatkan kemampuan petugas aduan, meningkatkan sarpras	90%
		Tahunan	Klaster 1 : Loket Pendaftaran	83,33	95,83	91,67	91,67	95,83	91,67	91,67	95,83	83,33	91,20	60				
		Tahunan	Klaster 2 : KIA, Usia Bayi dan Balita, Usia Anak dan Remaja, Ke.Gigi	92,75	92,39	90,94	93,12	93,48	92,39	98,19	92,03	92,39	93,08	69				
		Tahunan	Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lansia	91,03	90,06	89,42	90,06	91,67	89,74	94,55	89,74	89,74	87,78	78				
		Tahunan	Klaster 4 : Edukasi Layanan Program	100,00	92,86	96,43	92,86	100,00	96,43	100,00	96,43	96,43	90,00	7				
		Tahunan	Lintas Klaster : UGD, Rawat Inap, Apotik dan Laboratorium	90,76	91,85	91,30	91,30	91,30	91,30	97,83	89,13	90,76	88,33	46				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
46	Puskesmas Galesong Utara	Tahunan		77,88	80,07	76,50	80,65	80,07	81,91	83,06	81,34	81,22	80,30	217	Manual	Persyaratan & waktu	Informasi layanan dengan bahasa sederhana, mendesain media informasi, tempatkan media informasi di area strategis, menetapkan standar waktu pelayanan dan jadwal dokter, menyusun ulang jadwal pelayanan dan pembagian tugas, meningkatkan kedisiplinan petugas	-
		Tahunan	Pelayanan Klaster 1 (Pendaftaran, Administrasi Kepegawaian)	77,93	78,46	77,13	80,32	79,52	80,59	80,85	79,79	79,79	79,37	94				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Pelayanan Klaster 2 (Pelayanan Balita dan Usia Prasekolah, Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja, Pelayanan Ibu Hamil dan Nifas)	75,00	79,07	72,09	80,81	76,74	79,65	81,98	79,65	79,07	78,23	43				
		Tahunan	Pelayanan Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia)	80,56	86,11	75,00	83,33	83,33	86,11	88,89	86,11	88,89	84,26	9				
		Tahunan	Pelayanan Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular)	85,71	89,29	82,14	85,71	82,14	82,14	85,71	82,14	82,14	84,13	7				
		Tahunan	Lintas Sektor (UGD, Laboratorium, Apotek, Rawat Inap)	78,13	81,25	77,73	80,08	82,42	84,77	85,94	83,98	83,59	81,99	64				
47	Puskesmas Kepulauan Tanakeke	Tahunan		87,18	85,81	87,59	86,08	87,23	88,52	84,99	88,69	87,31	87,04	52	Manual	Perilaku & prosedur	Sosialisasi tentang komunikasi publik, pelatihan service excellent, evaluasi internal terhadap prosedur pelayanan	100%

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Klaster 1 (Pendaftaran, Rekam Medik, TU, Kepegawaian)	87,50	83,33	91,67	83,33	91,67	87,50	87,50	87,50	95,83	88,43	6				
		Tahunan	Klaster 2 (KIA, Perawatan Anak, Imunisasi, Gizi)	85,00	82,50	80,00	90,00	85,00	87,50	90,00	95,00	85,00	86,67	10				
		Tahunan	Klaster 3 (Pelayanan Usia Dewasa dan Lanjut Usia)	86,11	91,67	91,67	91,67	83,33	90,28	91,67	80,56	86,11	88,12	18				
		Tahunan	Klaster 4 (Pelayanan Penyakit Menular dan Sanitasi)	85,00	85,00	90,00	75,00	80,00	85,00	75,00	90,00	85,00	83,33	5				
		Tahunan	Klaster 5 (Pelayanan Poli Gigi, Lab, Apotek, IGD, Ranap)	92,31	86,54	84,62	90,38	96,15	92,31	80,77	90,38	84,62	88,68	13				
48	Puskesmas Komara	Tahunan		88,62	89,51	87,16	88,07	91,88	88,00	89,21	91,41	86,33	88,91	142	Manual	Waktu & sarpras	Melengkapi fasilitas, pengajuan pemeliharaan gedung, rutin apel pagi agar pelayanan lebih cepat	100%
		Tahunan	Klaster 1	91,43	89,29	82,86	86,43	87,14	92,86	90,00	90,71	85,00	88,41	36				
		Tahunan	Klaster 2	89,52	91,13	86,29	93,55	91,94	88,71	89,52	87,90	88,71	89,70	33				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Klaster 3	88,75	87,50	92,50	95,00	93,75	85,00	87,50	90,00	91,25	90,14	33				
		Tahunan	Klaster 4	85,00	90,00	90,00	80,00	100,00	85,00	90,00	100,00	85,00	89,44	5				
		Tahunan	Lintas Klaster	88,41	89,63	84,15	85,37	86,59	88,41	89,02	88,41	81,71	86,86	35				
49	Puskesmas Mangarabombang	Tahunan		89,55	87,95	84,77	87,73	86,36	88,41	96,14	84,32	85,23	87,83	110	Manual	Waktu & Aduan	Mengingatkan petugas untuk mengarahkan pasien memberi kritik dan saran, sosialisasi tentang media dan alur pengaduan, meningkatkan kedisiplinan petugas, sosialisasi pendaftaran online	100%
		Tahunan	Rawat Inap	92,05	92,05	88,64	90,91	95,45	88,64	100,00	89,77	80,68	90,91	22				
		Tahunan	Pendaftaran	90,91	90,91	88,64	89,77	90,91	92,05	100,00	86,36	88,64	90,91	22				
		Tahunan	Klaster 2 (KIA)	93,18	90,00	88,64	90,91	85,23	87,50	100,00	88,33	85,00	89,87	22				
		Tahunan	Klaster 3 (Usia Dewasa dan Usila)	84,09	82,95	72,73	84,09	80,68	86,36	80,68	75,00	80,68	80,81	22				
		Tahunan	Apotik	87,50	86,36	85,23	82,95	79,55	87,50	100,00	84,09	90,91	87,12	22				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
50	Puskesmas Pattallassang	Tahunan		92,89	87,57	88,66	100,00	90,00	89,83	89,58	89,99	91,64	91,13	375	Manual	Prosedur & Waktu	Membuat alur pelayanan yang mudah dipahami, teguran dan disiplin pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, sosialisasi mobile JKN	100%
		Tahunan	Klaster 1	93,41	85,99	88,19	100,00	89,84	90,66	88,19	89,84	91,48	90,84	91				
		Tahunan	Klaster 2	94,05	86,90	91,67	100,00	91,67	89,29	91,67	89,29	89,29	91,53	21				
		Tahunan	Klaster 3	92,13	89,81	87,04	100,00	89,35	89,81	90,28	90,28	91,67	91,15	54				
		Tahunan	Lintas Klaster Gigi	89,58	84,38	90,63	100,00	89,58	88,54	87,50	86,46	90,63	89,70	24				
		Tahunan	Lintas Klaster UGD	91,67	91,67	86,67	100,00	90,83	90,83	90,00	90,83	92,50	91,67	30				
		Tahunan	Lintas Klaster Apotek	93,50	87,00	88,25	100,00	88,75	89,25	89,00	90,50	92,25	90,94	100				
		Tahunan	Lintas Klaster Lab	95,91	87,27	88,18	100,00	90,00	90,45	90,45	92,73	93,64	92,07	55				
51	Puskesmas Pattopakang	Tahunan		83,23	79,37	82,13	81,69	88,79	81,47	81,55	83,59	82,65	82,72	120	Manual	Prosedur & kompetensi	Meningkatkan manajemen dan pelayanan, pelatihan skill untuk petugas, melaporkan dan sosialisasi hasil kegiatan	100%
		Tahunan	Klaster 1 (Loket Pendaftaran)	77,50	77,50	77,50	80,00	82,50	82,50	77,50	80,00	85,00	80,00	10				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Klaster 2 (KIA, Usia Bayi dan Balita, Usia Anak dan Remaja, Gigi	84,55	82,73	83,64	80,00	83,64	81,82	81,82	82,73	82,27	82,58	55				
		Tahunan	Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia)	80,56	79,86	79,17	79,86	102,08	81,25	79,86	79,86	79,17	82,41	36				
		Tahunan	Klaster 4 (Edukasi Layanan Program	95,00	80,00	90,00	90,00	90,00	85,00	90,00	95,00	90,00	89,44	5				
		Tahunan	Klaster 5 (UGD, Rawat Inap, Apotek dan Laboratorium)	78,57	76,79	80,36	78,57	85,71	76,79	78,57	80,36	76,79	79,17	14				
52	Puskesmas Polongbangkeng Selatan	Tahunan		93,48	90,19	82,83	89,57	85,92	91,75	96,25	85,73	82,85	88,73	85	Manual	Waktu & sarpras	Permintaan alat kesehatan, kalibrasi alat kesehatan, pengadaan alat sarpras, evaluasi pelaku pelayanan, memasang standar waktu pelayanan	100%
		Tahunan	Klaster 1	87,50	90,63	87,50	85,94	85,94	87,50	100,00	89,06	89,06	89,24	16				
		Tahunan	Klaster 2	93,75	91,25	87,50	93,75	95,00	96,25	96,25	96,25	83,75	92,64	20				
		Tahunan	Klaster 3	92,74	85,48	83,87	87,10	87,10	91,13	94,35	84,68	83,06	87,72	31				
		Tahunan	Lintas Klaster Poli Gigi	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00	80,00	90,00	5				
		Tahunan	Lintas Klaster Rawat Inap	96,88	93,75	78,13	90,63	87,50	90,63	96,88	84,38	81,25	88,89	8				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Lintas Klaster Lab	90,00	90,00	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	80,00	80,00	83,89	5				
53	Puskesmas Polongbangkeng Utara	Tahunan		89,80	89,53	89,23	88,22	88,94	88,56	88,90	87,63	87,46	88,70	169	Online	Aduan & sarpras	Melengkapi fasilitas puskesmas, pengajuan pemeliharaan gedung, klasifikasi detail keluhan, publikasi tindak lanjut dari aduan	100%
		Tahunan	Klaster 1	90,74	90,74	91,67	91,67	90,74	90,74	91,67	88,89	87,96	90,53	27				
		Tahunan	Klaster 2	87,35	87,94	87,35	87,06	87,65	87,65	88,24	87,06	86,18	87,39	85				
		Tahunan	Klaster 3	97,78	96,11	96,67	95,00	96,11	96,67	94,44	93,33	94,44	95,62	45				
		Tahunan	Lintas Klaster	83,33	83,33	81,25	79,17	81,25	79,17	81,25	81,25	81,25	81,25	12				
54	Puskesmas Sanrobone	Tahunan		90,00	80,31	79,69	90,63	77,50	80,63	80,63	78,13	77,81	81,77	80	Manual	Produk & sarpras	Perbaikan produk layanan, usulan pengadaan produk layanan yang lebih baik, perbaikan sarpras di semua bidang	100%
		Tahunan	Pelayanan Klaster I (Pendaftaran Rekam Medik, Manajemen)	89,29	80,00	75,71	90,71	77,86	80,00	80,00	75,71	79,29	80,95	35				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Pelayanan Klaster II (Kesehatan Ibu dan Anak, Remaja)	90,63	81,25	84,38	92,19	75,00	78,13	78,13	76,56	76,56	81,43	16				
		Tahunan	Pelayanan Klaster III (Usia Dewasa dan Lansia)	92,50	80,00	82,50	87,50	80,00	90,00	82,50	90,00	77,50	84,72	10				
		Tahunan	Pelayanan Klaster IV (Penanggulangan Penyakit Menular)	95,00	80,00	90,00	95,00	75,00	80,00	85,00	80,00	80,00	84,44	5				
		Tahunan	Pelayanan Lintas Klaster (UGI, Farmasi, Rawat Inap, Pelayanan Gimul)	87,50	80,36	78,57	89,29	78,57	78,57	82,14	76,79	75,00	80,75	14				
55	Puskesmas Towata	Tahunan		77,02	77,62	78,07	79,38	82,16	79,83	80,60	77,84	80,27	79,20	142	Manual	Persyaratan & prosedur	Review persyaratan layanan, FGD untuk sosialisasi syarat-syarat layanan, evaluasi prosedur layanan yang butuh waktu lama, antrian prioritas bagi lansia, anak, dan disabilitas.	100%
		Tahunan	Klaster 1	76,39	76,39	76,39	76,39	76,39	76,39	76,39	76,39	76,39	76,39	36				

No	Nama OPD	Periode Survei	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Perbaikan	RTL	% TL Periode Sebelumnya
		Tahunan	Klaster 2	78,79	79,55	80,30	81,82	84,09	83,33	83,33	83,33	84,09	82,07	33				
		Tahunan	Klaster 3	73,48	75,00	76,52	77,27	80,30	77,27	82,58	78,79	78,03	77,69	33				
		Tahunan	Klaster 4	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	80,00	80,00	75,00	85,00	81,67	5				
		Tahunan	Lintas Klaster	76,43	77,14	77,14	76,43	80,00	82,14	80,71	75,71	77,86	78,17	35				
	IKM Instansi	Tahunan		86,11	85,55	84,59	90,72	85,80	85,61	86,91	86,27	86,31	87,99	109				79%

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jln. Syech Yusuf No. 2 Kabupaten Takalar Telp. (0418) - 21098

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 – 2026

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026, telah memasuki tahun kedua. Setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian realisasi RPD Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023, ada beberapa perubahan – perubahan yang sudah tidak selaras lagi dengan target – target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 akan diselaraskan target dan beberapa kondisi hasil evaluasi Tahun 2023 yang tidak sesuai lagi dengan target dan kondisi Tahun 2024 - 2026. Olehnya itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Pada Huruf D Pengendalian Dan Evaluasi Serta Perubahan, Poin Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan
c. Terjadi perubahan yang mendasar;
d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Adapun perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026, sebagai berikut:

1. Penetapan Target Indikator makro disesuaikan dengan capaian data makro tahun 2022 dan tahun 2023 yang telah melampaui target, sehingga dipandang perlu untuk merevisi target kinerja tahun berikutnya.
2. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah disesuaikan dengan capaian data makro tahun 2022 dan tahun 2023 yang telah melampaui target, sehingga dipandang perlu untuk merevisi target kinerja tahun berikutnya.

3. Perubahan indikator SPM Bidang Pendidikan, perubahan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 menjadi Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, dimana pengukuruan mutu layanan peserta didik berdasarkan Rapor Pendidikan yang berimplikasi terhadap penambahan indikator SPM bidang Pendidikan.
4. Perubahan Indikator SDGs menggunakan Metadata SDGs Buku II. Telah dilakukan kaji ulang atas dokumen Metadata TPB/SDGs Indonesia sebagai dokumen acuan atas indikator-indikator TPB/SDGs yang merupakan alat ukur pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada: **pertama**, perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-STAT) di tingkat global yang awalnya pada tahun 2016 berjumlah 241 indikator menjadi 247 indikator pada April 2020 dan meliputi perubahan tingkatan indikator (Tiers), dan redaksional metadata indikator global. **Kedua**, relevansi indikator dengan Agenda Pembangunan Nasional yang selaras dengan TPB/SDGs. Kaji ulang dilakukan secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak dari 4 (empat) platform partisipatif yang terdiri atas unsur pemerintah dan nonpemerintah dan telah menghasilkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II sebanyak 289 indikator dari sebelumnya pada Edisi I mencakup 319 indikator atas 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs Indonesia. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2020-2024 serta Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Perubahan Nomenklatur 9 (Sembilan) Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Tabel Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Tahun 2023 - 2026

No.	Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026	Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026
1.	**Indikator Makro:** 1. Bab III Gambaran Keuangan Daerah, Tabel III-15 (Hal. III-53) 2. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Tabel VIII-1 (Hal.VIII-2), Tabel VIII-2 (Hal.VIII-4). **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** 1. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Tabel VIII-3 (Hal.VIII-7)	Tabel Perubahan terlampir

2.	**Indikator Kinerja Utama** 1. Bab V Tujuan dan Sasaran, Tabel V-1 (Hal. V-3)	Tabel Perubahan terlampir
3.	**Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan** Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Tabel VIII-4 (Hal.VIII-25)	Tabel perubahan terlampir
4.	**Indikator SDGs/TPB** Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tabel VIII-5 (Hal VIII-32)	Tabel perubahan terlampir

Kepala Bappelitbangda,

Dr. ACHMAD RIVAI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681012 198908 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Tabel V-1.
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Takalar 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
			2021-2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Tujuan-1: Memperkuat daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,84	3,21	3,40	3,60	3,85	4,00
	Sasaran-1.1.: Meningkatnya kualitas hidup manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,72	68,83	72,85	73,45	73,86	73,86
	Sasaran-1.2: Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	1,92	3,19	3,72	3,85	3,95	4,00
2.	Tujuan-2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB/kapita	33,97*	34,03	49,52	51,24	56,51	56,51
		Indeks Gini	0,36*	0,35	0,35	0,34	0,32	0,3
	Sasaran-2.1: Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	4,10-5,55	4,62-5,98	5,04-6,52	6,10-7,14	6,22-7,78	6,22-7,78
		Tingkat pengangguran terbuka	3,50	3,32	2,5	2,2	2	2
	Sasaran-2.2: Berkurangnya penduduk miskin	Angka kemiskinan (%)	8,25%*	7,09	6,90	6,69	6,60	6,60
	Sasaran-2.3.: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	58,98	59,02	59,06	59,10	59,14	59,14

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
			2021-2022	2023	2024	2025	2026	2026
4.	Tujuan 3: Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	49,49	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
	Sasaran 3.1.: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah	59,38	B (60-70)	B (60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
	Sasaran 3.2.: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	46,11	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum Dinilai	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)
	Sasaran 3.3.: Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka kriminalitas	96,41 per 100.000 Penduduk	91,91 per 100.000 Penduduk	89,41 per 100.000 Penduduk	86,91 per 100.000 Penduduk	84,41 per 100.000 Penduduk	84,41 per 100.000 Penduduk

Kepala Bappelitbangda,

Drs. ACHMAD RIVAI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681012 198908 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 47, Kalabbirang, Pattallassang, Takalar
92211 takalarinspektorat@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Takalar, 31 Maret 2026

Plt. Inspektur Daerah,

Drs. Muhammad Rusli, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19730513 199303 1 005

Dipindai dengan CamScanner